



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Majukan Perdagangan Bersama Zulhas



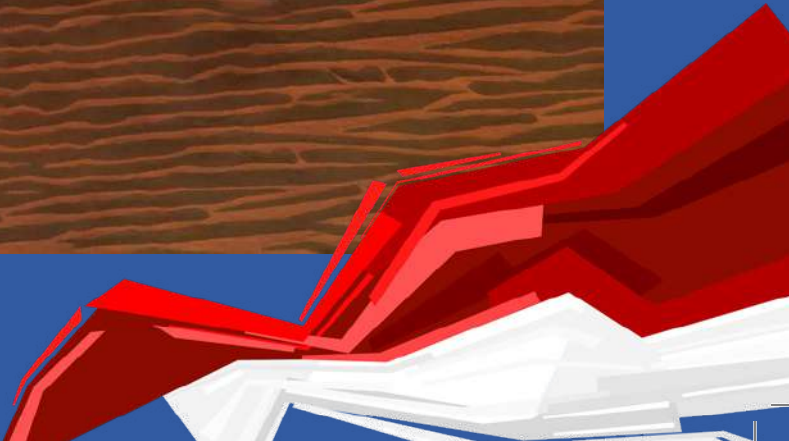
**“Alhamdulillah,
amanah sebagai
Menteri Perdagangan
yang dipercayakan oleh
Bapak Presiden kepada
saya memasuki 1,5 tahun
di dalam situasi yang
penuh tantangan baik
nasional maupun
global.”**

— ZULKIFLI HASAN





Jajaran Pimpinan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia



Majukan Perdagangan Bersama Zulhas

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Republik Indonesia Pasal 113, Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penanggung Jawab:
Suhanto

Editor & Penyelaras Akhir:
Muhammad Rivai Abbas

Editor:
Asfiranti, Rina Indriyana,
Sofia Mariana

Penulis:
Heru B. Arifin, Ahmadi Supriyanto,
Abdul Syukur

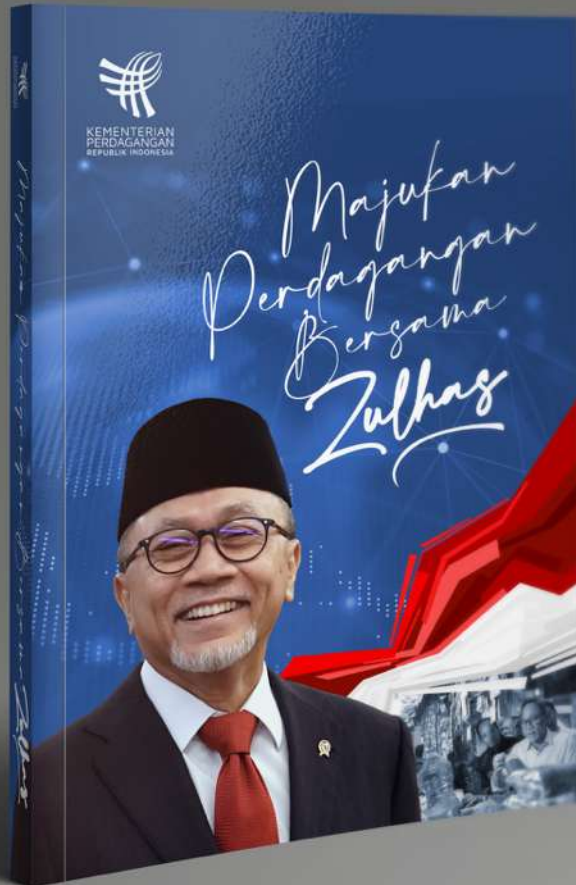
Fotografer:
Tim Biro Humas Kemendag

Desain:
Ricky Nadian

Biro Humas
Kementerian Perdagangan RI
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5,
Jakarta Pusat 10110, (Gedung I Lantai 2)
Telp. (021) 386371
Fax. (021) 3508711

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Amanah
Anggota IKAPI
Jl. Moncokerto II No.12G,
Utari Kayu Selatan, Matraman
Jakarta Timur



Majukan Perdagangan Bersama Zulhas,

Sebuah tema yang digagas untuk menorehkan tinta emas keberhasilan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) selama memimpin dan mengorkestrasi Kementerian Perdagangan. Gerak langkah dan capaian kinerjanya memberikan kontribusi besar dalam memajukan perdagangan Indonesia.

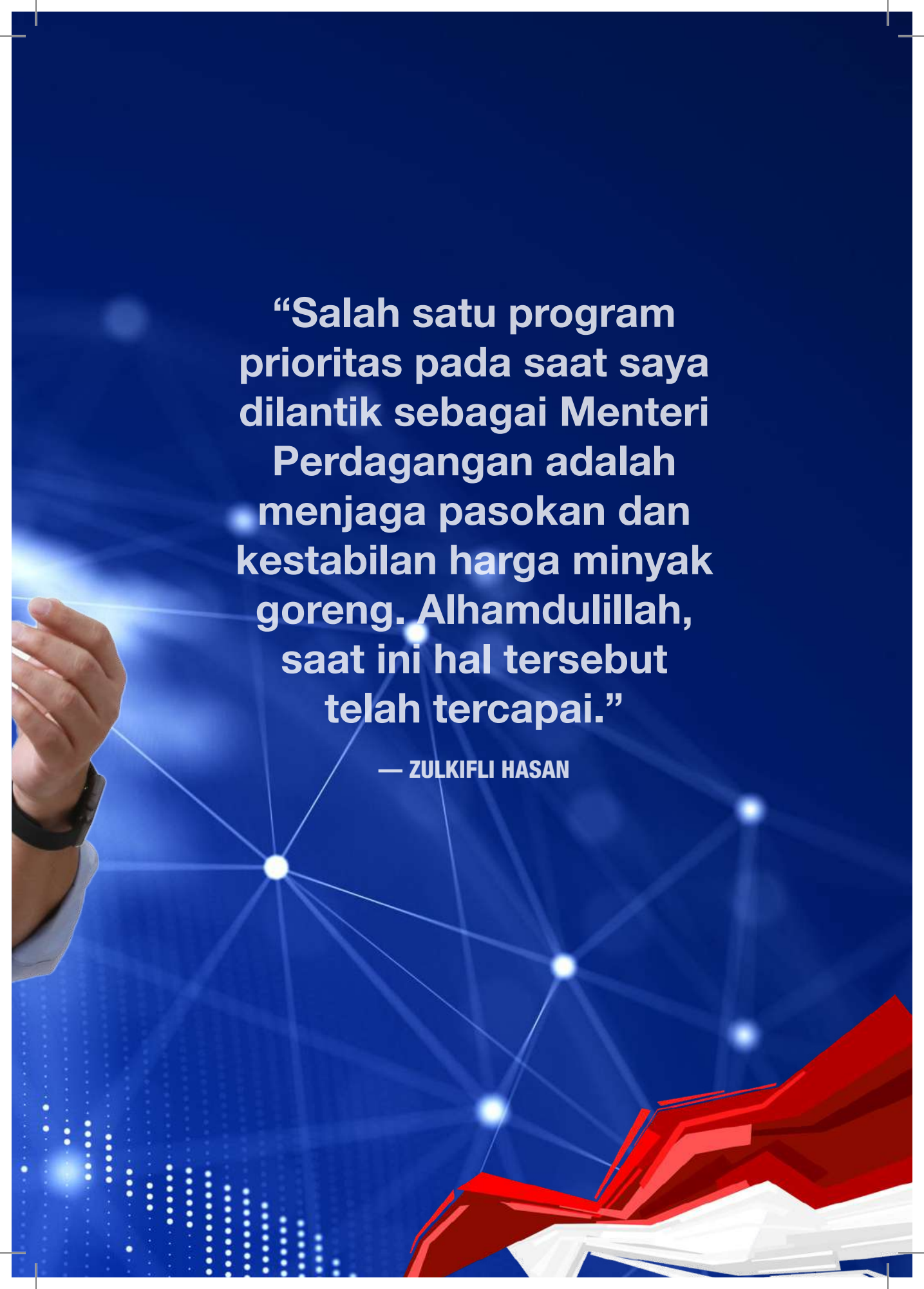


Presiden RI Joko Widodo melantik Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. sebagai Menteri Perdagangan RI



Sumber: BPMI Kemensetneg





“Salah satu program prioritas pada saat saya dilantik sebagai Menteri Perdagangan adalah menjaga pasokan dan kestabilan harga minyak goreng. Alhamdulillah, saat ini hal tersebut telah tercapai.”

— ZULKIFLI HASAN



Daftar Isi



Hal. 28

1

Sukses
Pertahankan
Inflasi



Hal. 40

2

Sukses
Surplus
Perdagangan



Hal. 56

3

Sukses
Implementasi
Kebijakan
Pro-Rakyat



Hal. 68

4

Sukses
Jaga Stabilisasi
Harga Minyak
Goreng



Hal. 76

5

Sukses
Menjaga
Momentum
Pemulihan
Ekonomi



Hal. 92

6

Sukses
Bangun "Jalan
Tol" (*Toll Way*)
Perdagangan



Hal. 126

7

Sukses
Misi Dagang &
Trade Expo
Indonesia



Hal. 150

8

Sukses
Perdagangan
Digital yang Adil
dan Sehat



Hal. 164

9

Sukses
Perlindungan
Konsumen



Hal. 182

10

Sukses
Bursa Kripto
& CPO



Hal. 194

11

Sukses
Tata Kelola
Pemerintahan



Hal. 210

12

Sukses
Lindungi Industri
Dalam Negeri



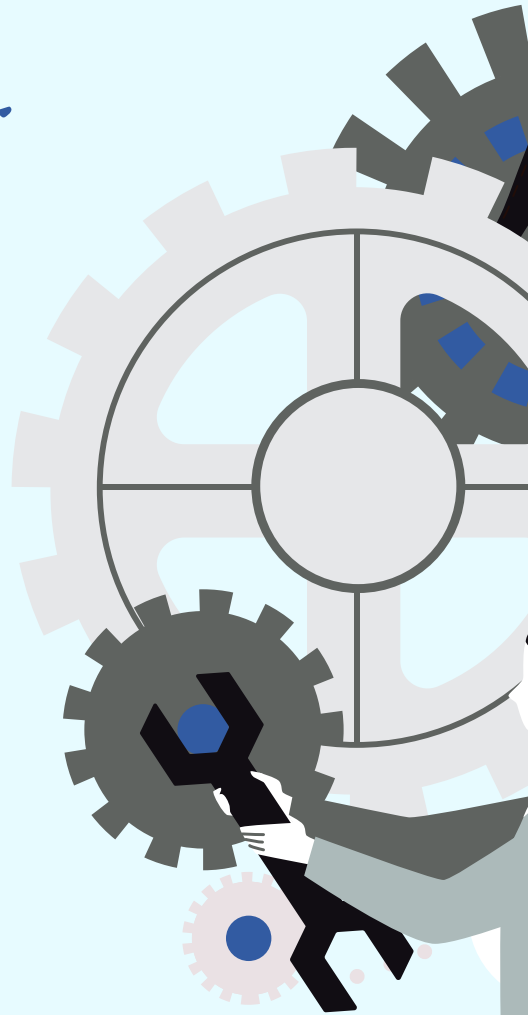
Kata Pengantar



ZULKIFLI HASAN
Menteri Perdagangan

Semangat Kolaborasi!

A lhamdulillah, tepat 1 Januari 2024, selama satu setengah tahun, saya mengemban amanah dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Di tengah tantangan perdagangan global dan pemulihan ekonomi nasional, mandat untuk memajukan perdagangan Indonesia berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Untuk menandai capaian kinerja, dedikasi dan kerja keras tersebut, Kementerian Perdagangan berinisiatif mempersembahkan sebuah buku berjudul “Majukan Perdagangan Bersama Zulhas.”



Buku ini berisi berbagai capaian penting yang saya dan seluruh jajaran di Kementerian Perdagangan selama menjalankan mandat Presiden. Selama memimpin dan memajukan perdagangan nasional, kinerja perdagangan banyak diwarnai situasi turbulensi dan ketidakpastian perekonomian global. Situasi geopolitik terjadi perang Ukraina dan Rusia dan perubahan iklim telah mengancam krisis energi dan pangan.

Kendati demikian, di tengah situasi tersebut, kita patut bersyukur karena saya dan tim Kemendag berhasil membawa kemajuan besar bagi perdagangan nasional. Laju inflasi berhasil dijaga sehingga secara keseluruhan inflasi di tahun 2023 tercatat terendah selama 20 tahun terakhir di luar periode pandemi (1999—2024).

Namun demikian, menurut catatan Badan Pusat Statistik, kita masih tetap mempertahankan tren surplus neraca perdagangan selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus tahun 2023 mencapai USD36,93 miliar. Tren surplus berkelanjutan ini bahkan menjadi periode surplus terpanjang sejak 15 tahun terakhir. Di sisi lain, kita banyak berprestasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang pro-rakyat untuk melindungi UMKM dan konsumen.

Buku ini menarasikan capaian dan perjuangan kita semua dalam mengantarkan kemajuan perdagangan Indonesia selama 2023. Ke depan, memasuki tahun 2024, kita sangat optimistis dunia perdagangan makin maju dan berkembang.

Kuncinya adalah kolaborasi. Para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas maupun pers harus membangun lebih banyak persamaan pandangan untuk mewujudkan perdagangan berkelanjutan dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Inshaallah dengan kolaborasi, kemajuan perdagangan nasional akan tetap kita tapaki dengan rasa percaya diri dan tetap waspada. Semoga Allah Swt. membimbing kita semua dalam pencapaian dan kemajuan perdagangan Indonesia kini dan di masa-masa yang akan datang. Ini tentu menjadi optimisme bagi kita semua. Indonesia harus bisa mengembangkan perdagangan berkelanjutan agar cita-cita menjadi negara maju pada 2045 dapat terwujud. ■



Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Menteri Perdagangan RI

Peran Penting Mendag Zulhas



Rendahnya inflasi 2023 sebesar 2,61 persen (*year on year*) menjadi capaian penting kinerja Kabinet Indonesia Maju. Namun tak bisa dimungkiri, ada peran penting yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Tidak lagi terjadi gonjang-ganjing di masyarakat akibat kekurangan stok dan kelangkaan.

Seperti diketahui, kenaikan harga barang dan jasa akan mengakibatkan perekonomian tidak stabil. Ketidakstabilan itu akan memicu inflasi. Jika inflasi terus tinggi akan memicu tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Saya bersyukur inflasi tahun 2023 merupakan terendah sepanjang 20 tahun terakhir.

Untuk menjaga inflasi, Mendag Zulhas tentu tidak diam saja di meja kementerian dan berpangku tangan tetapi senantiasa turun langsung ke pasar-pasar. Beliau menyerap aspirasi masyarakat, berbincang dengan para pedagang pasar, dengan emak-emak dan blusukan ke berbagai pasar rakyat di seluruh pelosok Tanah Air. Ini tugas berat dan Pak Zulhas menjalankan amanah ini dengan ceria dan penuh tanggung jawab. Saya mengucapkan selamat atas capaian kinerja ekonomi ini. Semoga daya beli masyarakat terus tumbuh dan ekonomi Indonesia maju sehingga Indonesia Semakin Maju dan Sejahtera. Inilah impian kita semua. ■



Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Kolaborasi, Kekuatan Pak Zulhas



Saya sangat terkesan dengan perjuangan Pak Zulhas dalam memajukan perdagangan nasional. Seperti tidak ada capeknya. Beginilah sejatinya perjuangan untuk membantu rakyat, menyejahterakan rakyat Indonesia dan mengokohkan pondasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Judul buku ini sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana perjuangan Pak Zulhas selama

memimpin Kementerian Perdagangan. Sejak menjabat, beliau langsung turun ke pasar-pasar untuk memastikan harga kebutuhan pokok stabil dengan harga terjangkau. Fokusnya bagaimana stok melimpah dan harga stabil sehingga semua rakyat senang. Semua masalah diurai dengan baik dan menguntungkan semua pihak. Pelaku usaha untung, pedagang untung dan konsumen gembira.

Sebagai Menteri BUMN, saya salut dengan kerja keras Pak Zulhas dalam memajukan perdagangan nasional. Dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak termasuk dengan Kementerian BUMN, perekonomian nasional akan semakin maju dan berkembang. Kolaborasi adalah kunci kemajuan ekonomi Indonesia. Kekuatan Pak Zulhas adalah membangun komunikasi dan bersinergi. Semua pihak merasa dihargai dan diperhatikan dengan baik sehingga tidak salah capaian kinerja perdagangan juga sangat menjanjikan baik di sektor perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. ■

Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Bangga Kinerja Mendag Zulhas



Capaian kinerja perdagangan sangat penting untuk melihat perbaikan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dengan inflasi terendah sepanjang 20 tahun terakhir, yaitu mencapai 2,61 persen, hal itu menunjukkan kinerja perdagangan sangat membanggakan.

Begitu juga capaian surplus kinerja perdagangan yang mencapai USD36,93 miliar juga mencerminkan kolaborasi dan kerja keras seluruh anggota kabinet di bidang ekonomi yang sangat baik. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, surplus perdagangan ini tetap memberikan harapan bagi melajunya ekonomi nasional. Kinerja surplus perdagangan tersebut dicapai dari situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, terjadinya turbulensi geopolitik akibat perang dan perubahan iklim yang mengancam krisis energi dan krisis pangan.

Sekali lagi selamat atas terbitnya buku berjudul "Majukan Perdagangan Bersama Zulhas." Saya berharap ekonomi nasional terus maju dan berkembang agar rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera. ■

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Mu'ti'.

Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

Pak Zulhas Sangat Peduli



Saya bersyukur ketika Pak Zulhas diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Perdagangan. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau, sektor perdagangan semakin maju dan berkembang. Terlebih situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, dibutuhkan sosok pemimpin yang cerdas dan mau bekerja keras melayani masyarakat. Saya melihat Pak Zulhas selalu turun ke pasar-pasar tradisional, mengecek

secara langsung stok dan harga barang kebutuhan pokok. Jika ada komoditi yang naik, beliau langsung mengambil tindakan sehingga harganya kembali stabil. Sinergi dan kolaborasi selalu menjadi kunci kepemimpinannya. Alhamdulillah, keyakinan saya terbukti. Ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan tren pertumbuhan, sukses menjaga inflasi, dan mempertahankan tren surplus perdagangan. Meskipun berlatar belakang Muhammadiyah, beliau sangat peduli dan penuh perhatian kepada warga nahdliyin. Rakyat nahdliyin yang menjadi konsumen terbesar kebutuhan pokok merasakan manfaat besar karena kelangkaan minyak goreng berhasil dihentikan. Stok melimpah dan harga stabil. Begitu juga barang kebutuhan pokok lainnya yang berhasil dipertahankan stabilitas harganya. Semoga Pak Zulhas senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga dapat terus memajukan perdagangan Indonesia. ■

Saifullah Yusuf

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Pendahuluan

Dedikasi penuh tanggung jawab dan kerja keras membangun kolaborasi adalah fakta di balik sukses yang diraih Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selama mengemban mandat Presiden Joko Widodo. Oleh sejumlah media, sosoknya dinilai sebagai tokoh dan pemimpin inspiratif yang layak diganjar penghargaan. Sederet kesuksesan memimpin kementerian dan memajukan perdagangan nasional akan menjadi arus utama pembuatan buku ini.

Kinerja perdagangan bisa dilihat dari situasi ekonomi global dan bagaimana Mendag Zulhas berkiprah. Sejak awal tahun, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat seiring adanya ancaman resesi global yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter, memburuknya kondisi keuangan global, dan disrupsi berlanjut akibat ketegangan geopolitik. Selama tahun berjalan, beberapa organisasi internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat sebesar 2,1–3 persen di 2023 (IMF, OECD, dan World Bank, 2023).

Proyeksi Pertumbuhan Dunia 2023



Sumber: IMF, OECD, dan Bank Dunia diolah oleh BKPerdag 2023

Di tengah semua situasi sulit dan penuh tantangan itu, pada triwulan III-2023, perekonomian masih tumbuh mendekati 5 persen (YoY). Memang sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,17 persen (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06 persen (YoY), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen)

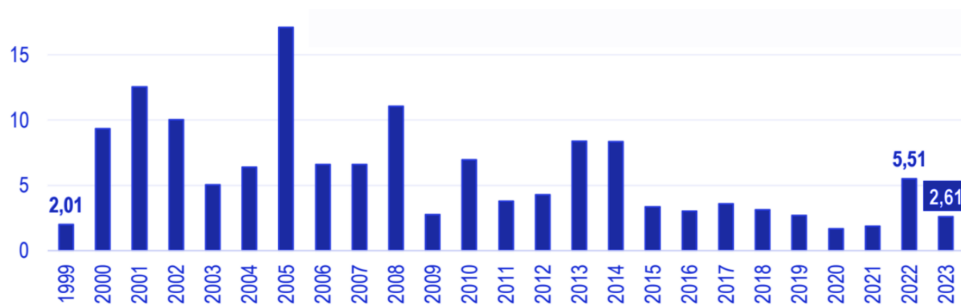


Sumber: BPS (2023)



Goncangan perekonomian dunia makin nyata. Terjadi kenaikan inflasi dunia yang sangat tinggi. Dalam situasi seperti itu, ekonomi Indonesia tak ikut terempas dan karam. Indonesia berhasil bertahan dengan inflasi sebesar 2,61 persen pada 2023. Selama 2023, inflasi Indonesia terus terkendali. BPS mencatat inflasi tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Artinya, inflasi masih terkendali dan dalam sasaran inflasi 2—4 persen. Secara keseluruhan inflasi di tahun 2023 tercatat terendah selama 20 tahun terakhir di luar periode pandemi (1999—2023).

Inflasi Indonesia Tahun 1999-2023 (persen)



Sumber: BPS (2024)



Gempuran masalah dan tantangan dunia belum juga berhenti. Dari sisi perdagangan, setelah mencatatkan titik balik yang luar biasa sepanjang tahun 2021, WTO dan IMF kembali memprediksi terjadinya perlambatan pertumbuhan volume perdagangan barang. Syukurlah, prediksi berbagai lembaga internasional itu masih jauh panggang dari api. Kondisi perdagangan Indonesia memberikan kinerja yang cukup baik.

Dalam situasi perlambatan dunia, Indonesia masih bisa mencatat surplus perdagangan positif USD36,93 miliar pada tahun 2023 sebagaimana disampaikan oleh BPS. Tantangan perdagangan makin kompleks dan multidimensi, mulai dari perang, isu lingkungan, pangan, energi, hingga proteksi, neraca perdagangan Indonesia masih terus melanjutkan tren positif surplus.

Neraca Perdagangan Indonesia Periode Januari—Desember 2023*

NO	URAIAN	USD MILIAR			% CHANGE	% CHANGE	USD MILIAR		% CHANGE
		Desember 2022r	November 2023	Desember 2023*	(MoM)	(YoY)	Jan-Des 2022r	Jan-Des 2023*	(YoY)
				Angka sementara	Des'23*/Nov'23	Des'23*/22	2022r	Angka Sementara	Jan-Okt'23*/22
I.	EKSPOR	23.78	22.00	22.41	1.89	(5.76)	291.90	258.82	(11.33)
	- Migas	1.46	1.28	1.48	15.29	1.51	16.00	15.92	(0.47)
	- Non Migas	22.32	20.72	20.93	1.06	(6.23)	275.91	242.90	(11.96)
II.	IMPOR	19.86	19.59	19.11	(2.45)	(3.81)	237.45	221.89	(6.55)
	- Migas	3.20	3.49	3.37	(3.33)	5.35	40.42	35.83	(11.35)
	- Non Migas	16.66	16.10	15.73	(2.26)	(5.57)	197.03	186.06	(5.57)
III.	TOTAL TRADE	43.65	41.58	41.52	(0.15)	(4.87)	529.35	480.70	(9.19)
	- Migas	4.66	4.77	4.85	1.67	4.15	56.41	51.75	(8.26)
	- Non Migas	38.99	36.81	36.67	(0.39)	(5.95)	472.94	428.95	(9.30)
IV.	TRADE BALANCE	3.92	2.41	3.31	37.13	(15.62)	54.46	36.93	(32.18)
	- Migas	(1.74)	(2.21)	(1.89)	(14.16)	8.57	(24.42)	(19.91)	(18.47)
	- Non Migas	5.66	4.62	5.20	12.63	(8.16)	78.88	56.84	(27.94)

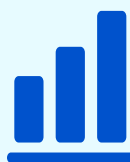
Sumber: BPS, diolah BKPerdag (2023)

*) angka sementara



USD36,93 miliar

Surplus Neraca
Perdagangan Indonesia
(Januari—Desember 2023)



112,94%

Indikator Kinerja Neraca
Perdagangan Barang
(Januari—Desember 2023)

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode Januari—Desember 2023 mencatatkan surplus sebesar USD36,93 miliar, terdiri dari surplus nonmigas USD56,84 miliar dan defisit migas sebesar USD19,91 miliar. Ini bukti tingkat capaian Indikator Kinerja Neraca Perdagangan Barang sebesar 112,94 persen.

Mendag Zulhas sebagai bagian inti dari Kabinet Indonesia Maju bekerja sangat keras dan berpikir cerdas untuk bisa mengatasi berbagai tantangan ekonomi dunia. Hasilnya memang sangat positif. Rahasia keberhasilan bertahan dari gempuran ekonomi global adalah strategi kebijakan yang dirancang dengan semangat kolaborasi. Strategi turun langsung ke masyarakat, ke sektor-sektor ekonomi dan perdagangan, dan berkomunikasi secara intens dengan rakyat.

Mendag Zulhas harus mendapatkan informasi langsung dari pelaku usaha dan mendengarkan keluhan langsung rakyat. Mendag Zulhas berkomitmen menjawab setiap tantangan dan keluhan pelaku usaha, pedagang dan pelaku UMKM. Prinsipnya kebijakan, strategi dan setiap langkah disusun dengan semangat kolaboratif untuk rakyat. ■



12 Sukses Perdagangan

Banyak kinerja sukses yang telah ditorehkan Mendag Zulhas selama 1,5 tahun bekerja bersama jajaran Kementerian Perdagangan. Namun, buku ini hendak memotret setidaknya 12 sukses Mendag Zulhas dalam memajukan perdagangan nasional.



PERTAMA, SUKSES PERTAHANKAN INFLASI.

Secara keseluruhan inflasi pada tahun 2023 tercatat terendah selama 20 tahun terakhir di luar periode pandemi (1999—2024).



KEDUA, SUKSES SURPLUS PERDAGANGAN.

Tren surplus berhasil dipertahankan. Hingga November 2023, kinerja perdagangan berhasil mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD33,63 miliar.



KETIGA, SUKSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRO RAKYAT.

Cukup banyak prestasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang pro-rakyat dalam rangka melindungi UMKM dan hak konsumen.



KEEMPAT, SUKSES JAGA STABILISASI HARGA MINYAK GORENG.

Salah satu program prioritas pada saat Mendag Zulhas dilantik sebagai Menteri Perdagangan adalah menjaga pasokan dan kestabilan harga minyak goreng.



KELIMA, SUKSES MENJAGA MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA 2023

Indonesia adalah salah satu negara yang tetap melanjutkan tren pemulihan ekonomi pada 2023 di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara mitra seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, serta tren penurunan harga beberapa komoditas ekspor utama kita antara lain CPO, batubara dan produk nikel. Indonesia sampai dengan triwulan III-2023 masih tumbuh mendekati 5 persen (YoY), meskipun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,17 persen (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06 persen (YoY), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi.



KEENAM, SUKSES PERJANJIAN PERDAGANGAN UNTUK PERLUASAN PASAR EKSPOR

Di tengah perlambatan ekonomi akibat keadaan geopolitik, perdagangan dunia terfragmentasi menuju arah *friendshoring* yaitu perdagangan dan investasi mengarah pada kesamaan pandangan politik bukan lagi kedekatan wilayah dan ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia yang dalam posisi netral untuk meningkatkan efektivitas CEPA, FTA dan sejenisnya yang telah disepakati seperti dengan Indonesia-UAE CEPA dan RCEP.



KETUJUH, SUKSES MISI DAGANG KE NEGARA POTENSIAL EKSPOR DAN CAPAIAN TRANSAKSI PAMERAN TEI KE-38 TAHUN 2023 YANG MELAMPAUI TARGET

Mendag Zulhas memimpin langsung misi dagang ke Arab Saudi dengan menghasilkan kontrak kerja sama senilai USD155,7 juta atau senilai Rp2,3 triliun. Kerja turun tangan langsung juga dilakukan dalam misi dagang ke Mesir pada tanggal 14–16 Mei 2023 yang berhasil membukukan potensi nilai transaksi sebesar USD859,08 juta atau senilai Rp12,8 triliun. Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk terus melakukan promosi ke pasar-pasar tujuan ekspor nontradisional dan akan terus kita dorong di tahun mendatang. Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 yang berlangsung sejak 18 Oktober–18 Desember 2023, sukses melampaui target USD11 miliar dengan total transaksi USD30,5 miliar atau senilai Rp472,8 triliun.



KEDELAPAN, SUKSES PERDAGANGAN DIGITAL YANG ADIL DAN SEHAT BAGI KEMAJUAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Untuk mendukung potensi pertumbuhan *E-Commerce* tersebut, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Kepmendag Nomor 1998 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara. Barang-barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah USD100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform *E-Commerce* lintas negara hanya empat komoditi yaitu musik, software, buku dan film.



KESEMBILAN, SUKSES PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM NEGERI HARUS DIUTAMAKAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang mencapai 278 juta jiwa. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan konsumen sekaligus target pasar produk dalam dan luar negeri. Untuk menjamin perlindungan konsumen maka keberdayaan konsumen Indonesia harus ditingkatkan sehingga konsumen tidak rentan untuk dieksploitasi.



KESEPULUH, SUKSES PERDAGANGAN KRIPTO MAKIN PESAT

Perlindungan konsumen juga diberikan untuk perdagangan komoditas termasuk aset kripto. Pada periode Januari-November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Sedangkan pedagang Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti dan Bursa tercatat sebanyak 32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAPK). Jumlah pelanggan Aset Kripto sejak diaturnya Aset Kripto oleh Bappebti sampai dengan November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan.



KESEBELAS, SUKSES PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Capaian perbaikan tata kelola di Kemendag yaitu dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang memberikan legalitas atas makin akuntabelnya pengelolaan keuangan di Kemendag. Banyak penghargaan diterima Kementerian Perdagangan dan Menteri Perdagangan.

KEDUA BELAS, SUKSES LINDUNGI INDUSTRI DALAM NEGERI

Tahun 2024, Mendag Zulhas menatap optimis namun tetap waspada terhadap tantangan kedepan. Prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai organisasi internasional menunjukkan adanya perlambatan. Namun, kinerja perdagangan 2023 memberikan optimisme kedepan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 5,20% di 2024. Selain itu diprediksikan inflasi akan cukup terkendali dikisaran 1,5–3,5% sesuai target yang dicanangkan. Pemerintah akan berupaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekspor non migas sesuai target 2,5–6,4% walaupun tantangan harga komoditas dunia masih cukup landai. ■



SELAMAT DATANG
DR. (H.C.) H. ZULKIFLI HASAN, S
MENTERI PERDAGANGAN

DKI Jakarta



1

Sukses Pertahankan Inflasi

“Di tangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas pangan di dalam negeri dapat terjaga. Terbukti, selama tahun 2023, inflasi tercatat sebagai yang terendah dalam 20 tahun terakhir—dengan mengesampingkan masa pandemi Covid-19—yang tercatat sebesar 2,61 persen.”



U paya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjaga inflasi dilakukan dengan sangat cermat. Bersama tim Kemendag, Zulhas, begitu Mendag biasa disapa, mengintensifkan pemantauan ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok di 679 pasar, tersebar di 503 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.



1

Sukses
Pertahankan
Inflasi

Sebagai “Panglima” pasokan pangan di Indonesia, Zulhas menyadari inflasi rendah dan stabil menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi tinggi dan bergejolak bisa memengaruhi efek negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Zulhas paham betul, jika inflasi tidak terjaga maka pendapatan riil masyarakat akan ikut turun. Ini menyebabkan standar hidup masyarakat ikut turun. Bahayanya, semua orang ikut terdampak, terutama orang miskin bisa makin bertambah miskin.

Dalam dimensi yang lebih luas, inflasi yang tidak stabil juga bakal menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat begitu pentingnya menjaga inflasi, Zulhas pada suatu kesempatan di akhir tahun 2023 pernah bilang agar masyarakat jangan terlalu mengkhawatirkan terjadinya lonjakan harga-harga menjelang Natal dan tahun baru (Nataru). Pemerintah menjamin harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) terkendali sehingga inflasi tetap terjaga sesuai target.

Janji itu terbukti berhasil dipenuhi. Inflasi *year-on-year* (tahunan) tahun 2023 tercatat sebesar 2,61 persen, berada dalam kisaran target 3 ± 1 persen. Capaian ini merupakan prestasi yang boleh dibilang luar biasa, mengingat, di tahun itulah inflasi tercatat yang terendah selama 20 tahun (tidak memasukkan inflasi selama masa pandemi Covid-19).



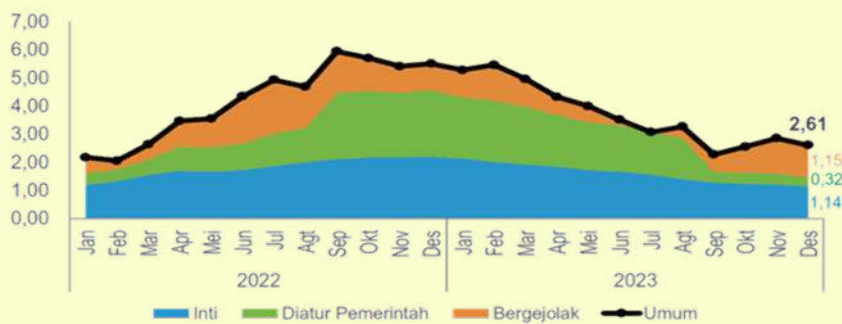
Tangan dingin Zulhas mengendalikan arus komoditas juga terlihat sepanjang tahun 2023 yang boleh dibilang stabil dan terkendali. Berkat kerja kolaboratifnya, pemerintah berhasil meredam tingkat inflasi, terutama di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Ambil contoh, saat Natal dan Tahun Baru, inflasi Desember 2023 tercatat 0,41 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi 2021 dan 2022. Secara tahunan, inflasi 2023 tercatat yang terendah selama 20 tahun, di luar periode pandemi.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dapat dilihat dari sumbangan inflasi barang, yang bergerak relatif setara dengan inflasi inti di kisaran 1,14—1,15 persen.



Grafik Andil Inflasi Berdasarkan Komponen (YoY, persen)



Sebagai Menteri Perdagangan, Zulhas berkomitmen menjaga amanat presiden yang memintanya menjaga inflasi. Tugas ini tergambar dalam program prioritas yang ketika pelantikannya diminta Presiden untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga minyak goreng. ■



1

Sukses
Pertahankan
Inflasi



Trik Zulhas Redam Inflasi



La, bagaimana Zulhas mengendalikan pasokan hingga inflasi bisa stabil? Kuncinya terletak pada caranya memimpin. Ia sering sekali terjun langsung ke lapangan memantau kondisi pasar. Ia sama sekali tidak sungkan berinteraksi dengan pedagang dan masyarakat secara langsung. Zulhas juga mampu mengorkestrasi timnya dengan sangat baik.

Secara periodik, Zulhas meminta timnya melakukan pemantauan harga dan pasokan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Karena pantauan insentif yang dilakukan mencapai 679 pasar, tersebar di 503 kabupaten/kota—dari ujung barat Pasar Kota Sabang Aceh hingga ujung timur Pasar Wamanggug di Papua—maka SP2KP sudah dapat menjadi cerminan kondisi harga riil di lapangan.

Apalagi, sepanjang tahun 2023, Zulhas bersama timnya turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadaan riil. Ia dan timnya telah mengunjungi lebih dari 60 pasar di seluruh Indonesia, atau rata-rata satu pasar dikunjungi setiap minggunya. Gambaran inilah yang kemudian dijadikan rujukan Zulhas dalam mengambil kebijakan soal pasokan. Karena itulah, Kemendag bisa memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terkendali ke daerah-daerah.

Tentu saja Kemendag tidak bisa bergerak sendiri menstabilkan pasokan komoditas penting di Indonesia. Meski kewenangan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok sudah didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional (BAPANAS) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Kemendag tetap berkomitmen selalu berperan aktif membantu dan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Bulog dan Pemda. Zulhas meminta jajarannya untuk aktif memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dalam upaya mengendalikan inflasi.

Hal ini termasuk sinergi dengan BAPANAS dan Bulog untuk mengakselerasi pendistribusian beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga

Pangan) dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai wilayah di Indonesia. Pelaksanaan SPHP beras di tingkat konsumen merupakan program kegiatan yang dilaksanakan BAPANAS sebagai kelanjutan dari program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium. KPSH/SPHP diluncurkan untuk mencegah dan mengantisipasi gejolak harga beras dengan menyalurkan beras sesuai HET ke pedagang eceran di pasar-pasar tradisional, ritel modern, dan tempat lainnya yang mudah dijangkau konsumen.

Secara masif, program GMP di bawah koordinasi BAPANAS dilakukan di 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota. Sementara itu, program serupa seperti Operasi Pasar Murah juga dilipatduakan pelaksanaannya. Harapannya agar masyarakat dapat mengakses barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya menghadapi kondisi kenaikan harga beras dan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Sementara Kemendag didukung BAPANAS, Bulog, dan Pemda, sepanjang tahun 2023, untuk program GMP dan penyaluran SPHP telah berkontribusi di 46 titik di wilayah Lampung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Selain BAPANAS, Zulhas juga meminta timnya untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong dilakukannya subsidi ongkos angkut dalam rangka distribusi barang kebutuhan pokok. Kesepakatan ini terutama dilakukan ketika ada komoditas yang panennya masih sporadis di sentra tertentu, misalnya bawang merah dan cabai.

**1****Sukses
Pertahankan
Inflasi**

Terhadap pasokan dan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang merah di seluruh wilayah, Kemendag terus mengupayakan peningkatan perdagangan antarwilayah. Cara yang ditempuh adalah melakukan mensinergikan kegiatan bersama Kementerian Pertanian dalam pengumpulan/berbagi data dan informasi sentra produksi komoditas hortikultura.

Hasil dari kolaborasi ini lalu digunakan sebagai bahan pendukung strategis Kemendag dalam meningkatkan kerja sama perdagangan antarwilayah untuk komoditas hortikultura. Dengan dukungan data dan informasi yang komprehensif, ke depan, perdagangan antarwilayah dapat tumbuh dan membantu pemerataan pasokan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah.

Khusus komoditas yang pemenuhannya berasal dari impor, Zulhas menekankan kepada timnya untuk dapat memberikan kepastian manajemen importasi yang tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan koordinasi yang dilakukan antarkementerian dan lembaga terkait.

Langkah strategis lain yang dilakukan Zulhas adalah memastikan kelancaran distribusi, terutama di hari-hari besar seperti saat terjadi pergerakan arus lalu lintas Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI, Zulhas menggerakkan timnya untuk melakukan sinergi demi memastikan kelancaran distribusi bapak.

Untuk itu, Zulhas memerintahkan jajarannya melakukan pemantauan dan pengawasan pasokan dan harga pangan kebutuhan pokok khususnya untuk komoditas beras, minyak goreng, dan gula kristal putih di sembilan provinsi yaitu Sumatra Utara, Banten, DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2023.

Namun, di sepanjang tahun 2023, selain pengawasan menjelang Nataru, pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur juga dilakukan di wilayah Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, ada 31 pelaku usaha dengan beragam temuan, di antaranya komoditas minyak goreng (12 pelanggaran), tujuh pelaku usaha komoditas beras (tidak ada pelanggaran), tujuh pelaku usaha komoditas daging sapi (satu pelanggaran), lima pelaku usaha komoditas bawang putih (tidak ada pelanggaran), dua komoditas gula kristal putih (tidak ada pelanggaran), dan satu pelaku usaha komoditas kedelai (satu pelanggaran).

Terhadap 14 pelaku usaha, yakni 12 komoditas minyak goreng, satu komoditas daging sapi, dan satu komoditas kedelai, yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif berupa surat teguran.

Sementara itu, pengawasan distribusi barang yang diatur dilakukan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan meliputi 12 pelaku usaha Gula Kristal Rafinasi (dua pelaku usaha melakukan pelanggaran) dan enam pelaku usaha Bahan Berbahaya (tiga pelaku usaha melakukan pelanggaran). Sedangkan kepada lima pelaku usaha (2 pelaku usaha GKR dan tiga pelaku usaha B2) yang melakukan pelanggaran telah diberikan sanksi administratif berupa surat teguran. ■



Terobosan di Jalur Maritim

Tak hanya itu, Zulhas juga mengintensifkan distribusi melalui program Gerai Maritim untuk wilayah Indonesia Timur, terutama kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program itu mencakup tol laut, subsidi angkutan perintis, dan tol udara. Program Gerai Maritim ini memiliki empat tujuan besar, yakni meningkatkan perdagangan antarpulau; meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah 3T; mengurangi biaya logistik barang; dan meningkatkan jangkauan distribusi produk unggulan daerah.



1

Sukses Pertahankan Inflasi

Keberadaan Gerai Maritim sangat besar. Terbukti, pendistribusian bapok melalui skema ini ke wilayah Indonesia Timur pada tahun 2023 mencapai 70.943,06 ton. Jumlah itu terdiri dari pendistribusian komoditas beras (36.544,06 ton), gula (13.674,63 ton), dan tepung terigu (7.958,65 ton). Pendistribusian tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan dan menurunkan harga bapok di wilayah Indonesia Timur, dengan rata-rata penurunan harga sebesar 13,36 persen.

Sedangkan trayek yang dilalui untuk wilayah Papua, yakni sebanyak tujuh trayek tol, yakni T9, T11, T19, T22, T23, T24 dan T27); 4 rute Jembatan Udara (Korwil Timika, Dekai, Tanah Merah, Oksibil), dan 5 rute Subsidi Angkutan Perintis (Nabire, Timika, Biak, Depare, Merauke).

Selama Natal dan Tahun Baru saja, sepanjang Oktober—Desember 2023 pendistribusian bapok melalui Program Gerai Maritim ke wilayah Indonesia Timur mencapai 18.482,65 ton. Jumlah komoditas yang terdistribusi ini mampu menurunkan harga bapok dengan rata-rata penurunan harga sebesar 12,48 persen.

Selama Nataru 2024, Zulhas mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar sejumlah komoditas pokok untuk dikecualikan dari pembatasan angkutan barang agar pasokan bapok bisa lancar, termasuk berkoordinasi agar ada prioritas bongkar muat di pelabuhan.

Beberapa jenis bapok yang diusulkan pengecualian pembatasannya adalah beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai/tahu/tempe, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang merah dan bawang putih, cabai, ikan segar, susu, pupuk, ternak, uang, air minum dalam kemasan (AMDK), serta barang ekspor dan impor.

Hal lebih penting lainnya yang dilakukan Kemendag adalah melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan. Ini adalah upaya pencegahan terjadinya spekulasi/penimbunan oleh oknum pelaku usaha, terutama menjelang dan selama Natal dan Tahun Baru.

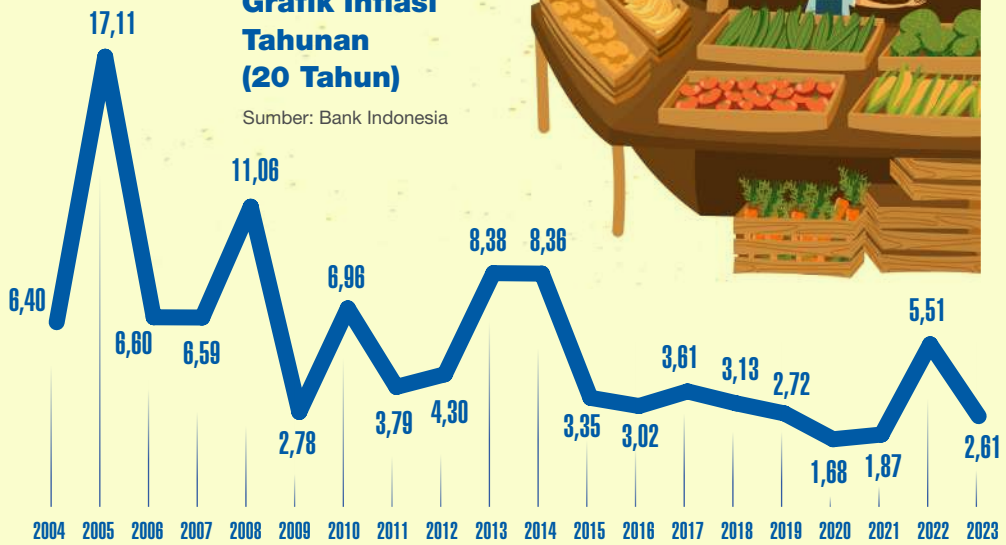


“Kata kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi. Dengan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, Pemerintah jamin harga dan pasokan bapok terkendali sehingga masyarakat dapat tersenyum,” ujar Mendag. ■



Grafik Inflasi Tahunan (20 Tahun)

Sumber: Bank Indonesia



Perkembangan Inflasi 2020-2023 (m-to-m, 2023)

Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)



Reviu Perdagangan 2023



Inflasi 2023 terendah
selama 20 tahun
terakhir (1999—2024)
di luar masa pandemi.

2,61% (2023)

Inflasi masih terkendali dan
dalam sasaran inflasi 2—4%.






Surplus perdagangan
43 bulan berturut-turut
sejak Mei 2020.

USD **33,63** miliar

Neraca perdagangan Indonesia
Januari—November 2023.

Negara penyumbang surplus neraca perdagangan

 India	USD12,17 miliar
 Amerika Serikat	USD10,86 miliar
 Filipina	USD8,85 miliar

USD miliar

51,64
Nonmigas

Surplus neraca
perdagangan
berasal dari
**surplus nonmigas
USD51,64 miliar
dan defisit migas
USD18,01 miliar.**

-18,01
Migas



UK-ASEAN Forum on Regional Industrial Integr



ASEAN
BUSINESS ADVISORY COUNCIL

UK-ASEAN
BUSINESS COUNCIL

BCG



2

Sukses Surplus Perdagangan

“Awan hitam membayangi ekonomi global. Turbulensinya menggetarkan sektor perdagangan di banyak negara. Di tengah situasi ini, Indonesia memutar banyak strategi untuk bisa bertahan. Di era Mendag Zulhas, terpaan angin perekonomian dunia berhasil ditepis dengan masih surplusnya neraca perdagangan nasional secara berturut-turut.”



S epertinya, tak ada waktu untuk duduk manis di belakang meja kerja. Mendag Zulhas sudah ditunggu banyak pekerjaan rumah yang tak bisa ditinggalkan, terutama dalam menggenjot pasar ekspor. Jika sampai lepas perhatian, kinerja perdagangan bisa terancam defisit. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Kinerja perdagangan membukukan tren surplus perdagangan.



2

Sukses Surplus Perdagangan



44 bulan

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia (selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020)



USD13,59 miliar

Nilai transaksi perdagangan tertinggi dengan India

Mendag Zulhas berhasil menggoreskan surplus perdagangan selama periode Januari-Desember 2023 sebesar USD36,93 miliar. Secara angka besaran surplus memang sedikit turun sebesar USD17,5 miliar dibandingkan surplus tahun lalu. Sejatinya kinerja ekspor Indonesia lebih tinggi dari impor. Neraca perdagangan Indonesia pun tetap bertengger dengan predikat surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Surplus perdagangan bulan Desember 2023 mencapai USD3,31 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan bulan November 2023 lalu yang mencatatkan surplus USD2,41 miliar. Surplus neraca perdagangan Indonesia periode Desember 2023 bersumber dari surplus nonmigas sebesar USD5,20 miliar. Sementara perdagangan migas mengalami defisit USD1,89 miliar. Capaian surplus bulan Desember ini menopang surplus perdagangan periode Januari-Desember 2023 menjadi sebesar USD36,93 miliar.

Selama periode Januari-Desember 2023, surplus tertinggi perdagangan Indonesia berasal dari transaksi perdagangan dengan India yang mencapai USD13,59 miliar, diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai USD11,98 miliar, dan Filipina senilai USD9,55 miliar.





Neraca Perdagangan Indonesia Bulanan Periode Tahun 2021 – 2023 (USD miliar)



Sumber: BPS (2023), diolah oleh Badan Kebijakan Perdagangan
Ket: * Angka Sementara



USD258,82
miliar

Nilai ekspor
(Januari – Desember 2023)

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari – Desember 2023 sebesar USD258,82 miliar, dengan nilai ekspor nonmigas sebesar USD242,90 miliar. Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas kita adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

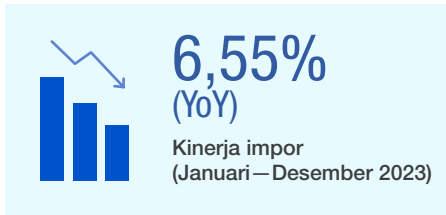


2 | Sukses Surplus Perdagangan

Kinerja Ekspor Bulanan, Januari 2021 – Desember 2023



Sumber: BPS (2023), diolah oleh Badan Kebijakan Perdagangan
Ket: * Angka Sementara



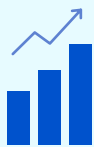
Kinerja impor secara kumulatif selama Januari—Desember 2023 mencapai USD221,89 miliar atau turun 6,55 persen (YoY). Nilai impor nonmigas Indonesia pada periode tersebut adalah sebesar USD186,06 miliar dengan tiga negara asal impor nonmigas utama adalah Tiongkok, Jepang dan Thailand.

Kinerja Impor Bulanan, Januari 2021 – Desember 2023



Sumber: BPS (2023), diolah oleh Badan Kebijakan Perdagangan
Ket: * Angka Sementara

Kontribusi Produk Halal



87%

Sumbangan produk halal terhadap neraca perdagangan nasional (Januari—Oktober 2023)

Ada kejutan terhadap sumbangan produk halal yang berhasil menyumbang 87% surplus neraca perdagangan nasional, sepanjang periode Januari—Oktober 2023. Total perdagangan produk halal Indonesia pada periode Januari—Oktober 2023 mencapai USD53,43 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor produk halal Indonesia tercatat sebesar USD42,33 miliar dan impor sebesar USD11,10 miliar. Terjadi penurunan nilai ekspor produk halal pada periode Januari—Oktober 2023 sebesar 18,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Namun demikian, terjadi kenaikan volume ekspor produk halal pada Januari—Oktober 2023 sebesar 8,10 persen sehingga sebetulnya kemampuan ekspor kita sepanjang ini baik-baik saja. Surplus perdagangan nasional Indonesia pada 2022 tercatat sebesar USD54,46 miliar. Sebesar 87 persen surplus perdagangan Indonesia disumbang oleh produk halal.

Kinerja ekspor per sektor pada periode Januari—Oktober 2023, sektor makanan olahan mencatatkan capaian nilai ekspor sebesar USD34,74 miliar, sektor farmasi sebesar USD546,03 juta, sektor kosmetik sebesar USD362,49 juta, dan sektor fesyen atau pakaian muslim sebesar USD6,68 miliar. Negara tujuan ekspor produk halal Indonesia Januari—Oktober 2023 di antaranya Tiongkok, Amerika Serikat, India, Pakistan, dan Malaysia.

Data ekspor produk halal menjadi salah satu indikator penting dalam membuat peringkat ekonomi syariah Indonesia di kancan global melalui laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE). Berbagai capaian ekspor produk halal Indonesia tidak lepas dari kolaborasi antar 14 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Pokja, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara/BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN, Kadin Indonesia, Indonesia Eximbank, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB satuan kerja Kementerian UKM. Bank Indonesia memiliki program Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di tiga wilayah (Jawa, Sumatra, dan Kawasan Timur Indonesia) sebagai wadah untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta menjawab tantangan terkait inklusi ekonomi dan keuangan syariah serta digitalisasi, termasuk percepatan Ekspor Produk Halal.

Pada tahun 2024, perhitungan ekspor produk halal akan terus dikembangkan dengan mengadopsi kode HS halal di sektor fesyen, tekstil, farmasi, dan kosmetik sesuai penahapan pemberlakuan sertifikasi halal produk melalui Pokja Kodifikasi Produk Halal KNEKS. Dengan adanya rumusan lengkap kode HS halal akan memudahkan negara sahabat menerapkan hal serupa, sehingga akan membantu perumusan kebijakan dan meningkatkan transaksi perdagangan antarnegara, utamanya negara-negara ASEAN dan OKI. ■



2

Sukses
Surplus
Perdagangan

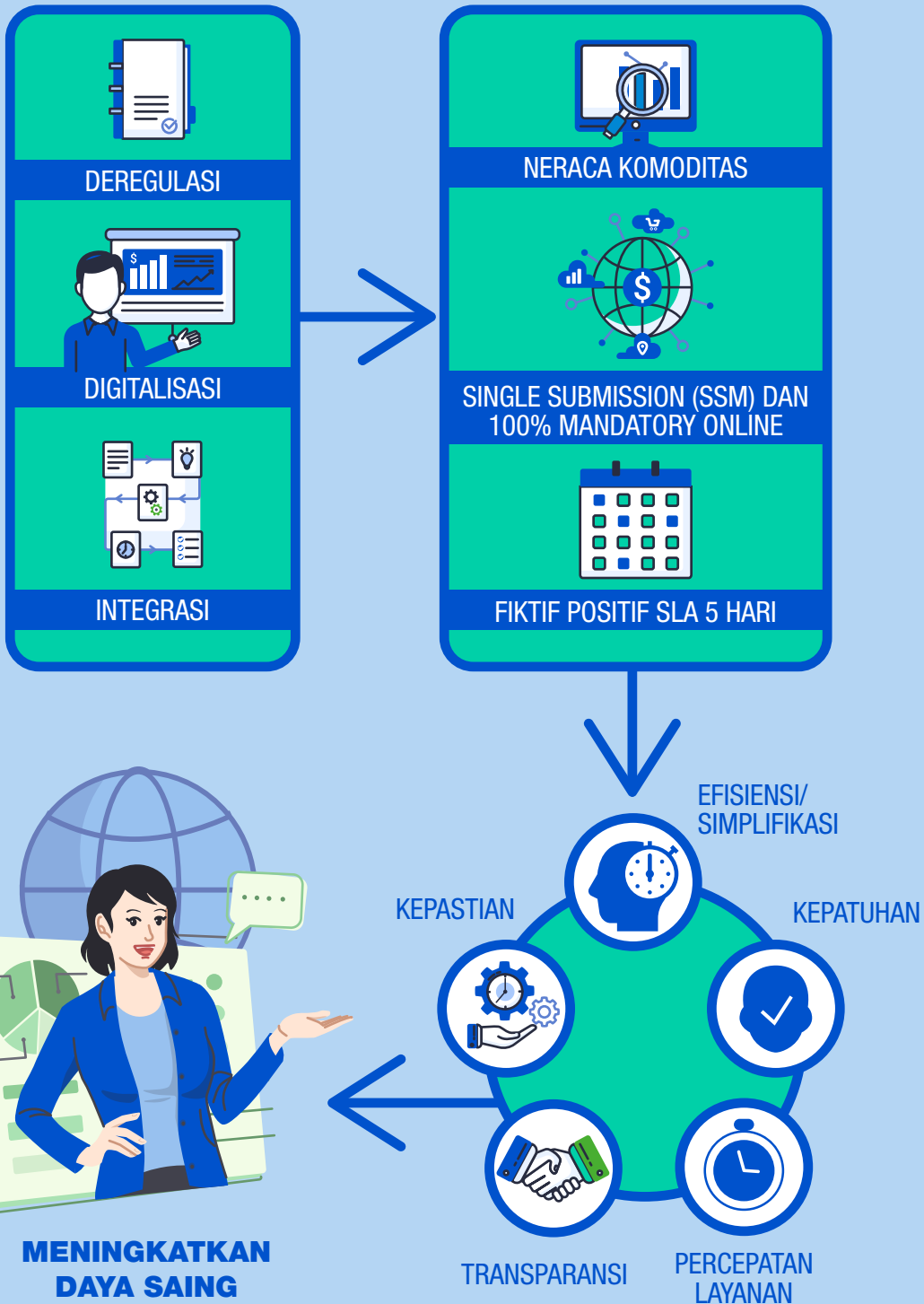
Transformasi Kebijakan



Surplus dalam neraca perdagangan merupakan hasil strategi perdagangan. Mendag Zulhas melahirkan kebijakan strategis melalui transformasi dan arah kebijakan perdagangan luar negeri. Sejumlah kebijakan diterbitkan agar tercipta kemudahan ekspor dan kepastian hukum. Dorongan kinerja ekspor dilakukan dengan menerbitkan dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor yaitu Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

PERUBAHAN MENDASAR DALAM PENGATURAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Transformasi dan Arah Kebijakan Perdagangan Luar Negeri





Revisi Permendag tersebut diharapkan dapat menjadi *booster* kinerja ekspor. Kedua Permendag tersebut disusun dengan semangat kepastian berusaha dan penyederhanaan pengurusan perizinan berusaha di bidang ekspor. Ke depan, kebijakan dan pengaturan ekspor akan terus dilakukan revidi dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi global. Permendag Nomor 22 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 berlaku mulai 19 Juli 2023. Permendag Nomor 22 Tahun 2023 mencabut Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sementara itu, Permendag Nomor 23 Tahun 2023 mencabut Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Perubahan yang terdapat pada kedua Permendag antara lain, penyesuaian kriteria teknis atas barang dilarang dan diatur ekspor pada produk pertambangan berupa timah, perpanjangan relaksasi ekspor luas penampang produk industri kehutanan/kayu serta relaksasi waktu ekspor beberapa konsentrat produk pertambangan, persyaratan perizinan berusaha beberapa

kelompok komoditas serta penambahan kolom penjelasan uraian barang pada beberapa barang, dan pemisahan kelompok barang.

Pada Permendag Nomor 22 Tahun 2023 termuat Ketentuan mengenai Barang yang Dilarang untuk Diekspor juga diberlakukan terhadap pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke luar Daerah Pabean; pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke luar Daerah Pabean; dan pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean. Ekportir yang melanggar ketentuan Barang yang Dilarang untuk Diekspor dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun barang yang dilarang untuk ekspor antara lain 19 kode HS Porang, 1 kode HS Beras, 10 kode HS Karet, 5 kode HS Rotan, 141 kode HS Kayu, 207 kode HS bidang pertambangan, 6 kode HS sisa dan skrap logam, 2 kode HS pupuk subsidi, dan 8 kode HS barang cagar budaya.

KERANGKA PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR

BIDANG PERTANIAN



Porang (19 Kode HS)



Beras (1 Kode HS)



Karet (10 Kode HS)

BIDANG PERTANIAN



Rotan (5 Kode HS)



Kayu (141 Kode HS)

BIDANG PERTAMBANGAN



(207 Kode HS)

SISA DAN SKRAP LOGAM



(6 Kode HS)

PUPIK SUBSIDI



(2 Kode HS)

BARANG CAGAR BUDAYA



(8 Kode HS)

Ketentuan mengenai **Barang yang Dilarang** untuk diekspor juga diberlakukan terhadap:

- pengeluaran barang dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke luar Daerah Pabean;
- pengeluaran barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke luar Daerah Pabean; dan
- pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean.



Eksportir yang melanggar ketentuan Barang yang Dilarang untuk Diekspor dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2 | Sukses Surplus Perdagangan

Permendag Nomor 23 Tahun 2023 juga mensyaratkan Surat Pernyataan Mandiri (Self Declaration) sebagai penambahan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat juga penyesuaian persyaratan terkait komoditas sarang burung walet. Sementara itu, Permendag Nomor 23 Tahun 2023 menghapus produk masker dari daftar barang yang dibatasi ekspor sehingga menjadi barang bebas ekspor. Perubahan lain adalah terdapat penyesuaian beberapa produk pertambangan dari mineral logam menjadi non-logam.



Rapat Koordinasi dengan Seluruh Instansi IPSKA

KERANGKA PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

TANAMAN PANGAN



Beras ketan, beras basmati, beras hom mali, beras malys, beras beraroma lainnya, beras setengah masak, beras lain-lain.

HEWAN & PRODUK HEWAN



Bibit dari sapi, kerbau, biri-biri, kuda, babi, kambing, ayam (DOC), bebek dan kelinci

INTAN KASAR



PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN



KEHUTANAN



Kertas dan pulp, furnitur kayu, kayu olahan, bangunan prefabrikasi, papan partikel, chipwood, veneer, plywood

IKAN



Arwana, ikan pari, sidat, ikan hiu, napoleon, ikan hias air tawar, kuda laut

TIMAH



BARANG TAMBANG UNTUK PENELITIAN & PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI



SISA & SKRAP LOGAM



TUMBUHAN ALAM & SATWA LIAR



Gaharu, ramin, coral, mamalia, aves, amphihi, buaya, molusca, flora, insekta, reptil, anthropoda

BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN



PREKUSOR NON FARMASI



SARANG BURUNG WALET



BAHAN BAKAR LAIN



BATUBARA



MINYAK & GAS BUMI



PRODUK BATUBARA





2

Sukses Surplus Perdagangan

Kebijakan sudah dibuat. Saatnya menyosialisasikan dengan cara turun langsung ke berbagai daerah dan berdiskusi dengan pelaku usaha. Mendag Zulhas juga berkesempatan membuka Rapat Koordinasi Kemendag dengan 97 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Semarang, Jawa Tengah. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana berbincang serius dengan Mendag Zulhas untuk memahami beleid terbaru ini.

Rakor diselenggarakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan semangat akselerasi peningkatan ekspor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi media koordinasi dan evaluasi pelayanan penerbitan SKA pada IPSKA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia serta diikuti sebanyak 300 orang peserta yang terdiri atas seluruh pejabat penandatanganan dan operator SKA pada IPSKA; pelaku ekspor dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jawa Tengah; serta perwakilan instansi terkait, baik pemerintah pusat dan daerah.



Mendag memberikan Penghargaan IPSKA Terbaik 2023

Selain membuka rakor, Mendag Zulkifli Hasan juga memberikan penghargaan kepada empat IPSKA. Penghargaan tersebut diserahkan kepada IPSKA Provinsi Jawa Timur untuk kategori kinerja penerbitan, IPSKA Provinsi Maluku untuk kategori tertib administrasi penerbitan SKA, IPSKA Kabupaten Bontang untuk kategori pelayanan SKA, serta IPSKA Provinsi Jawa Tengah untuk kategori kepatuhan penerbitan SKA.

Strategi teknis dibuat dengan memberikan stimulus bagi pelaku usaha dan eksportir untuk kemudahan ekspor, Kemendag telah melakukan **penghapusan biaya pembelian Formulir SKA yang semula Rp25.000/formulir** menjadi tidak berbayar sesuai dengan Permendag Nomor 34 Tahun 2023. Penghapusan PNBP SKA ini, diharapkan dapat meningkatkan kepastian berusaha serta berkurangnya waktu, biaya dan alur proses penerbitan SKA.

Penghapusan biaya penerbitan SKA menjadi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Penghapusan biaya tersebut merupakan keniscayaan untuk dilakukan karena penerbitan SKA tidak termasuk Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk menyesuaikan mekanisme penerbitan Formulir SKA yang tidak melalui proses pembayaran, Kementerian Perdagangan melakukan perubahan keempat atas Permendag 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia melalui penerbitan Permendag Nomor 34 Tahun 2023. Dengan penghapusan PNBP SKA ini, diharapkan dapat meningkatkan kepastian berusaha serta berkurangnya waktu, biaya dan alur proses penerbitan SKA. Efisiensi ini dapat menciptakan stimulus bagi ekspor Indonesia.

Mendag Zulhas berkomitmen membangun tata kelola impor barang konsumsi dan produk jadi yang adil dan sehat agar industri dalam negeri tidak bersinggungan dengan industri sejenis dan UMKM. Komitmen ini

diwujudkan dengan menerbitkan **Permendag Nomor 36 Tahun 2023** tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang mulai berlaku pada 10 Maret 2024.

Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini disusun setelah mendapatkan instruksi Presiden Joko Widodo untuk pengetatan impor barang konsumsi dan produk jadi. Sebab, terjadi persinggungan industri sejenis di dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. Aturan ini juga dimaksudkan memberikan relaksasi impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyusunan Permendag Nomor 39 Tahun 2023 juga mengakomodasi usulan lartas impor barang dari kementerian/lembaga pembina sektor. Pokok pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 di antaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari *post-border* ke *border* dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produksen status *Authorized Economic Operator* dan mitra utama kepabeanan.

“Permendag ini bertujuan untuk menata kembali kebijakan impor, yang semula pengawasan impor **dari post-border menjadi ke border**, serta relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman **Pekerja Migran Indonesia**,” tegas **Mendag Zulhas**.

Komoditas yang pengawasannya impornya dikembalikan dari *post-border* ke *border* antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta kosmetik dan obat tradisional dengan tujuan untuk menertibkan impor barang. Barang kiriman PMI yang dimaksud merupakan barang milik



pribadi PMI dan untuk keluarganya, bukan barang yang sifatnya komersial untuk diperdagangkan kepada orang lain. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pengiriman barang-barang milik PMI dan diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai maksimal USD1.500 per tahun.

Kerangka Permendag 36 Tahun 2023

1

Arahan presiden untuk Pengetatan Impor Barang Konsumsi



- Perubahan lartas impor semula hanya LS menjadi tetap LS atau PI dan LS untuk 6 (enam) kelompok produk tertentu
- Peraturan lartas baru untuk komoditas dengan PI dan LS
- Perubahan pengawasan impor dari semula *post border* menjadi border untuk kelompok barang konsumsi

2

Arahan presiden Relaksasi Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)



Pengaturan batasan kelompok barang, kondisi barang baru/tidak baru dan jumlah barang untuk sepuluh kelompok barang yang dapat diimpor sebagai barang kiriman PMI baik yang tercatat maupun tidak tercatat di BP2MI

3

Usulan Perubahan (Penambahan/Pengurangan/Pergeseran) Lartas Impor Barang dari K/L Pembina Sektor Terkait dan/atau Asosiasi Pelaku Usaha Terkait



Usulan perubahan (Penambahan/Pengurangan/Pergeseran) lartas impor barang dari K/L pembina sektor terkait untuk sembilan kelompok barang

4

Penyesuaian Pengaturan Batang Tubuh Peraturan Menteri Perdagangan



- Perubahan jenis NIB sebagai API
- Validasi lartas (IP/IT/PI) dengan PIB
- Pembatalan permohonan IP/IT/PI atau Surat Keterangan
- Perubahan LS
- Pengaturan Impor ke TPB, KPBPB dan KEK
- Pengecualian Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha dan Tidak Untuk Kegiatan Usaha
- PI dan Surat Keterangan Barang Komplementer, Tes Pasar atau Purna Jual

Sumber: BPS (2023), diolah oleh Badan Kebijakan Perdagangan
Ket: * Angka Sementara



Sosialisasi
Permendag
Nomor 36
Tahun 2023
tentang
Kebijakan dan
Pengaturan
Impor



3

Sukses Implementasi Kebijakan Pro-Rakyat

“Sikapnya yang terasah sebagai pengusaha mandiri sejak membangun bisnis dari bawah, ditambah empati dan keberpihakannya pada masyarakat kecil membawa setiap kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selalu pro-rakyat.”

Zulkifli Hasan lahir dari keluarga petani pedesaan. Latar belakang inilah yang kemudian membentuk sikap empatinya kepada masyarakat kecil. Apalagi, rekam jejak Zulhas dalam membangun bisnis dari bawah membawanya pada rasa kepekaan yang tinggi kepada masyarakat terpinggirkan.



3

Sukses Implementasi Kebijakan Pro-Rakyat



Tak hanya itu, pria kelahiran Lampung, 17 Mei 1962, ini telah lama dikenal dengan julukan “politisi pro-pedagang sejati”. Maklum, prinsip utama yang dipegang Zulhas sebagai politisi adalah memberdayakan inklusivitas dan tata kelola yang berpusat pada rakyat.

Boleh jadi, inilah alasan utama Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Perdagangan karena tidak semata memperhitungkan rekam jeaknya yang kuat sebagai pengusaha, tetapi juga karena keakrabannya dengan operasional lapangan.

Terbukti, setelah menjabat Menteri Perdagangan sejak 15 Juni 2022, Zulhas mampu membuktikan kepiawaiannya membawa kinerja Kementerian Perdagangan moncer. Keberpihakan Zulhas kepada rakyat kecil terlihat dari bagaimana ia mengeluarkan kebijakan yang memajukan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan konsumen.

Masalah utama yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usaha adalah persoalan akses legalitas, akses pemasaran, dan akses pembiayaan. Di luar itu, masalah lain yang tak kalah seriusnya adalah jaminan pasokan dengan harga kompetitif dan pendampingan usaha.

Padahal, kehadiran UMKM sangat vital dalam struktur ekonomi Indonesia. Jumlah toko dan warung tradisional/kelontong yang menjadi bagian UMKM di Indonesia mencapai 3,94 juta dari 3,98 juta ritel atau 98,78 persen ritel di Indonesia. (Euromonitor, 2022).

Data ini jelas membuktikan, kekuatan ekonomi rakyat paling riil berada di warung kelontong/tradisional. Mereka juga berperan strategis dalam mendorong konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi terbesar lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Program 1000 Warung

Menyadari hal ini, Zulhas meluncurkan program 1.000 warung, yang membantu UMKM menjangkau berbagai akses yang diperlukan itu. Apa yang digagas Zulhas tidak hanya memfasilitasi warung yang ada di lingkungan masyarakat, tetapi juga koperasi atau toko di lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah dan perguruan tinggi.



3

Sukses Implementasi Kebijakan Pro-Rakyat

Sepanjang tahun 2023, Kemendag telah berhasil memfasilitasi pertemuan 1.000 pemilik toko/warung tradisional di wilayah Lampung, Serang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Surabaya dengan para pemasok modern dan perbankan melalui skema KUR supermikro.

Bagi Zulhas, program 1.000 warung penting untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Sebab, sebuah warung, dalam pandangan Zulhas mampu “mengajarkan” seseorang bagaimana caranya berdagang dan menghitung untuk rugi sebagai dasar jiwa kewirausahaan.

Jadi, program 1.000 warung diharapkan dapat menjadi pemicu masyarakat untuk berusaha.

Dalam aspek yang lebih luas, Zulhas meyakini program pengembangan UMKM seperti ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakat dan UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan perekonomian yang adil dan sehat sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan.

Agar pengembangan UMKM ini dapat berjalan, Zulhas membuka pelatihan bagi pengusaha kecil. Fokus pelatihan pada *soft skill* pelaku UMKM. Seperti, memberikan pengetahuan tentang membuat kemasan menarik, menyusun strategi promosi, serta bimbingan lainnya yang berhubungan langsung dengan peningkatan daya saing produk.

Sebagai realisasi membuka akses yang lebih luas, Zulhas menghubungkan jaringan antara UMKM dengan distributor atau retail modern melalui program kemitraan dan kerja sama pasokan. Dengan fasilitas ini UMKM bakal mendapat barang dagangan dengan harga bersaing.

Kemitraan antara pemasok barang dengan warung dilakukan melalui dua pola. **Pertama**, modernisasi warung, dengan membangun warung modern yang lebih bersih, tertata dan rapi dalam penyajian, pelayanan serta pengelolaan keuangannya.

Pembangunan warung modern ini bisa di tempat usaha yang kosong, misalnya garasi rumah, atau dari renovasi warung tradisional yang sudah ada.

Kedua, digitalisasi pemenuhan pasokan barang dengan penggunaan aplikasi berbasis digital dalam pengelolaan pasokan barang. Kemitraan yang sudah terkoneksi dengan warung tradisional itu antara lain Indogrosir (afiliasi Indomaret Group), Aksesmu (afiliasi Alfamart Group), Dagangan dan Lotte Grosir.

Masing-masing grosir memiliki skema kerja sama yang berbeda. Misalnya, Indogrosir dan Lotte Grosir, berbentuk toko grosir yang menyediakan paket modernisasi warung. Sedangkan Aksesmu dan Dagangan berbasis aplikasi mendukung program kemitraan warung melalui pola digitalisasi pemenuhan pasokan barang. ■



Gercep Stabilkan Migor

Kebijakan pro-rakyat yang paling dapat dirasakan adalah ketika Zulhas dengan cepat mampu mengendalikan harga minyak goreng (migor) yang sempat berjerolak sangat tinggi. Buka cuma itu, migor juga mengalami kelangkaan di pasar.



3

Sukses
Implementasi
Kebijakan Pro-Rakyat

21
hari



Sejak resmi bertugas
menjadi Mendag,
MINYAKITA diluncurkan
pada 6 Juli 2022

Rp14.000

Harga Eceran Tertinggi
(HET) MINYAKITA



34
propinsi

MINYAKITA tersedia
di 34 provinsi



Salah satu tugas utama Zulhas ketika ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan adalah menstabilkan harga migor dan menjaga pasokan. Tugas ini dapat dicapai Zulhas. Hanya 21 hari sejak resmi bertugas di Ridwan Rais (Kantor Pusat Kemendag), migor kemasan rakyat, merek MINYAKITA yang diluncurkan pada 6 Juli 2022, mampu dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di angka Rp14.000/liter.

Dalam 100 hari kerjanya sebagai Mendag, MINYAKITA sudah tersedia di 34 provinsi, termasuk NTT, Papua Barat, dan Papua, dengan HET yakni Rp14.000/liter. Sepanjang 2023, program MINYAKITA telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jumlah sebanyak 3,26 juta ton. Adapun komposisi migor yang telah disalurkan, yakni minyak curah 64 persen sedangkan MINYAKITA 36 persen.

Langkah gesit Zulhas tentu tidak bisa dijalankan tanpa aturan yang memadai. Ia lalu mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Dalam SE tersebut, MINYAKITA dilarang untuk dijual secara *bundling*. Penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme *bundling* dengan produk lainnya.

Dalam SE itu juga tertulis agar pedagang mematuhi harga *Domestic Price Obligation* (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET). Aturan lainnya, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan MINYAKITA.

“Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini,” tegas Zulhas. ■



Berangus Pakaian Bekas Impor

Zulhas juga mendengarkan keluhan dari industri pakaian dan pedagang UMKM yang terancam dengan maraknya perdagangan pakaian, sepatu, dan tas bekas impor. Padahal, sejak tahun 2015, barang-barang ini sudah dilarang masuk ke Indonesia. Keluhan ini lalu respons Zulhas dengan memerintahkan jajarannya menindak tegas tindakan ilegal itu. Kementerian Perdagangan pada tahun 2023 menyita dan memusnahkan pakaian dan sepatu bekas impor, senilai Rp174,81 miliar.



3

Sukses Implementasi Kebijakan Pro-Rakyat

Barang-barang bekas ini jelas mengancam kesehatan dan industri dalam negeri, terutama UMKM. Tindakan tegas pemusnahan ini juga dilakukan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebanyak 7.363 bal, senilai Rp80 miliar. Ada juga pemusnahan lainnya di Sidoarjo, Jawa Timur sebanyak 824 bal pada 20 Maret 2023; serta di Pekanbaru, Riau sebanyak 730 bal senilai Rp10 miliar pada 17 Maret 2023.

Arahan presiden sangat tegas: agar industri dalam negeri dan UMKM dijaga dan harus dilindungi dari serbuan pakaian bekas, alas kaki, dan tas bekas asal impor. Zulhas meminta jajarannya secara rutin memantau dan mengawasi peredaran pakaian bekas ini dan melakukan penegakan hukum dengan memusnahkannya. Tindakan pemusnahan ini sesuai ketentuan Permendag Nomor 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Zulhas menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas masuk dalam barang yang dilarang untuk diimpor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Artinya, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali dalam hal tertentu dengan sejumlah syarat, seperti barang modal yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

Pelaku usaha yang terbukti mengimpor baju bekas ke Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Jeratan lain bagi pelanggar adalah Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Selain sanksi pidana, terhadap barang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemusnahan barang berdasarkan Pasal 41 Permendag Nomor 36 Tahun 2018.

Penyitaan barang dan penghangusan barang ilegal ini juga bagian dari aksi memenuhi tuntutan asosiasi yang mengeluh keberadaan barang ilegal. Barang impor ilegal ini sangat mengganggu kelangsungan hidup UMKM.

Data KemenkopUKM menyebut, impor pakaian bekas sudah menguasai 31 persen pasar UMKM. Untuk itu, Zulhas tegas mengatakan impor pakaian bekas harus ditertibkan.

Selain penegakan hukum, langkah edukasi dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan. Zulhas berharap konsumen lebih mengutamakan beli pakaian baru hasil industri dalam negeri UMKM. Produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren. Tingginya penggunaan produk dalam negeri juga bisa menekan peredaran pakaian bekas. ■



Ciptakan Ekosistem Sehat *E-Commerce*

Demi mendorong perdagangan dan ekosistem *E-Commerce* adil, sehat, dan bermanfaat, Mendagri Zulhas mengeluarkan positif list Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).



3

Sukses Implementasi Kebijakan Pro-Rakyat



Keputusan yang ditetapkan pada 19 Desember 2023 itu adalah “Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 1998 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Jadi Asal Luar Negeri dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung Melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara”.

Kemendag tentang *positive list* ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang mengamankan penyusunan Kemendag tentang barang jadi dengan harga di bawah USD100 per unit yang boleh diperdagangkan.

Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dimaksudkan untuk mendukung pem-berdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam negeri.

Lahirnya revisi Permendag 31 Tahun 2023 antara lain karena adanya indikasi perdagangan tidak sehat oleh pelaku usaha asing dan masih lemahnya daya saing UMKM dan produk dalam negeri. Standardisasi barang di platform PMSE dan persaingan yang setara dalam ekosistem PMSE juga masih belum terwujud. Selain itu, muncul model bisnis baru yang berpotensi mengganggu ekosistem PMSE masih terlihat.



Barang-barang yang masuk dalam kriteria diperbolehkan langsung masuk melalui *E-Commerce* cross border adalah barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri; barang yang tidak melekat dengan kekayaan intelektual Indonesia termasuk indikasi geografis;

Kemudian, barang yang tidak atau belum dapat dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta barang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk menyebarkan pengetahuan, menginspirasi kreativitas, dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.

Jenis barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah USD100 per unit yang masuk dalam *positive list* merupakan masukan dari kementerian dan lembaga terkait. Jenis-jenis barang jadi tersebut diklasifikasikan berdasarkan delapan digit pos tarif HS Code

pada empat jenis produk, yaitu buku, film, perangkat lunak, dan musik.

Jenis barang jadi dalam *positive list* dapat berubah melalui proses evaluasi setiap enam bulan sekali. Jenis barang jadi juga bisa berubah bila ada perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang diajukan melalui kementerian atau lembaga terkait.

Perubahan dalam *positive list* harus ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan.

Yang jelas, Zulhas menegaskan, jajarannya akan menjalankan pengawasan terpadu secara berkala dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memastikan implementasi *positive list* berjalan efektif dan tidak menghambat pelaku usaha. ■



4

Sukses Stabilisasi Harga Migor

“Usai dilantik, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bergerak cepat menstabilkan harga minyak yang sempat bergejolak tinggi. Tak butuh waktu lama, lewat terobosan kebijakan dan koordinasi internal maupun antarinstansi yang kuat, harga migor dapat dikendalikan, bahkan menjadi penyumbang utama deflasi sepanjang tahun 2023.”



Begitu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan bergerak cepat. Tugas prioritas yang diamanatkan kepadanya adalah memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri dengan harga terjangkau. Ia juga diperintahkan menstabilkan harga minyak goreng yang ketika itu melambung tinggi.





4

Sukses Stabilisasi Harga Migor

Kecekatan Zulhas, begitu sapaan akrab Mendag Zulkifli Hasan, yang dibaur dengan kekuatan kolaborasi tim menjadikan harga minyak goreng bisa dikendalikan. Indikasinya, di sepanjang tahun 2023, ada empat komoditas utama yang menyumbang deflasi, yakni minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.

Mendag dengan komitmen tinggi sanggup memenuhi amanat Presiden yang memintanya agar pasokan dan kestabilan harga minyak goreng (migor) bisa dijaga. Semua tahu, harga migor kemasan dan curah pada periode 2021—2023 mengalami lonjakan dan mencapai harga tertinggi pada April 2022. Kondisi ini membuat ekonomi masyarakat tertekan.

Kombinasi kebijakan yang dilakukan Zulhas bersama instansi terkait sanggup menurunkan harga migor, dan relatif stabil hingga akhir tahun 2023.

Usai resmi menjabat sebagai Mendag pada 15 Juni 2022, Zulhas dihadapkan publik langsung menyatakan tekadnya mengatasi masalah minyak goreng, baik memastikan pasokan migor maupun harga yang terjaga. Zulhas juga menjamin kecukupan pasokan migor ke pasar-pasar rakyat dan ritel-ritel modern di seluruh Indonesia.

Tentu saja kerja ini tidak bisa diselesaikan Kemendag sendiri, melainkan harus melibatkan kementerian/lembaga, produsen dan instansi lainnya. Zulhas melalui kewenangannya melakukan intervensi kebijakan di hulu hingga hilir serta program Minyak Goreng Rakyat (MINYAKITA). Kombinasi kebijakan yang dilakukan Zulhas bersama instansi terkait sanggup menurunkan harga migor, dan relatif stabil hingga akhir tahun 2023.

Jika diambil potret pada awal tahun 2023, yakni di Januari 2023, HET migor di tingkat konsumen ditetapkan Rp14.000/liter untuk kemasan MINYAKITA, dan Rp15.500/kg untuk minyak goreng curah, tergambar bahwa data yang tercatat pada 27 Januari 2023, rata-rata harga eceran migor curah sebesar Rp14.700/liter, naik 3,52 persen. Sementara migor kemasan merek MINYAKITA Rp14.700/liter, naik 5 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2022.

Sedangkan harga rata-rata minyak goreng curah, kemasan, dan MINYAKITA pada Desember 2023 meningkat dari harga November 2023. Harga minyak goreng curah naik 0,44% dari Rp14.447/lt menjadi Rp14.510/lt. Harga minyak goreng kemasan naik 0,04% menjadi Rp20.638/lt, dan harga MINYAKITA naik 0,09% menjadi Rp15.078/lt.

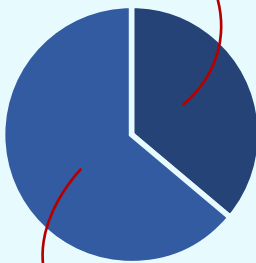
Berdasarkan data SP2KP, harga rata-rata MINYAKITA secara nasional selama tahun 2023 sebesar Rp15.024, dengan sebaran harga tertinggi sebesar Rp20.000 dan harga terendah Rp13.000.

3,26
juta ton

Sejak resmi bertugas
menjadi Mendag,
MINYAKITA diluncurkan
pada 6 Juli 2022

36%

MINYAKITA



64%

Minyak
goreng curah



Terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), menjelang puasa dan lebaran tahun 2023, Mendag mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran pada 6 Agustus 2023, dengan tiga butir pedoman yang harus ditaati produsen, distributor, hingga pengecer.

Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga *Domestic Price Obligation (DPO)* dan HET. *Kedua*, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya. *Ketiga*, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan MINYAKITA.

Untuk menjaga stabilitas, Zulhas juga menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring (*online*). Penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan MINYAKITA difokuskan ke pasar rakyat.

Saat menjelang puasa dan Lebaran tahun 2023 itu, Kementerian Perdagangan memerintahkan penambahan pasokan kebutuhan dalam negeri *Domestic Market Obligation (DMO)* minyak goreng rakyat, baik dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng MINYAKITA. Dalam kebijakan itu, peningkatan jumlah pasokan minyak goreng DMO 50 persen lebih banyak per bulannya menjadi 450 ribu ton per bulan. Hasilnya, peningkatan target realiasi DMO pada bulan Februari—April 2023 mampu menjaga stabilisasi harga minyak goreng selama hari besar keagamaan, Puasa—Idulfitri 2023.

Sepanjang tahun 2023, program MINYAKITA telah berhasil menyalurkan migor untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 3,26 juta ton, dengan rata-rata komposisi minyak goreng curah 64 persen dan MINYAKITA 36 persen. Jumlah penyaluran secara keseluruhan telah mencapai 80 persen dari target yang dicanangkan.

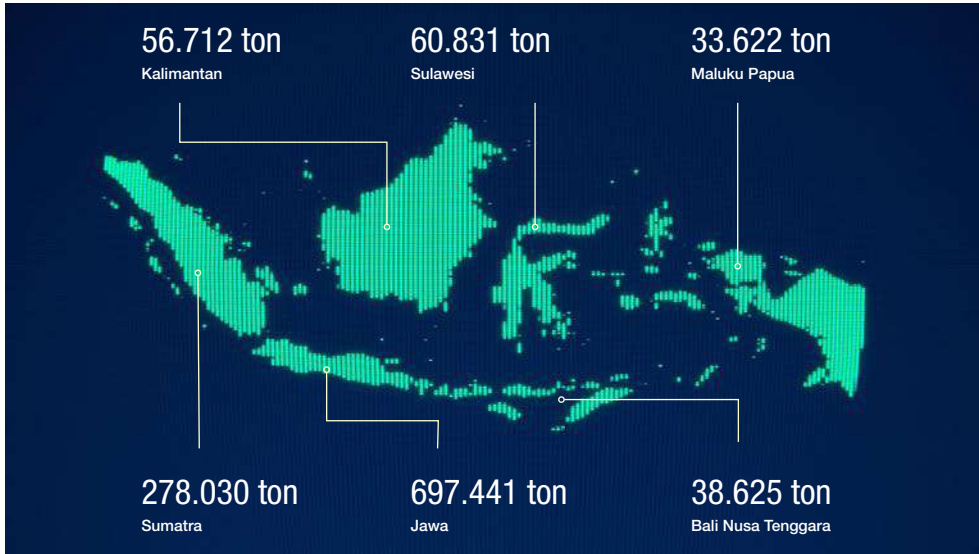
Khusus untuk MINYAKITA, sebagai merek kemasan Kemendag, sepanjang tahun 2023 berhasil disalurkan ke 34 provinsi dengan total sebanyak 1,16 juta ton.



4

Sukses Stabilisasi Harga Migor

Sebaran Distribusi MINYAKITA 2023



Sumber: SIMIRAH v2, diolah Ditjen PDN Kemendag

Stabilisasi harga migor dan kebutuhan pokok yang dapat dicapai oleh Kementerian Perdagangan sepanjang 2023 terbukti bisa ikut meredam laju inflasi di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya inflasi negara-negara di dunia.

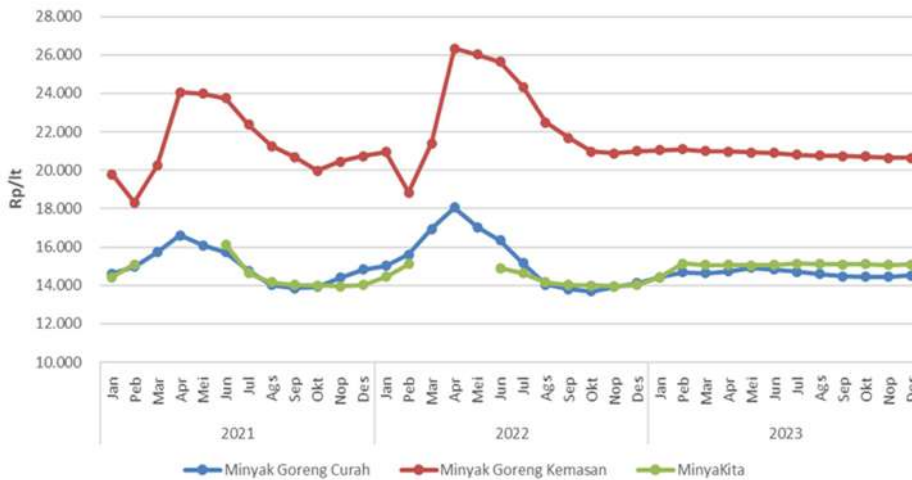
Gejolak harga migor yang relatif landai itu dapat dilihat dari data inflasi bulanan migor yang hanya terjadi dua kali inflasi rendah, di bawah 0,5 persen. Selebihnya, di sepanjang tahun 2023, migor justru mengalami deflasi.

Sebaran Distribusi MINYAKITA 2023



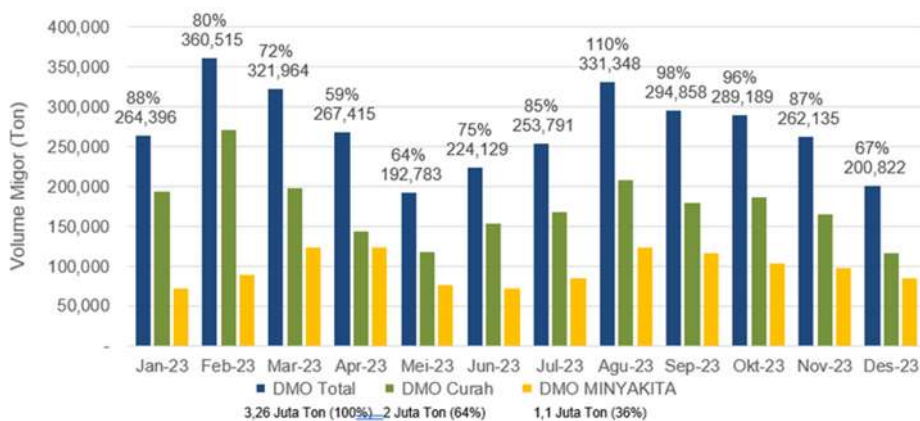
Sumber: Ditjen PDN (2023), diolah

Perkembangan Harga Minyak Goreng Tahun 2021-2023



Sumber: SP2KP (2023), diolah Badan Kebijakan Perdagangan

Realisasi Distribusi DMO Minyak Goreng Rakyat Tahun 2023

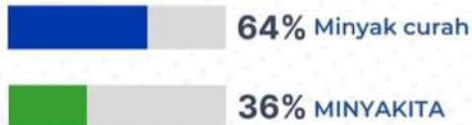


Program Minyak Goreng Rakyat

Program ini merupakan salah satu amanat Presiden Joko Widodo, yaitu menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng.



Program Minyak Goreng Rakyat telah **menyalurkan minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 3,26 juta ton.**



MINYAKITA disalurkan **1,16 juta ton.**

Penyaluran MINYAKITA mencapai **80%** dari target.



“Upaya stabilisasi harga minyak goreng dan bapak lainnya sepanjang tahun 2023 turut berkontribusi meredam laju inflasi di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya tingkat inflasi negara-negara di dunia.”







5

Sukses Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

“Situasi Pandemi mengantarkan perekonomian dunia mandeg. Usai pandemi, semua negara mulai melakukan pemulihan dan rehabilitasi ekonominya masing-masing. Di era Mendag Zulhas, tren pemulihan ekonomi Indonesia masih terus berlangsung.”



Sejak ditunjuk dan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan, Zulhas langsung tancap gas. Targetnya adalah berlari memanfaatkan momentum tren pemulihan ekonomi. Gegar perdagangan dalam negeri diatasi dengan segera. Selanjutnya, konsentrasi menggerakkan perdagangan luar negeri. Dengan kerja sama tim dan kolaborasi yang solid, Indonesia berhasil melanjutkan tren pemulihan ekonomi pada 2023. Momentum pemulihan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi negara mitra seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Singapura serta menurunnya harga komoditas utama ekspor batubara, nikel dan CPO, tetap berhasil dicapai.





5

Sukses
Menjaga Momentum
Pemulihan Ekonomi



Mendag Zulhas bergegas mempercepat kinerja ekspor untuk memulihkan kinerja perdagangan. Perwakilan perdagangan di seluruh dunia dikumpulkan dalam rapat kerja kementerian. Semua diberi arahan dan kebebasan berinovasi untuk menggenjot ekspor nasional. Tak hanya pelaku usaha besar, pelaku UMKM pun mulai digerakkan. Eksportir UMKM difasilitasi dan dibina secara serius dan dikawal hingga sampai bisa memenuhi permintaan berbagai negara di dunia.

Tak hanya itu, setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Mendag Zulhas membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1900 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Ekspor Nonmigas.

Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi 12 negara yang berpotensi menjadi negara tujuan ekspor yakni Tiongkok, India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Chili, Filipina, Brazil, Meksiko, Belanda, Korea Selatan, Vietnam, dan Kenya. Beberapa negara membutuhkan *extraordinary strategy* untuk dapat dilakukan kerja sama bilateral antarnegara dan tidak dapat mengandalkan preferensi hasil perundingan perdagangan karena memiliki keunikan kebijakan masing-masing. Beberapa negara yaitu Tiongkok, India, Brasil, dan Arab Saudi.

Produk yang telah diidentifikasi adalah karet dan produk karet, produk kimia, logam mulia dan perhiasan, sarang walet, elektronik,

makanan olahan, bungkil pakan ternak, alas kaki, kopi dan olahan kopi, rempah dan rempah olahan, *furniture*, kapal laut, otomotif, mainan, mesin-mesin, tekstil dan produk tekstil, kertas, *pulp*, ikan dan ikan olahan, margarin, kakao dan kakao olahan, semen, kelapa dan kelapa olahannya, sepeda dan bagiannya, bahan bahan nabati, serta kulit dan produk kulit.

Pemilihan negara dan produk prioritas ini telah memperhatikan arahan Presiden pada Rapat Internal Presiden tanggal 11 Januari 2023 dan ketersediaan Perwakilan Perdagangan di negara tujuan dan memperhatikan produk yang masuk dalam RIPIN 2015—2035 serta ketersediaan produk dalam negeri. ■



Ekspor Produk UMKM



Di awal tahun 2023, pelepasan ekspor perdana produk UMKM berupa 22 produk makanan olahan merek Helda's Snack segera dilakukan. Makanan yang diproduksi PT Safeline Indonesia ini dikirim ke Jeddah, Arab Saudi senilai USD453 ribu. Produk yang diekspor antara lain jengkol pedas, seblak daun jeruk, seblak pedas, rengginang original, rengginang gurih, tempe goreng, tempe daun jeruk, stik balado, kacang bandung, kacang bali, kacang kepri bali, kacang bali asin, kacang sukro manis, oven atom, kacang medan, kacang sukro, emping, kacang pedas, bawang putih goreng gurih, bawang merah goreng, dan popcorn karamel. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena 22 produk yang diekspor hari ini juga sudah terdaftar di Saudi Food and Drug Authority.



5

Sukses Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Banyak aspek yang dibenahi antara lain peningkatan kualitas dan mutu produk, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). “UMKM yang berhasil ekspor pada hari ini adalah UMKM yang telah melalui beberapa tahapan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ekspor dapat dilakukan siapa pun termasuk UMKM,” tegas Mendag Zulhas.

Jurus kolaborasi lagi-lagi menjadi andalan. Untuk mengeksport makanan ringan dan sangat khas Indonesia ini, Kemendag menggandeng PT Pos Indonesia Persero, PT Pos Logistik Indonesia, dan Yayasan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Yayasan BIG Indonesia merupakan yayasan yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memberdayakan masyarakat usia muda dalam wirausaha, sosial dan pendidikan, termasuk pengembangan UMKM untuk memasuki ritel modern dan pasar ekspor.

Sejak 2006, Helda's Snack sudah mengeksport produknya ke Kanada, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat. Arab Saudi merupakan salah satu negara penting bagi Indonesia dalam membuka akses pasar baru di negara nontradisional khususnya kawasan Timur Tengah. Produk makanan olahan merupakan komoditas primadona ekspor Indonesia, tak terkecuali di Arab Saudi. Nilai ekspor Indonesia untuk produk makanan olahan ke Arab Saudi tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif lebih dari 40 persen dengan produk utama ekspor antara lain olahan ikan, saus dan olahannya, aneka biskuit, kecap, dan olahan pasta.

Total perdagangan Indonesia dan Arab Saudi pada 2022 mencapai USD7,51 miliar. Tren perdagangan kedua negara terus menunjukkan peningkatan dengan ekspor nonmigas Indonesia senilai USD2,01 miliar dan impor senilai USD11,3 juta.

Menggandeng PT Pos Indonesia sangat efektif dan efisien bagi pelaku UMKM. Layanan Pos Indonesia bisa diakses di seluruh Indonesia. Pos Indonesia memiliki armada di jalur darat, laut, dan udara. Hal ini penting bagi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan jaringan luas sehingga dapat membantu para pelaku UMKM dalam membuka akses baru, baik di domestik maupun internasional.

Begitu pula bermitra dan berkolaborasi dengan Yayasan BIG Indonesia. Yayasan ini secara konsisten melakukan pendampingan dan pengembangan inovasi untuk percepatan sertifikasi produk halal dengan semangat yang diusung yaitu *go digital*, *go ritel*, dan *go ekspor*. Untuk mendukung program percepatan ekspor yang dicanangkan Kemendag, BIG Indonesia bersama PT Pos Indonesia dan PT Pos Logistik juga memberikan fasilitas gratis kepada UKM produk halal berupa area gudang dan pendampingan melalui program berkelanjutan ‘*Joint Marketing House*’ (Rumah Pemasaran Bersama UKM Halal Indonesia). Fasilitas ini diharapkan dapat digunakan pelaku usaha UKM halal untuk menyimpan barang sebelum proses pengiriman sekaligus mendapatkan pendampingan standardisasi produk dan perbantuan akses pemasaran ritel dan ekspor. ■

Pelepasan
Ekspor 22
Produk
Makanan
Olahan
UMKM ke
Arab Saudi



Mendag Zulhas tak main-main dalam membangun kekuatan UMKM ini. Ia meyakini UMKM merupakan motor penting pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pada Agustus 2023, pria asal Lampung ini kembali menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dalam memaksimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pelaku usaha rintisan (*start up*). Kerja sama menggarap pasar dalam dan luar negeri sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perwakilan perdagangan di 45 negara di dunia siap berkolaborasi untuk mengembangkan pasar ekspor.

Dalam acara “*Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit (ISES) 2023*” yang dihelat di Surakarta, Jawa Tengah, Mendag Zulhas mengungkapkan, Kemendag memiliki perwakilan dagang di 45 negara. Perwakilan tersebut terdiri atas satu Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), satu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), 1 Konsulat Dagang, 23 Atase Perdagangan, serta 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). “Kantor perwakilan dagang ini bisa dimanfaatkan UMKM untuk memajang dan mempromosikan produk-produknya,” tandas Mendag.



Kemendag juga membuka akses melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra untuk mengurangi hambatan ekspor. Saat ini, Kemendag sudah menyelesaikan 30 perjanjian dagang, di antaranya dengan ASEAN dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Kemendag juga terus membuka pasar nontradisional, misalnya dengan India dan Pakistan. “Kemendag juga membuat ‘*toll way*’ karena kalau tidak dilakukan, hambatan ekspornya akan banyak. Misalnya,

kalau kirim sepatu ke Uni Eropa kena pajak 9 persen, kalau kirim makanan kena pajak 20 persen,” jelasnya.



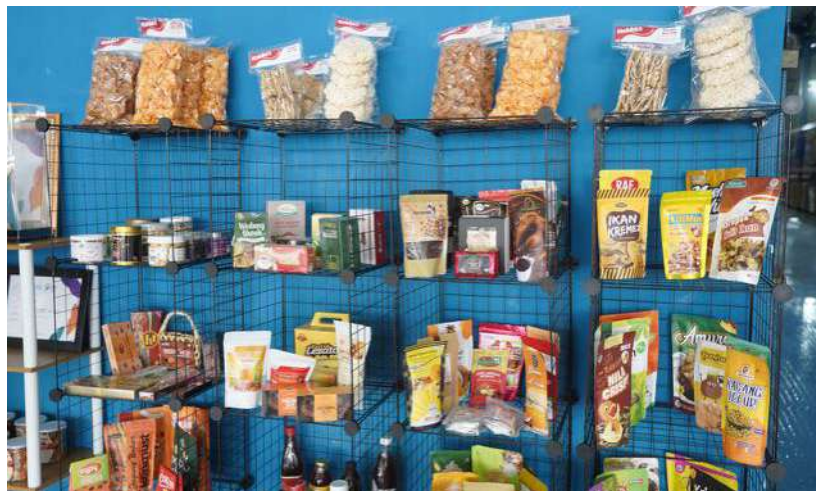
5 | Sukses Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi



Di dalam negeri, Kemendag telah mengembangkan ekosistem dengan membangun kolaborasi empat pilar, yakni UMKM, lokapasar (*marketplace*), ritel modern, dan lembaga pembiayaan. Lokapasar dapat bersinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan lokapasar untuk UMKM. Sedangkan ritel modern berperan memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dapat makin luas, di antaranya diwujudkan melalui ritel-ritel modern yang memasok produk-produk UMKM lokal khas dari suatu daerah. Sedangkan, lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM.

“*Marketplace* dapat bekerja sama dengan UMKM dengan memberikan pelatihan, misalnya pemasaran digital dan kemasan. Keduanya saling membutuhkan *marketplace* mendapatkan penyuplai sedangkan UMKM pasar melalui *marketplace*. Sementara ritel modern akan mendapatkan suplai produk dari UMKM dan sebaliknya UMKM mendapatkan pasar melalui ritel modern. Berikutnya, perbankan penting sekali karena permasalahan utama UMKM adalah modal,” katanya.

Selain itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk melindungi UMKM. “Kita sedang melakukan penataan *E-Commerce* (niaga elektronik) untuk melindungi UMKM dan mengutamakan produk dalam negeri.” Dalam lima tahun terakhir (2018–2022), ekonomi digital memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi *E-Commerce* sepanjang 2022 mencapai Rp476,3 triliun, dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun. ■





Ekspor Produk “Rantai Pasok Global”

Tak ingin menysia-nyikan kesempatan untuk terus menggerakkan ekspor, pada pertengahan tahun 2023, jajaran pimpinan Kemendag bergegas menuju Salatiga, Jawa Tengah. Di kota sejuk ini sudah siap sejumlah kontainer berisi alas kaki yang siap dilepas ke Uni Eropa. Ekspor senilai USD96 ribu dilepas dengan diiringi gemuruh tepuk tangan karyawan. Pelepasan ini menjadi momentum Indonesia sebagai bagian rantai pasok global produk alas kaki dunia.



5

Sukses Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi



Sejumlah pihak turut hadir untuk merayakan kegembiraan, seperti Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan, Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sondang Anggraini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Ratna Kawuri, Sekretaris Daerah Kota Salatiga Wuri Pujiastuti, Vice President Government and Public Affairs for Nike Asia Pacific and Latin America Azlina Sulaiman, serta Vice President KMK Group Jimmy Song.

“Pelepasan ekspor ini merupakan momentum perluasan pasar ekspor produk Indonesia serta dapat menjadikan Indonesia sebagai bagian rantai pasok global produk alas kaki dunia. Pelepasan ekspor ini diharapkan juga menjadi penggerak roda ekonomi Indonesia di masa pemulihan pascapandemi.”

PT Selalu Cinta Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur/pabrik rekanan Nike Indonesia yang memiliki jaringan rantai pasok global industri alas kaki, pakaian, serta peralatan olah raga. Nike menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pusat produksi melalui kemitraan dengan beberapa pabrik. Kemitraan seperti ini akan mendorong

Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global industri alas kaki.

Dalam perdagangan alas kaki global, pada 2022 Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai eksportir alas kaki dunia dengan pangsa 4,16 persen. Pada tahun tersebut, ekspor alas kaki Indonesia tercatat sebesar USD7,74 miliar, tumbuh cukup signifikan sebesar 25,1 persen dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang tercatat USD6,18 miliar. Selama lima tahun terakhir (2018—2022), tren ekspor alas kaki Indonesia ke dunia menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 12,4 persen. Pada periode ini, lima negara utama tujuan ekspor dengan tren positif yakni Amerika Serikat dengan tren 17,45 persen, Belgia (24,25 persen), Tiongkok (14,32 persen), Jerman (9,40 persen), dan Jepang (1,90 persen). ■



Ekspor Produk Hilirisasi Besi dan Baja

Setelah melepas ekspor alas kaki, Mendag Zulhas makin banyak mendapatkan undangan untuk melepas berbagai produk ekspor ke berbagai negara dunia. Banyak perusahaan yang sudah lama mengekspor dan membuka tujuan ekspor baru. Pada bulan April 2023, Mendag Zulhas memilih melepas ekspor baja canai panas (*hot rolled coil/HRC*) produksi PT Krakatau Steel (Persero) ke Italia dengan volume 30 ribu metrik ton. Pelepasan ekspor berlangsung di Dermaga Krakatau Bandar Samudera (Krakatau International Port), Cilegon, Banten. Hal ini makin mengukuhkan posisi Indonesia di sektor baja global. Hasil baja Indonesia sudah mencapai peringkat 3 sebagai ekspor unggulan Indonesia setelah batubara dan minyak sawit.



5

Sukses Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi



Dari sisi struktur produk ekspor Indonesia sepanjang tahun 2022, ekspor besi baja berkontribusi sebesar USD27,82 miliar atau menjadi penyumbang ekspor ke-3 terbesar dengan pangsa 9,5 persen dari total ekspor 2022, termasuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. “Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pelaku industri menerapkan hilirisasi yang menciptakan nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global. Hilirisasi di sektor besi dan baja telah sejalan dengan visi untuk menjadikan Indonesia negara maju tahun 2045,” tegas Mendag Zulhas.

Upaya-upaya hilirisasi yang menghasilkan produk bernilai tambah perlu menjadi prioritas pemerintah. Untuk menjadi negara maju, tidak ada pilihan. Produk-produk kita harus menyerbu pasar dunia, sekarang giliran kita. Selain itu, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya kepada para pelaku industri, terutama produsen baja, karena telah bekerja keras menjalankan hilirisasi besi dan baja.

Pengiriman ekspor ke Italia hari ini menambah kontribusi Krakatau Steel terhadap devisa negara sebesar Rp315 miliar atau setara dengan USD21,15 juta. Dengan adanya penambahan kapasitas sehingga total produksi mencapai sebesar 5,60 juta ton per tahun, kami terus membuka peluang untuk kebutuhan domestik maupun sebesar 30 persen untuk pasar ekspor, terutama wilayah Eropa yang memang kualitas produk baja Krakatau Steel sudah diakui di sana.

Indonesia saat ini masuk dalam lima besar eksportir besi dan baja terbesar di dunia. Dalam lima tahun, Indonesia berhasil melompat ke posisi ke-5 pada 2022 dari posisi ke-18 pada 2018. Pada 2022, ekspor besi dan baja Indonesia mencapai USD27,82 miliar dengan tren pertumbuhan sebesar 52,08 persen.

Sementara itu, pertumbuhan industri besi baja Indonesia berkembang sangat pesat selama lima tahun terakhir (2018–2022). Hal ini terlihat dari angka ekspor pada 2022 sebesar USD27,82 miliar dari sebelumnya sebesar USD5,60 miliar pada 2018. Terdapat kenaikan 476 persen selama periode lima tahun.

Bagi Zulhas, pembukaan pasar baru ekspor sudah menjadi mandatori yang harus dikerjakan oleh seluruh jajaran di Kementerian. Yang juga sangat penting adalah membuka akses pasar melalui kesepakatan dagang baik melalui persetujuan perdagangan bebas (FTA), *preferential trade agreement*, atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) sebagai jalan tol bagi ekspor Indonesia ke mitra dagang.





Ekspor Produk Hasil Kolaborasi

Mendag Zulhas kembali melepas ekspor produk dalam negeri ke beberapa negara. Kali ini, produk ekspor merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di Provinsi Jambi, yaitu pinang, kopra, dan karet. Pelepasan ekspor ini melibatkan berbagai macam perkebunan rakyat yang dikelola satu unit induk usaha yang terdiri atas pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan. Pelepasan ekspor dilakukan di Pelabuhan Talang Duku, Jambi.



Pelepasan ekspor dilakukan PT Kirana Windu untuk produk karet senilai USD80 ribu ke Meksiko, CV Rayeez Agro Albasith untuk produk kopra kering senilai USD24,79 ribu ke Pakistan, PT Blantika Indo Global untuk produk ijuk kelapa dari pelepah pinang senilai USD14,30 ribu ke India, serta PT Agro Future Indonesia produk biji pinang senilai USD16,97 ribu ke Bangladesh. Pelepasan ekspor perdana Provinsi Jambi ini merupakan kolaborasi antara pelaku UKM dan perusahaan.

“Artinya, kegiatan ini membuktikan bahwa jika seluruh pelaku usaha berkolaborasi, maka akan menciptakan eksportir yang sanggup memenuhi selera pasar global, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” tegas Mendag Zulhas.

Saat ini terdapat hambatan ekspor seperti penerapan *minimum import price* (MPI) di India; penerapan tarif bea masuk yang tinggi di India, Iran, dan Persatuan Emirat Arab; serta belum adanya pengakuan sertifikasi di negara tujuan ekspor. Hambatan ekspor ini bukan hanya menjadi keresahan para petani dan eksportir pinang, melainkan juga menjadi keresahan Kementerian Perdagangan. Kemendag akan terus melakukan upaya diplomasi bilateral dengan negara tujuan ekspor pinang, agar tidak ada lagi yang menghambat ekspor pinang dari Indonesia. Kementerian Perdagangan berjuang keras agar India mengubah kebijakan terhadap pinang Indonesia, khususnya dari Jambi.



Ekspor Produk Ormas

Tak hanya pelaku usaha besar dan UMKM yang dimotivasi dan digerakkan untuk bisa menjadi eksportir, organisasi masyarakat pun diharapkan bisa ekspor. Jamaah Tani Muhammadiyah dibantu untuk bisa bersinergi dengan PT BUMR BiMU yang ada di Lampung. Melalui perusahaan ini, Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) berhasil mengekspor pinang sebesar 18 ton dengan nilai Rp542 juta ke Arab Saudi. Proses produksi, menjaga mutu, dan mencari pasar ekspor merupakan bagian terpenting yang harus dipelajari para eksportir baru.



5

Sukses
Menjaga Momentum
Pemulihan Ekonomi

Export Coaching Program Mencetak Eksportir Baru



Sebagai salah satu wujud nyata Kementerian Perdagangan dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional yaitu melalui pembinaan pelaku

usaha. UMKM merupakan sebagai salah satu elemen penting perekonomian Indonesia. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan usaha dalam menangkap peluang meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia. Tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi untuk meraihnya sudah dijalankan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk pelaku usaha dan UMKM. Harus diakui bahwa UMKM di Indonesia yang berjumlah lebih dari 64 juta UKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dimana berkontribusi pada GDP sebesar 61 persen dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97 persen.

Export Coaching Program (ECP) merupakan program pendampingan untuk pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Program pendampingan untuk pelaku usaha yang berorientasi ekspor terdiri dari 7 tahapan selama 1 tahun). Tujuh tahapan dalam ECP yaitu *webinar* dan seleksi ECP, *workshop* dan verifikasi perusahaan, *training of exporters*, pendampingan *market development*, *business matching*, progress monitoring dan evaluasi.

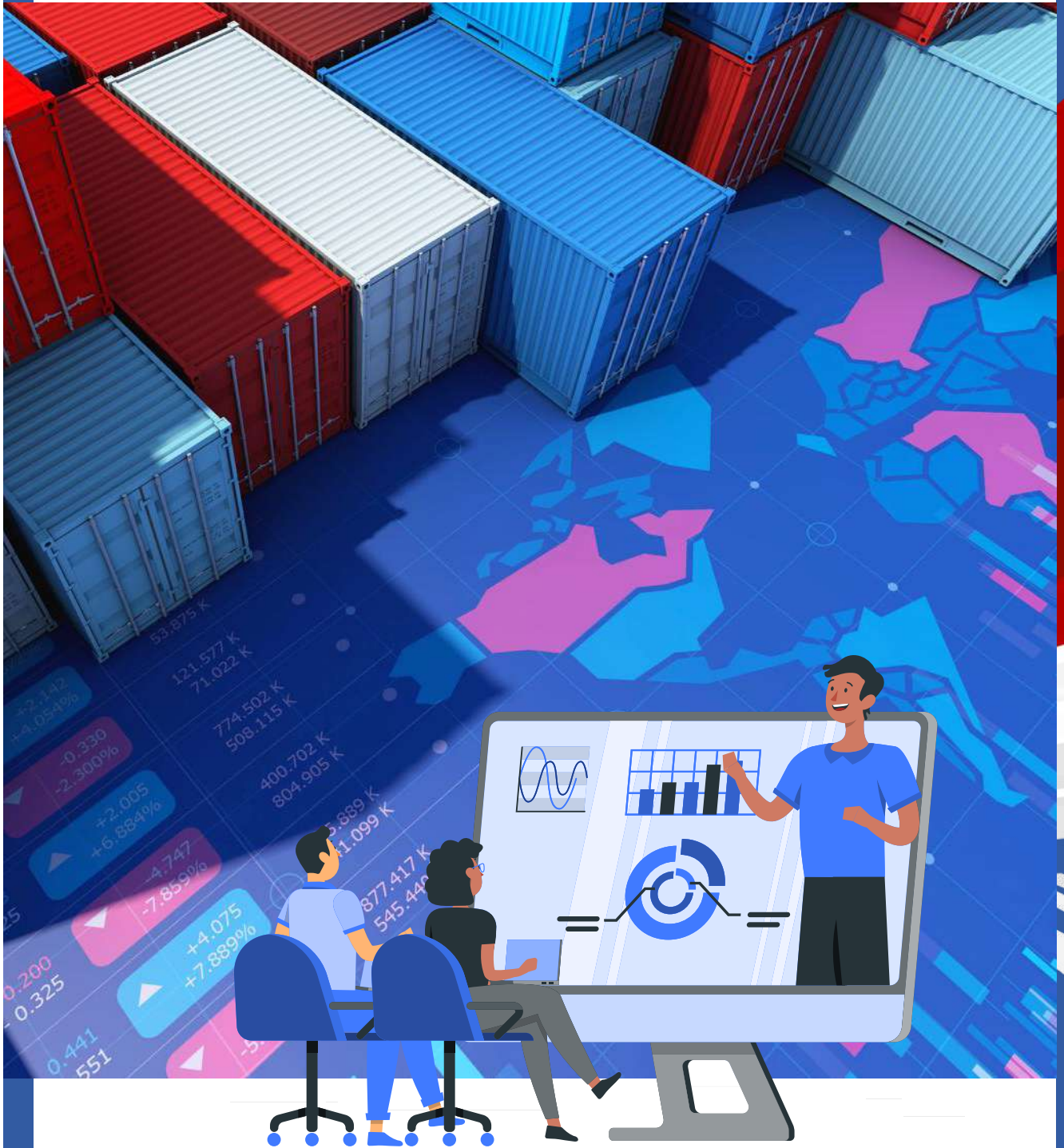


ECP tahun 2023 dilaksanakan 12 Provinsi (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara) dengan jumlah peserta 360 pelaku usaha .

Outcome Export Coaching Program (ECP) 2023 yaitu terciptanya eksportir sebanyak 163 pelaku usaha dengan nilai capaian mencapai lebih dari USD5,5 juta. Produk-produk yang diekspor bervariasi dari produk makanan minuman olahan, *handicraft*, *furniture* dan *home décor*, *fashion*, produk olahan kelapa dan turunan dan komoditas pertanian. Secara keseluruhan kegiatan ECP dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Secara keseluruhan, pendampingan yang telah dilakukan sejak 2010 sampai dengan 2023 dilakukan di 16 Provinsi di 20 kota kabupaten, dengan total alumni 2200 orang dengan transaksi mencapai USD36,3 juta atau sekitar Rp562 milyar.

Salah satu peserta ECP 2023 di Provinsi Lampung, yang juga merupakan UMKM binaan Muhammadiyah, berhasil melakukan ekspor yaitu PT. Badan Usaha Milik Rakyat Bina Masyarakat Utama (PT. BUMR BiMU) dengan komoditas ekspor adalah Pinang Belah ke negara tujuan ekspor Arab Saudi sebanyak 1 kontainer atau 18 ton dengan nilai Rp542 juta. Acara pelepasan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., sekaligus memberikan apresiasi kepada UMKM Lampung yang telah berhasil melakukan ekspor pada 30 Oktober 2023. Pelepasan Ekspor peserta ECP 2023 wilayah Provinsi Lampung untuk produk pinang belah ke Arab Saudi oleh PT. BUMR BiMU dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.







5

Sukses
Menjaga Momentum
Pemulihan Ekonomi

Tren Momentum Pemulihan Ekonomi

USD
33,63
miliar

Neraca
perdagangan
(Januari—
November 2023)

Dampak pemulihan ekonomi nasional melalui gerakan peningkatan ekspor nasional dari berbagai sektor dan berbagai elemen masyarakat berdampak penting bagi perekonomian nasional. Upaya tersebut berhasil secara signifikan mengerek ekspor nasional. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari-November 2023 sebesar USD236,41 miliar, dengan nilai ekspor nonmigas sebesar USD221,96 miliar. Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas kita adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Kemendag berupaya terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum, dengan menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor yaitu Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kinerja perdagangan yang dipotret melalui neraca perdagangan selama Januari—November 2023 juga berhasil mengalami surplus sebesar USD33,63 miliar. Meski turun USD16,91 miliar dibandingkan surplus tahun lalu, surplus ini berhasil mempertahankan surplus 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pertumbuhan ekonomi nasional sampai triwulan III-2023 tumbuh mendekati 5 persen (YoY), meskipun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,17 persen (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,06 persen (YoY), seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi.

Momentum tren pemulihan ekonomi terus menggelinding menjadi pondasi bagi Indonesia untuk terus tumbuh menuju Indonesia Emas 2045.





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perdagangan
Digital





6

Sukses Bangun “Jalan Tol” (*Toll Way*) Perdagangan

“Kerja sama ekonomi antarnegara dibangun untuk mengokohkan ekonomi nasional sekaligus mengembangkan perekonomian di setiap kawasan. Di era Mendag Zulhas, perjanjian perdagangan internasional dalam banyak skema berhasil ditandatangani dan diimplementasikan.”

Salah satu keberhasilan terbesar Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) adalah lahirnya “jalan tol” (*toll way*) perdagangan. Dengan “jalan bebas hambatan” ini, para pelaku usaha dengan lebih cepat dan lebih mudah melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia tanpa hambatan perdagangan. Pengenaan tarif bea masuk dan berbagai *barrier* perdagangan bisa diselesaikan antarnegara melalui perjanjian perdagangan internasional. Di era Mendag Zulhas, banyak perjanjian perdagangan yang bertahun-tahun belum selesai akhirnya bisa dituntaskan dan memberi manfaat besar bagi peningkatan ekspor nasional.





6

Sukses Bangun "Jalan Tol" (Toll Way) Perdagangan

Di tengah pelambatan ekonomi akibat keadaan geopolitik, perdagangan dunia terfragmentasi menuju arah *friendshoring*. Artinya, perdagangan dan investasi mengarah pada kesamaan pandangan politik bukan lagi kedekatan wilayah. Hal ini sangat positif bagi Indonesia yang dalam posisi netral. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas sejumlah perjanjian perdagangan dalam skema CEPA, FTA dan sejenisnya yang telah disepakati seperti dengan Indonesia-UAE CEPA dan RCEP.

Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo untuk memperluas akses pasar nontradisional. Hubungan baik dengan negara mitra dagang utama tetap dipertahankan. Namun perluasan pasar ekspor menjadi alternatif penting yang harus diprioritaskan. Karena itu, perluasan kerja sama perdagangan bilateral ke pasar nontradisional akan menjadi alternatif untuk mendorong ekspor dan perekonomian dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di era Mendag Zulhas, penandatanganan Indonesia-Iran PTA telah dilakukan. Sementara, penandatanganan Indonesia-UAE CEPA pada tahun 2022 baru diimplementasikan per 1 September 2023. Demikian juga dengan RCEP dan Indonesia-Korea CEPA yang telah berjalan sejak 2 Januari 2023 untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Sejumlah perjanjian perdagangan juga telah ditandatangani, di antaranya *Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement* (BTA), *International Coffee Agreement* (ICA) 2022, dan Protokol Kedua Perubahan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA).

Selain itu, beberapa perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan antara lain, Protokol Pertama Perubahan ASEAN – Hong Kong FTA (AHKFTA) untuk memperbarui ketentuan spesifik barang; dan Protokol Perubahan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sebagai dasar hukum penyempurnaan IJEPA agar dapat **lebih banyak memberi manfaat** bagi kedua negara. Tak hanya itu, tahun 2023 ini, Indonesia mendapatkan mandat untuk menjadi tuan rumah ASEAN atau memegang Ketetuaan ASEAN 2023. Tentunya Ketetuaan ASEAN juga memberikan capaian penting dalam di bidang ekonomi.



Perjanjian Perdagangan Sudah Ditandatangani



Indonesia–UAE CEPA

Sejak dilantik 15 Juni 2022 sebagai Menteri Perdagangan, Mendag Zulhas langsung dianugerahi “jalan tol” berupa “peresmian” perjanjian perdagangan Indonesia-UAE CEPA yang secara resmi ditandatangani pada 1 Juli 2022. Hal ini merupakan catatan sejarah baru dalam perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Teluk. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara tujuan pasar ekspor nontradisional Indonesia yang menjadi *hub* perdagangan internasional di kawasan Timur Tengah.

Proses ratifikasi Indonesia-UAE CEPA telah selesai dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 12 Juli 2023. Pemberlakuan IUAE-CEPA diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi bilateral, meningkatkan perdagangan barang dan jasa, investasi, dan berbagai kerja sama ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya ke UAE melainkan negara-negara lain terutama kawasan Timur Tengah dan Afrika, serta Asia Selatan. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara tujuan pasar ekspor nontradisional Indonesia yang menjadi hub perdagangan internasional.

Indonesia–Chile CEPA

Persetujuan Indonesia-Chile CEPA merupakan persetujuan dagang bilateral yang bersifat bertahap (*incremental*). Persetujuan ini diawali dengan persetujuan di sektor perdagangan barang yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2017 dan diimplementasikan pada tanggal 10 Agustus 2019. Sementara itu untuk perdagangan sektor jasa, kedua pihak telah menandatangani perjanjian Indonesia-Chile CEPA Trade in Services (TIS) pada tanggal 21 November 2022 dan saat ini dalam proses penyelesaian ratifikasi.





6 | Sukses Bangun "Jalan Tol" (Toll Way) Perdagangan

Perjanjian perdagangan jasa dalam kerangka IC-CEPA akan memperkuat dan memperdalam kerja sama ekonomi yang tengah berlangsung antara Indonesia dan Chile melalui peluang akses pasar jasa. Perdagangan jasa antara kedua negara mencakup hubungan ekonomi yang lebih luas dan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan Chile. Perjanjian perdagangan jasa di bawah IC-CEPA juga dapat berfungsi sebagai penggerak arus jasa yang lebih tinggi yang akan melengkapi implementasi kesepakatan IC-CEPA yang telah diimplementasikan pada tahun 2019. Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri Indonesia juga akan memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar Chile untuk sektor jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa pariwisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan olah raga, jasa transportasi, dan jasa lainnya. Langkah ini akan makin mendukung ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Latin.

Indonesia–Iran PTA

Perundingan *Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement* (PTA) telah selesai dirundingkan dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran pada tanggal 23 Mei 2023 di Istana Presiden, Bogor. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

Secara garis besar Indonesia-Iran PTA mencakup perdagangan barang, pengurangan atau penghapusan tarif, ketentuan asal barang, dan imbal dagang. Indonesia–Iran PTA merupakan perjanjian perdagangan yang dapat mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara. Indonesia – Iran PTA juga merupakan sarana yang dapat meningkatkan daya saing dan mampu menembus tidak hanya pasar Iran, namun juga negara-negara di kawasan Asia Barat pada umumnya.

Melalui kesepakatan Indonesia-Iran PTA, Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi atas 239 pos tarif (PT), di antaranya adalah briket, petroleum, makanan olahan, farmasi, karet, kertas, produk tekstil, kayu dan produk kayu, alas kaki, kapas, mesin dan peralatan listrik, kendaraan bermotor, produk manufaktur, bahan kimia, aluminium, minyak sawit, ekstrak minyak nabati lainnya, kakao, tembakau, kopi, teh, rempah-rempah, buah, sayuran, dan ikan.



Sementara Iran akan mendapatkan tarif preferensi atas 227 PT, di antaranya adalah bahan bakar mineral, minyak mineral dan hasil penyulingannya, bahan kimia, besi dan baja, farmasi, aluminium, mesin dan peralatan mekanik, perlengkapan, kendaraan bermotor, kertas, makanan olahan, yoghurt, keju, madu, sayuran, buah dan kacang-kacangan, gandum, dan ikan.

Indonesia–Malaysia BTA

Perjanjian perdagangan perbatasan Indonesia-Malaysia BTA telah ditandatangani Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Perindustrian Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, pada tanggal 8 Juni 2023 di Putra jaya, Malaysia. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. BTA merupakan perjanjian yang mengatur perdagangan masyarakat tradisional di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Perundingan Review BTA dilakukan sejak tahun 2009. Tujuan Review BTA adalah untuk memperbaharui BTA yang ditandatangani tahun 1970. Setelah melewati 8 kali putaran perundingan, kedua negara akhirnya menyepakati secara substansi naskah BTA pada 21 Maret 2022.

Ruang lingkup BTA di antaranya:

- Daftar barang kebutuhan sehari-hari yang diperdagangkan menjadi lebih spesifik dibandingkan BTA 1970 (60 barang Indonesia; 32 barang Malaysia).
- Batas maksimal nilai perdagangan perbatasan yaitu sebesar 600 Ringgit Malaysia per pemegang kartu identitas lintas batas per bulan.
- Penyesuaian *Entry/Exit Points* wilayah perdagangan perbatasan merujuk pada Border Crossing Agreement terbaru.
- Ketentuan mekanisme *review* melalui komite BTA





2nd Protocol to Amend ASEAN- Australia-New Zealand FTA



2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area/2nd Protocol AANZFTA telah ditandatangani tanggal 21 Agustus 2023 di Semarang oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Ekonomi Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-55 para Menteri Ekonomi ASEAN (*55th ASEAN Economic Ministers' AEM Meeting*).

Sedangkan Menteri Perdagangan dari Kamboja dan Laos telah menandatangani pada bulan Desember 2023 dan Menteri Ekonomi ASEAN lainnya akan menandatangani protokol ini secara ad-referendum/bergantian.

Ada tiga bab baru pada perubahan kedua AANZFTA, yaitu tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); perdagangan dan pembangunan berkelanjutan; dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penambahan tersebut dapat meningkatkan kelancaran arus perdagangan barang dan jasa bagi Indonesia ke pasar ASEAN, Australia, dan Selandia Baru melalui modernisasi praktik perdagangan. Di samping itu, memberikan peluang bagi pelaku usaha dan investor Indonesia dengan peningkatan akses pasar sektor perdagangan jasa dan investasi.

Beberapa manfaat yang didapatkan Indonesia dengan ditandatanganinya Protokol Perubahan Kedua AANZFTA adalah memberikan fasilitasi dan kepastian iklim usaha dan perlindungan konsumen; meningkatkan penggunaan dan adopsi teknologi digital pada perdagangan termasuk sistem pembayaran elektronik dan akses telekomunikasi; responsif terhadap tantangan maupun krisis di masa mendatang melalui kesepakatan kemudahan fasilitasi perdagangan barang esensial. Keempat, membuka area kerja sama, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas pada UMKM, pengadaan barang/jasa pemerintah, serta perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan.



Penambahan bab baru dan beberapa elemen bernilai tambah pada bab sebelumnya pada AANZFTA bertujuan untuk memastikan peningkatan AANZFTA ini berkualitas tinggi, responsif terhadap tantangan global, dan mendukung kelancaran bisnis di kawasan. Penambahan ini juga untuk mendukung kelancaran arus barang, memperdalam liberalisasi jasa dan investasi, mendukung perdagangan elektronik dan transformasi digital, dan memfasilitasi partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional. Perubahan kedua tersebut mengatur beberapa elemen bernilai tambah pada bab sebelumnya, antara lain perdagangan barang; aturan asal barang, prosedur bea cukai, dan fasilitas perdagangan; dan perdagangan elektronik, persaingan usaha, perdagangan jasa, dan investasi.

Protokol perubahan kedua AANZFTA tersebut telah ditandatangani Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Menteri Ekonomi ASEAN lainnya akan menandatangani protokol ini secara ad-referendum/bergantian. Target implementasi protokol pada 2024 atau 60 hari setelah Australia, Selandia Baru, dan minimal empat negara anggota ASEAN menyampaikan instrumen ratifikasi ke Sekretariat ASEAN. Protokol AANZFTA ini sendiri mulai dirundingkan sejak 2020 dan selesai negosiasi 27 Juni 2023.





International Coffee Agreement (ICA) 2022



International Coffee Agreement merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh. Sampai dengan 8 Februari 2023, sebanyak 9 negara, yang terdiri dari 8 negara eksportir kopi dan 1 negara importir kopi, telah menandatangani ICA 2022. Negara eksportir terdiri dari Brasil, Kosta Rika, Nikaragua, Peru, Togo, Venezuela, Panama, dan Kolombia, sedangkan negara importir terdiri dari Jepang. Penandatanganan ICA 2022 dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan di Sekretariat Organisasi Kopi Internasional (*International Coffee Organization/ICO*) London, Inggris pada tanggal 8 Maret 2023.

Indonesia telah berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kopi nasional dengan menambahkan "*premixed coffee*" pada definisi kopi dalam perjanjian *International Coffee Agreement 2022* yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 8 Maret 2023. Keberhasilan tersebut akan memberi dampak penting pada peningkatan ekspor kopi nasional dan menjaga stabilitas harga kopi dunia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Indonesia. ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. ICA 2022 menjadi kesepakatan ketujuh sejak 1962, setelah ICA menetapkan kuota ekspor kopi untuk menstabilkan harga kopi dunia. Pencapaian penting lainnya adalah penekanan pada keberlanjutan sektor kopi pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berimbang dan terintegrasi untuk keberlanjutan sektor kopi Indonesia dan juga dunia.

Penandatanganan Kerja Sama Ekonomi Bilateral (BETC) dengan Tiongkok

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan kembali membuat gebrakan dengan membuka babak baru peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Peningkatan kerja sama bilateral ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pasar sekaligus memperluas area kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi bilateral.

Mendag Zulhas tancap gas melakukan penandatanganan Persetujuan Perluasan dan Pendalaman Kerja Sama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan Lebih Lanjut antara Indonesia dan Tiongkok yang dilaksanakan di sela rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 16 November 2023. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Mendag Zulhas dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping.

BETC juga berfungsi sebagai payung pembentukan Komisi Bersama Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan. BETC merupakan payung hukum kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara sepakat untuk memperbarui Persetujuan BETC ini dikarenakan perjanjian BETC sebelumnya telah habis masa berlakunya pada April 2021. Pembaruan BETC akan bermanfaat untuk makin meningkatkan kinerja perdagangan dan ekonomi kedua negara. Upaya-upaya diskusi dalam kerangka BETC ini akan menjadi wadah untuk mengatasi berbagai isu perdagangan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan kedua negara.

Tiongkok merupakan mitra dagang nomor satu Indonesia baik dalam hal ekspor maupun impor. Pada periode Januari–November 2023, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai USD58,83 miliar. Nilai tersebut turun 1,44 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor Indonesia dari Tiongkok mencapai USD57,39 miliar atau turun 7,16 persen. Sementara itu, total perdagangan Indonesia–Tiongkok pada 2022 mencapai USD133,56 miliar, meningkat 21,43 persen dibandingkan 2021. Ekspor Indonesia ke Tiongkok pada periode tersebut sebesar USD65,84 miliar, dan impor Indonesia dari Tiongkok sebesar USD67,72 miliar.



6 | Sukses Bangun
"Jalan Tol" (*Toll Way*)
Perdagangan



Perjanjian yang Sudah Diratifikasi

Tak perlu lama untuk segera memfungsikan “jalan tol” perdagangan. Mendag Zulhas segera meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan. Pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia juga telah berhasil menyelesaikan ratifikasi beberapa perjanjian yang telah selesai ditandatangani. Perjanjian yang telah diratifikasi pada tahun 2022 dan 2023 adalah IK-CEPA, RCEP dan I-UAE CEPA.

Indonesia–Korea CEPA

Indonesia – Korea CEPA telah ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020. Pada tahun 2022, Indonesia telah menyelesaikan ratifikasi perjanjian ini melalui UU No 25/2022 pada tanggal 27 September 2022. Hal ini menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah mengimplementasikan IK-CEPA.

Manfaat yang akan diberikan IK-CEPA antara lain:

- Peningkatan akses pasar barang Indonesia ke Korea Selatan karena komitmen IK CEPA lebih dalam dari ASEAN - Korea FTA;
- Masing-masing negara membuka lebih dari 100 subsektor jasa dengan kepemilikan saham asing berkisar antara 51 persen hingga 100 persen;
- Kerja sama ekonomi di sektor industri; pertanian, perikanan, kehutanan; aturan dan prosedur perdagangan yang fasilitatif; pergerakan orang perseorangan; dan area kerja sama lainnya; serta
- Potensi peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia yang akan memberikan dampak positif dari segi transfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.





Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP merupakan konsep kerja sama ekonomi yang semula melibatkan 16 Negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN dan 6 (enam) negara mitra ASEAN+1 FTA (Tiongkok, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India). Pada KTT RCEP ke-3 tahun 2019, India menyatakan belum dapat bergabung dalam RCEP mengingat sejumlah isu yang menjadi *concern* India belum dapat diselesaikan.

Pada KTT RCEP ke-4 tanggal 15 November 2020, Kepala Negara/ Pemerintahan RCEP telah mengumumkan penyelesaian perundingan RCEP dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian RCEP oleh 15 Menteri Ekonomi RCEP. Perjanjian RCEP terdiri dari 20 bab, 17 Annex dan 54 penjadwalan akses pasar (barang, jasa dan investasi), yang secara total mencapai 14.367 halaman. Indonesia telah meratifikasi RCEP melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 pada tanggal 27 September 2022.



RCEP mewakili 29,6 persen penduduk dunia, 30,2 persen GDP dunia, 27,4 persen perdagangan dunia, serta 29,8 persen FDI dunia. Berdasarkan kajian manfaat yang telah dilakukan oleh Puska KPI BKPerdag Kemendag, RCEP menciptakan efek *trade creation* bagi Indonesia di mana ekspor dan impor meningkat. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menyebabkan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD5,01 miliar pada tahun 2040.



Secara umum, terdapat sejumlah potensi manfaat yang dapat diraih Indonesia melalui RCEP, antara lain yaitu:

- terbukanya akses pasar barang, jasa, dan investasi di negara mitra melalui pengurangan hambatan ekspor baik tarif maupun nontarif, serta reformasi ekonomi yang dilakukan di masing-masing negara sehingga berdampak positif pada peningkatan daya saing;
- menciptakan lingkungan usaha yang *business friendly*, adil dan fasilitatif;
- mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai bagian dari *Global Value Chain* (GVC), serta mendorong *Regional Production Network* dan *Regional Value Chain* (RVC); dan
- meningkatkan aliran investasi langsung.



Pada awal tahun 2023, RCEP mulai diimplementasikan di Indonesia. Ketentuan yang mengatur tata laksana penerapan bea masuk tertuang dalam PMK Nomor 209/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Penerapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.



Indonesia–UAE CEPA

Berdasarkan rapat koordinasi terbatas ratifikasi IUAE-CEPA di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 16 Februari 2023, diputuskan bahwa pengesahan IUAE-CEPA dilakukan dengan instrumen Peraturan Presiden. Sehubungan dengan telah selesainya proses transposisi komitmen perdagangan barang dari Kode HS 2017 ke Kode HS 2022, Indonesia telah menyampaikan hasil transposisi tersebut kepada Persatuan Emirat Arab (PEA) melalui surat Direktur Perundingan Bilateral pada tanggal 8 Maret 2023. Sesuai izin prakarasa yang telah diterbitkan oleh Presiden, Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden untuk mengesahkan perjanjian perdagangan IUAE CEPA. Rancangan Perpres telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kementerian Luar Negeri melalui Kemensetneg telah mengirimkan Surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden RI Nomor pada tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.

Secara paralel Kemensetneg telah meminta paraf para Menteri untuk menetapkan RPerpres tersebut melalui Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 31 Mei 2023 dan Menteri Perdagangan telah menyampaikan paraf pada rancangan RPerpres tersebut tanggal 6 Juni 2023.

Pada tanggal 12 Juli 2023, Presiden telah mengesahkan Perpres Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Indonesia-UAE CEPA. Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut menandai bahwa proses ratifikasi telah selesai.





Perjanjian Perdagangan yang Telah Selesai Dirundingkan

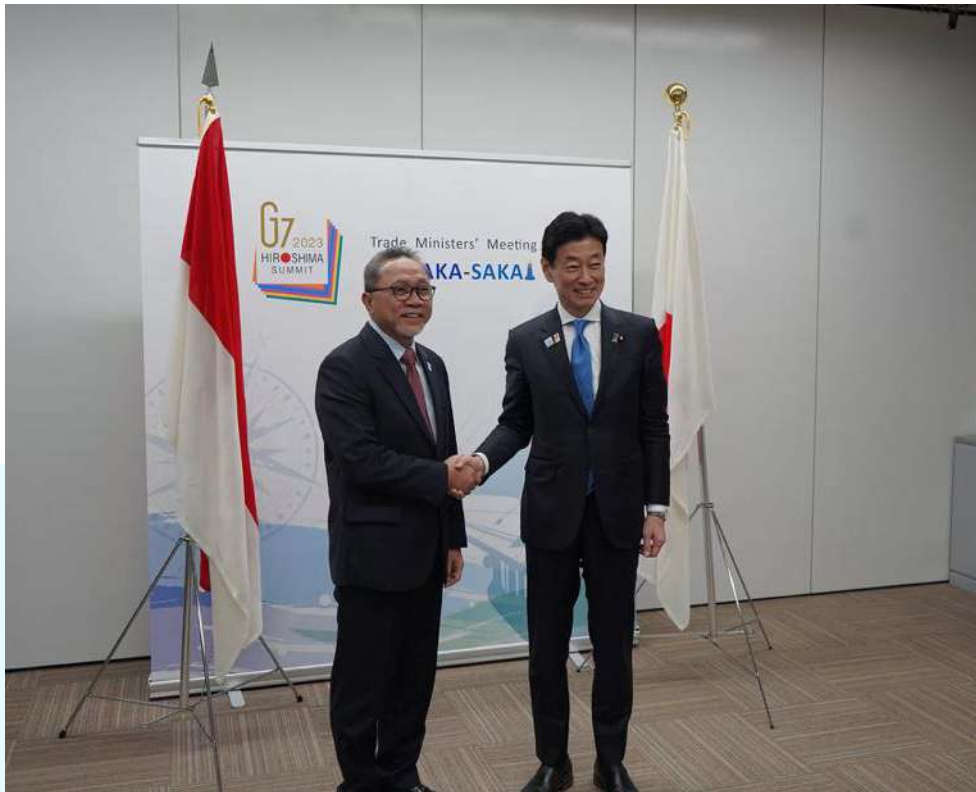


Pada tahun 2023 terdapat beberapa perjanjian perdagangan yang telah selesai dirundingkan yaitu **Protokol Perubahan IJEPA dan Protokol Pertama Perubahan ASEAN – Hong Kong FTA (AHKFTA)**.

Protokol Perubahan IJEPA.

Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan substansi perundingan Protokol Perubahan IJEPA pada pertemuan intersesi di Tokyo tanggal 22 – 24 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jepang telah mengakomodasi permintaan Indonesia atas eliminasi 4 pos tarif produk olahan ikan yang menjadi prioritas Indonesia. Dengan telah diselesaikannya isu akses pasar perdagangan barang, perundingan Protokol Perubahan IJEPA yang telah berjalan sejak 2019 dapat dituntaskan dan akan dilanjutkan ke proses penandatanganan dan ratifikasi. Selain perdagangan barang, sektor lain yang mengalami perubahan dan peningkatan dalam Protokol Perubahan IJEPA adalah perdagangan jasa, perdagangan melalui sistem elektronik, pergerakan orang perseorangan, kerja sama, kekayaan intelektual, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penyelesaian substansi perundingan Protokol Perubahan IJEPA menjadi salah satu *deliverable* pertemuan bilateral Presiden RI dan PM Jepang pada tanggal 16 Desember 2023. Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan dapat terlaksana pada kuartal I 2024 dengan pertimbangan Jepang memerlukan waktu setidaknya 3 bulan untuk menyelesaikan proses domestiknya.



Selain JEPA, pada tahun 2023, Indonesia juga telah menyelesaikan perundingan **Protokol Pertama Perubahan ASEAN–Hong Kong FTA (AHKFTA)**. Perundingan pertama *First Protocol to Amend the AHKFTA* telah dimulai pada tanggal 5 Juni 2021 untuk memperbarui ketentuan spesifik barang (sebelumnya masih menggunakan kode HS 2012). Penyelesaian perundingan telah diumumkan pada Pertemuan Konsultasi ke-7 *ASEAN Economic Ministers (AEM)*–Hong Kong, Tiongkok pada 20 Agustus 2023. *First Protocol*

bertujuan untuk mengubah AHKFTA dengan memasukkan *Product Specific Rules (PSR)* dalam HS 2022 ke dalam persetujuan. Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan secara *ad-referendum*. Menteri Perdagangan R.I. telah menerima surat kuasa (*full powers*) dari Menteri Luar Negeri R.I. untuk menandatangani protokol tersebut. *First Protocol AHKFTA* akan berlaku 60 hari setelah seluruh pihak menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN mengenai telah selesainya proses ratifikasi oleh setiap pihak.



6 | Sukses Bangun "Jalan Tol" (Toll Way) Perdagangan



Perjanjian Perdagangan yang Sedang Dinegosiasikan

Kementerian Perdagangan, secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan makin memfasilitasi perdagangan. Perkembangan perundingan yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai berikut.

Indonesia–Bangladesh PTA

Perundingan IB-PTA dimulai sejak tahun 2019. Kedua negara telah menyetujui mayoritas teks perjanjian dan telah melaksanakan pertukaran *revised offer* pada 10 Agustus 2023.

Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, KBRI Dhaka, dan pihak Bangladesh terkait upaya penyelesaian perundingan IB-PTA, serta akan berkonsultasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian terkait tindak lanjut perundingan IB-PTA.

Berdasarkan kajian manfaat yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, prediksi ekspor Indonesia ke Bangladesh akan mengalami peningkatan rata-rata 3,6 persen per tahun selama 2023–2025. Pada tahun 2025 nilai ekspor Indonesia akan mencapai USD3,6 miliar dan akan mengalami kenaikan secara periodik hingga 2030 dengan nilai ekspor mencapai USD4,3 miliar.

Indonesia akan memperoleh manfaat dari sisi ekspor yang mencakup 17 sektor, yaitu tekstil, kertas, kimia, karet dan plastik, makanan olahan, produk kayu, manufaktur, besi, CPO, sayur dan buah, elektronik, kendaraan, kilang minyak, batu bara, mineral, mesin, dan perkebunan. Kenaikan impor akan terjadi pada produk tekstil, makanan olahan, besi, perkebunan, kimia dan farmasi, elektronik, sayuran dan buah, kendaraan, dan mesin.



Indonesia–European Union CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi *concern* utama Presiden saat ini. Sesuai mandat Presiden, perundingan ini diharapkan dapat dilakukan dengan fleksibilitas dan orientasi solusi untuk mencapai target penyelesaian di tahun 2024.

Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan peningkatan akses pasar untuk barang-barang produksi Indonesia, tapi juga mendorong perdagangan jasa serta investasi yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia.

Indonesia–Canada CEPA

Perundingan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) secara substantif diharapkan rampung pada akhir tahun 2024. Perjanjian ICA-CEPA nantinya akan menjadi perundingan pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara.

Indonesia–Eurasian Economic Union (EAEU) FTA

Setelah *launching* perundingan dilakukan di tahun 2022, perundingan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

Indonesia–Turkiye CEPA

Perundingan IT-CEPA terhenti karena pihak Turki fokus pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan adanya perubahan struktur di Kementerian Perdagangan Turki. Pada tahun 2023 lalu kedua pihak telah melakukan pertemuan untuk melanjutkan perundingan.

IT – CEPA diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di Turki dan negara tetangganya serta makin meningkatkan ekspor Indonesia ke Turki yang merupakan salah satu pasar ekspor non-tradisional potensial.

Indonesia–Tunisia PTA

Indonesia–Tunisia PTA diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di Tunisia dan makin meningkatkan ekspor Indonesia ke Tunisia. Selama ini, Indonesia telah secara konsisten mencatatkan surplus nilai perdagangan dengan Tunisia. IT-PTA diproyeksikan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor potensial non migas Indonesia ke Tunisia antara lain *vegetable products, metals, textiles, chemical* dan *animal and vegetables fats*.

Indonesia–Mauritius PTA

Perundingan Indonesia-Mauritius PTA telah berjalan empat putaran perundingan. Kedua pihak akan segera mempertukarkan revisi *offer* pada awal 2024 dan ditargetkan dapat selesai di tahun 2024.



Indonesia–Morocco PTA

Indonesia-Maroko PTA diluncurkan pada 28 Juni 2018 di Fes, Maroko. Hingga saat ini perundingan IMA-PTA belum terlaksana, namun telah dipertukarkan draf teks perjanjian, data tarif bea masuk, serta indikasi cakupan produk dalam akses pasar.

Kedua pihak sepakat perundingan PTA dapat berjalan *back-to-back* dengan B-to-B Meeting dan pertemuan *Joint Trade Committee* (JTC) yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

Indonesia–Pakistan TIGA

Sebelumnya, Indonesia dan Pakistan telah menandatangani Indonesia–Pakistan PTA pada 3 Februari 2012 di Jakarta. Dalam perkembangannya kedua pihak sepakat untuk melakukan reviu guna membahas implementasi IP-PTA di kedua negara dan perluasan cakupan PTA menjadi Indonesia–Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Kedua pihak telah menyetujui penyesuaian *workplan* perundingan, termasuk penambahan jadwal pelaksanaan pertemuan intersesi di tingkat *working group* (WG) sebagai upaya mempercepat penyelesaian perundingan. Diharapkan tahun 2024 dapat melanjutkan dan menyelesaikan perundingan IP-TIGA.

Indonesia–MERCOSUR CEPA

Indonesia dan MERCOSUR telah menyelenggarakan Preliminary Meeting di tahun 2022. Pada pertemuan pendahuluan tersebut, kedua pihak membahas usulan Indonesia terkait draf *Terms of Reference (ToR) of Negotiations the Indonesia-MERCOSUR Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang disepakati akan menjadi *living document* untuk dibahas pada perundingan putaran pertama.

Indonesia–Peru CEPA

Indonesia dan Peru telah memulai perundingan pertama Indonesia-Peru CEPA pada 15 Agustus 2023. Perundingan Indonesia-Peru CEPA akan dilakukan secara bertahap (*incremental*). Babak perundingan akan dimulai dengan pembahasan perdagangan barang, disusul perdagangan jasa, investasi, lalu berbagai area kerja sama lainnya. *Chief Negotiator* Indonesia dan Peru telah bertemu pada tanggal 29 September 2023 untuk menyetujui *timeline* perundingan, dan pembentukan kelompok kerja serta penyusunan draf awal bab-bab yang akan dirundingkan. Berdasarkan hasil korespondensi Indonesia dengan Peru, disepakati bahwa penyelenggaraan perundingan putaran pertama Indonesia-Peru CEPA akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.

Perjanjian perdagangan dengan Peru akan memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia di kawasan Amerika Selatan, mendorong terbukanya peluang investasi baru dan lapangan kerja, serta memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Peluncuran/ Launching Perundingan

Pada tahun 2022 dan 2023, kepemimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah berhasil meluncurkan beberapa perundingan perjanjian dengan beberapa negara non tradisional yaitu Eurasian Economic Union (EAEU) dan Peru.

Indonesia–Eurasian Economic Union (EAEU) FTA

Perundingan Indonesia–EAEU FTA resmi diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Anggota Dewan Kementerian Perdagangan EAEU Andrey Slepnev pada 5 Desember 2022. Perundingan ini merupakan salah satu upaya Indonesia dalam memperluas pasar non-tradisional. Khususnya ke negara-negara di kawasan Eurasia yang terdiri atas Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

EAEU merupakan mitra dagang non-tradisional Indonesia yang memiliki potensi besar. Dengan total populasi sebesar 183 juta jiwa dan nilai produk domestik bruto mencapai USD2,04 triliun, EAEU dapat menjadi hub produk-produk Indonesia di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur. Oleh sebab itu, perundingan IEAEU–FTA berperan penting sebagai pembuka jalan dan peluang bagi perdagangan yang lebih luas antara pelaku bisnis Indonesia dan EAEU.

Indonesia–Peru CEPA

Launching perundingan telah dilakukan pada 15 Agustus 2023. Perundingan Indonesia-Peru CEPA akan dilakukan secara bertahap (*incremental*). Babak perundingan akan dimulai dengan pembahasan per-dagangan barang, disusul perdagangan jasa, investasi, lalu berbagai area kerja sama lainnya. Berdasarkan hasil korespondensi Indonesia dengan Peru, disepakati bahwa penyelenggaraan perundingan putaran pertama Indonesia-Peru CEPA akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.





Perjanjian Perdagangan yang Sedang dalam Penjajakan

Tak puas dengan berbagai perjanjian yang sudah ditandatangani dan sudah diratifikasi, Mendag Zulhas kembali menjajaki kerja sama dengan berbagai negara di dunia.



Indonesia–Gulf Cooperation Council (GCC) CEPA

Untuk segera memulai perundingan Indonesia-GCC EPA, Mendag RI dan Sekretaris Jenderal GCC telah melakukan pertemuan bilateral pada 23 Januari 2023 di Riyadh. Tindak lanjut dari hal tersebut Pemerintah Indonesia telah menyampaikan konsep *Term of References* (ToR) dan Joint Statement serta usulan waktu pelaksanaan peluncuran perundingan IGCC-EPA kepada Sekretariat GCC yang akan diputuskan melalui *Ministerial Council* GCC.

Indonesia–India PTA

Dalam rangka menjajaki dimulainya perundingan Indonesia-India PTA, Menteri Perdagangan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri India di New Delhi pada 14 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan dan Industri India menyatakan mendukung prakarsa peningkatan hubungan perdagangan (PTA) sebagai forum untuk dapat membahas berbagai isu-isu hambatan perdagangan dan investasi kedua negara.

Indonesia–Sri Lanka FTA

Indonesia dan Sri Lanka telah melakukan pertemuan *Chief Negotiator* pada 29 Agustus 2023 untuk menindaklanjuti draf *Joint Press Release* peluncuran ISL-PTA usulan Sri Lanka. Indonesia telah menyampaikan teks *Joint Ministerial Statement* Peluncuran ISL-PTA yang telah disepakati pada 2 November 2023 serta usulan tanggal peluncuran yang diharapkan dapat terlaksana pada awal 2024.





Indonesia–Ecuador PTA

Indonesia telah menyampaikan *Terms of Reference (TOR) of Joint Feasibility Study (JFS) Preferential Trade Agreement (PTA)* pada Februari 2021 sebagai tindak lanjut pertemuan WGTI ke-1 yang diselenggarakan pada Desember 2018 dan mengonfirmasi tanggapan Ekuador atas kemungkinan pembentukan PTA antara kedua negara. Ekuador merupakan salah satu negara pasar nontradisional potensial.

Selain dengan negara-negara tersebut di atas saat ini Indonesia juga melakukan penjangkauan antara lain dengan *South African Customs Union (SACU)*, *Economic Community of West African States (ECOWAS)*, *East African Community (EAC)*, Djibouti, Algeria, Colombia, Papua New Guinea, Kenya, dan Tanzania.





Mengokohkan Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship)

Indonesia pernah menjadi "Macan Asia" di Kawasan ASEAN. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengaum di Kawasan ASEAN dengan memegang keketuaan ASEAN. Sebagai Menteri Perdagangan, Mendag Zulhas tak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mengokohkan perdagangan di kawasan ini.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja pada 13 November 2022, Indonesia mendapatkan mandat untuk memegang Chairmanship ASEAN 2023. Tema dari ASEAN 2023 adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth." Tema tersebut terdiri dari dua elemen besar yaitu *ASEAN Matters* dan *Epicentrum of Growth*. Dengan kedua elemen yang ada pada ASEAN 2023 menjadi langkah dalam memperkuat Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi kawasan dan kemakmuran rakyat ASEAN.

Indonesia telah menetapkan sejumlah agenda prioritas ekonomi untuk memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan yang diterjemahkan melalui *Priority Economic Deliverables* (PED) dalam 3 pilar yaitu *Recovery and Rebuilding*; *Digital Economy*; dan *Sustainability*. Terdapat 16 PED dalam periode *Chairman* atau Keketuaan ASEAN 2023, di mana tujuh dari PED tersebut di bawah AEM.



Mendag Zulhas berhasil mendorong kemajuan perdagangan dalam sidang-sidang ASEAN. Di sektor perdagangan, setidaknya terdapat 7 (tujuh) penyelesaian prioritas ekonomi ASEAN.

- **Penyelesaian Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa ASEAN/ ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF)**

ASFF merupakan salah satu *Priority Economic Deliverables* (PED) pada Ketekuaan Indonesia di ASEAN 2023. ASFF merupakan *framework* kerja sama ASEAN dalam memfasilitasi sektor jasa melalui penyediaan jasa yang terpadu dan terkoordinasi sehingga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha jasa dari ASEAN dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik seperti prosedur yang lebih jelas dan mengurangi hambatan birokrasi dalam penyediaan jasa lintas batas (*cross-border services*) ke pasar ASEAN. Transparansi ASFF mengadopsi berbagai elemen/disiplin dari teks *Agreement atau Framework* seperti GATS, *ASEAN Investment Facilitation Framework* (AIFF), ATISA, WTO JISDR dan beberapa *agreement* lainnya. Saat ini seluruh AMS tengah melakukan proses penyelesaian proses domestik agar ASFF dapat diadopsi pada the 30th *AEM Retreat* yang dijadwalkan tentatif pada 7–8 Maret 2024.



- **Pengesahan Studi Terkait Persetujuan Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (Digital Economy Framework Agreement (DEFA))**

ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merupakan kerangka perjanjian ekonomi digital yang dilakukan oleh ASEAN dan menjadi salah satu agenda transformasi digital ASEAN. Melalui *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) negara ASEAN memperkuat integrasi dan transformasi digital regional menuju pendekatan yang koheren, selaras, dan berbasis aturan untuk kerja sama ASEAN dalam ekosistem digital.

- **Penandatanganan Perjanjian Protokol Kedua Perubahan Kerangka the ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area**

2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area/2nd Protocol AANZFTA telah ditandatangani pada 21 Agustus 2023 di Semarang oleh Menteri Perdagangan RI bersama dengan Menteri Ekonomi Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru di sela-sela rangkaian Pertemuan ke-55 para Menteri Ekonomi ASEAN (*55th ASEAN Economic Ministers'/AEM Meeting*). Sedangkan Menteri Perdagangan dari Kamboja dan Laos telah menandatangani di bulan Desember 2023 dan Menteri Ekonomi ASEAN lainnya akan menandatangani protokol ini secara *ad-referendum/bergantian*.



- **Pengesahan Deklarasi Menteri terkait Kerangka Kerja Inisiatif Industri Berbasis Proyek di ASEAN**

Deklarasi telah disahkan pada pertemuan AECC ke-23 pada 3 September 2023 dan ASEAN telah mengadopsi Deklarasi Menteri untuk Inisiatif Berbasis Proyek Industri di ASEAN tersebut. Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi dengan K/L terkait untuk membahas urgensi pembentukan *task force*/WG khusus untuk implementasinya serta mengidentifikasi *pilot project* yang akan dilakukan pada tahun 2024.

- **Pengesahan Kerangka Acuan Kerja Pembentukan Unit Pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN**

Sebagai tindak lanjut pengesahan *Term of Reference* (ToR) Pembentukan RSU, dokumen *Governance and Structure* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ToR RSU telah berhasil difinalisasi pada pertemuan *RCEP Joint Committee* ke-5 pada bulan November 2023.

- **Implementasi Secara Penuh Surat Keterangan Asal Elektronik di ASEAN melalui ASEAN Single Window (ASW) pada 1 Januari 2024**

Melalui implementasi ini diharapkan (i) mengurangi waktu dan biaya menjalankan bisnis di wilayah tersebut; (ii) meminimalkan jumlah Formulir D palsu yang diserahkan kepada otoritas pabean, yang dapat membatasi permintaan verifikasi dari pengimpor AMS; (iii) kemudahan pemrosesan data; (iv) menciptakan ekosistem perdagangan yang terkendali dan digital, khususnya terkait dengan FTA yang juga berpotensi untuk dihubungkan dengan *platform* data lain untuk pengelolaan dan pemantauan FTA yang terintegrasi; (v) meningkatkan tingkat pemanfaatan e-Formulir D.

- **Pengesahan Peta Jalan Harmonisasi Standar untuk Mendukung Implementasi dari Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan dari penyusunan peta jalan harmonisasi standar adalah (i) mengembangkan peta jalan untuk mendukung implementasi SDGs yang berkontribusi di kawasan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan di seluruh ASEAN; (ii) memberikan panduan bagi *Working Group* dan *Product Working Group* di bawah *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality* (ACCSQ) untuk mengharmonisasi standar yang mendukung pencapaian SDGs 2030.



Perjanjian Perdagangan yang Sudah Implementasi

Selain perjanjian perdagangan tersebut di atas, Indonesia juga memiliki perjanjian perdagangan yang telah implementasi dan terus ditingkatkan utilitasnya pada tahun 2022 dan 2023 yaitu:

- Indonesia–Australia CEPA
- Indonesia–EFTA CEPA
- Indonesia–Mozambique PTA
- Indonesia–Pakistan PTA
- Indonesia–Japan EPA
- MoU Undonesia–Palestine
- ASEAN Trade in Goods (ATIGA)
- ASEAN–Australia–New Zealand FTA (AANZFTA)
- ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA)
- ASEAN–Korea FTA (AKFTA)
- ASEAN–China FTA (ACFTA)
- ASEAN–Hong Kong, China FTA
- ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

Akselerasi Peningkatan Pemanfaatan FTA

Terobosan lain dalam membangun infrastruktur peningkatan ekspor nasional adalah membangun pusat-pusat ekspor (*export center*) di berbagai daerah. Export Center merupakan pengembangan fungsi dari FTA.

1. Export Center Makassar merupakan pengembangan fungsi dari FTA Center Makassar yang awalnya berfokus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana meningkatkan ekspor melalui pemanfaatan perjanjian kerjasama internasional baik dalam bentuk PTA, FTA, maupun CEPA; serta hambatan atau advokasi terhadap kasus eksportir dalam melakukan ekspor ke negara mitra perjanjian perdagangan internasional Indonesia. Sementara layanan Export Center Makassar dikembangkan secara komprehensif terkait dengan aktivitas pengembangan ekspor.

Export Center Makassar, mulai beroperasi pada bulan April 2023 dengan memberikan ‘*One stop service*’ (konsultasi ekspor, penyampaian informasi pasar, atau membantu eksportir terhadap kasus yang dialami); pemanfaatan ekspor ke negara mitra perjanjian perdagangan internasional melalui pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) barang; utilisasi Inaexport; *business matching*; serta penyampaian *Inquiry* kepada pelaku usaha.





6

Sukses Bangun "Jalan Tol" (Toll Way) Perdagangan

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada calon pengguna layanan/jasa serta membangun kerjasama dengan instansi pemangku kepentingan pengembangan ekspor dalam bentuk keterpaduan konsultasi ekspor. Sosialisasi lainnya adalah membangun komunikasi virtual dengan klien FTA Center Makassar serta meng-*update* media sosial FTA Center Makassar menjadi media sosial Export Center Makassar (WhatsApp Group dan YouTube).

Pada periode kerja Export Center Makassar yaitu April hingga Desember 2023, beberapa hal yang menjadi catatan untuk dilakukan 347 pengembangan frekuensi pelayanan pada periode atau masa berikutnya, yakni:

- Layanan *one stop service*, optimalisasi publikasi layanan virtual Export Center Makassar, meningkatkan kolaborasi dengan instansi pemangku antara lain dengan Bea Cukai Makassar melalui program Export Assistance, Bank Mandiri melalui Rumah Ekspor Mandiri, Bank BRI melalui Rumah Kreatif BRI, Bank Sulselbar melalui program Devisa, ex-Balai Karantina Pertanian melalui Klinik Ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Klinik Ekspor Sulteng, ex-Balai Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu, Bank Indonesia Makassar melalui kegiatan Anging Mamiri Business Forum.
- Optimalisasi hubungan dengan perwakilan dagang Indonesia guna meningkatkan layanan penyampaian informasi perdagangan, pelayanan penyampaian *inquiry*, dan *business matching*.

- Peningkatan layanan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional berupa peningkatan pemanfaatan SKA barang, melalui pelayanan pemahaman manfaat preferensi SKA.

Implikasi terhadap kolaborasi tersebut telah mencapai target nilai ekspor sebesar USD. 2.701.415,28.

Jumlah pengusaha yang telah menikmati layanan Export Center Makassar sebanyak 243, dimana sebanyak 169 telah memiliki badan usaha dan 74 belum memiliki badan usaha atau calon pengusaha. Pelayanan Export Center Makassar juga telah menjangkau di berbagai wilayah di Indonesia, yakni sebanyak 158 berasal dari Sulawesi Selatan dan 85 dari luar wilayah Sulawesi Selatan.



Pelayanan di luar kota Makassar dilakukan melalui Zoom dan WhatsApp, rinciannya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

No	Daerah/wilayah	Jumlah Pengusaha
1	Makassar	114
2	Bantaeng	1
3	Bone	4
4	Bulukumba	3
5	Enrekang	2
6	Gowa	4
7	Jeneponto	3
8	LuwuTimur	2
9	Luwu Utara	1
10	Maros	6
11	Palopo	1
12	Pangkep	4
13	Parepare	4
14	Pinrang	1
15	Selayar	1
16	Sidrap	2
17	Sinjai	1
18	Takalar	2
19	Toraja	1
20	Toraja Utara	1
Jumlah di Sulawesi Selatan		158

No	Daerah/wilayah	Jumlah Pengusaha
21	Aceh	2
22	Sumatra Utara	2
23	Sumatra Se latan	1
24	Riau	2
25	Jambi	1
26	Lampung	2
27	Kalimantan Barat	1
26	Kalimantan Timur	6
29	Kalimantan Selatan	3
30	Kalimantan Tengah	1
31	Kalimantan Utara	2
32	Banten	3
33	DKI Jakarta	5
34	Jawa Barat	3
35	Jawa Tengah	3
36	Jawa Timur	9
37	Bali	4
38	NTT	2
39	Gorontalo	6
40	Sulawesi Barat	8
41	Sulawesi Tengah	10
42	Sulawesi Utara	3
43	Sulawesi Tenggara	3
44	Maluku Utara	1
45	Papua Tengah	1
46	Papua Selatan	1
Jumlah di daerah lainnya		85
Total Klien		243





2. **Export Center Surabaya** telah terlaksana hingga akhir termin 3 bulan Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut,

- **Outcome pertama**, yang didasarkan pada target layanan *one stop service*. Hingga akhir Desember 2023, Export Center Surabaya telah tercapai 1.141 kali atau tercapai sebesar **114,1 persen** dari target *outcome* sebesar 1.000 layanan. Capaian nilai ekspor eksportir binaan Export Center Surabaya pada akhir Desember 2023 sebesar **USD81,532,494** dari target sebesar **USD80,000,000**.
- **Outcome kedua**, Export Center Surabaya mendapatkan tugas untuk meningkatkan **jumlah dan kualitas data** pelaku ekspor sebagai database informasi dan promosi Kementerian Perdagangan. Hingga akhir Desember 2023 terdapat **500** pelaku usaha yang diverifikasi dan di-*update* oleh Export Center Surabaya.
- **Outcome ketiga**. Kelembagaan Export Center Surabaya memiliki peranan untuk menyediakan informasi terkait hasil perundingan perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini untuk menunjang kenaikan nilai ekspor menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) *preferred tariff* yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Jawa Timur sebesar 5 persen dari tahun 2022 sampai 2023.



Pembelajaran Kesuksesan IUAE CEPA

USD
2,45
miliar

Ekspor non
migas ke UEA
(Januari
November 2023)

Terjadi peningkatan nilai ekspor ke negara Uni Emirat Arab (UEA) pasca implementasi IUAE CEPA pada tanggal 1 September 2023. Secara kumulatif Januari—November 2023, ekspor non migas ke UEA juga mengalami peningkatan sebesar 16,59 persen YoY menjadi USD2,45 Miliar. Produk utama ekspor Indonesia ke UEA adalah logam mulia dan perhiasan/permata, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewani/nabati.

Perkembangan Ekspor Nonmigas Indonesia ke UAE, 2023
(USD juta)



Sumber: BPS (2023) diolah oleh Badan kebijakan Perdagangan
Ket: * Angka sementara November 2023



Buka Pasar Baru dan Promosi Perdagangan

Indonesia menjalin beberapa perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan efektivitas perdagangan Indonesia di tengah perlambatan ekonomi.

Implementasi 2023 ✓

1. Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).
2. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
3. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Selesai 2023 ✓

1. Protokol Pertama Perubahan ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA).
2. Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Ditandatangani 2023 ✓

1. Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (PTA)
2. Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA).
3. International Coffee Agreement (ICA) 2022.
4. Protokol Kedua Perubahan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).



Keketuaan
Indonesia
pada
ASEAN 2023



7 Prioritas Ekonomi ASEAN

Capaian penting dalam di bidang ekonomi, khususnya perdagangan.









7

Sukses Misi Dagang & Trade Expo Indonesia

“Angin sejuk menghampiri jantung perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Kabar baik datang dari kinerja promosi dan transaksi perdagangan produk Indonesia di luar negeri. Di era Mendag Zulhas, misi dagang internasional berhasil meraih cerita sukses.”



Banyak kesuksesan diraih Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selama memimpin Kementerian Perdagangan. Di bidang ekspor, Kemendag memiliki program misi dagang ke luar negeri. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah *business matching*. Mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha di luar negeri untuk melakukan transaksi. Ia memimpin langsung misi dagang ke beberapa negara dan hasilnya sangat spektakuler.



7

Sukses
Misi Dagang &
Trade Expo Indonesia

Banyak negara menjadi sasaran misi dagang. Beberapa di antaranya langsung dipimpin Mendag Zulhas. Pada awal Januari 2023, Mendag Zulhas memimpin langsung misi dagang ke Arab Saudi. Hasilnya cukup membanggakan karena berhasil menjalin kontrak kerja sama senilai USD155,7 juta atau senilai Rp2,3 triliun. Pertengahan Mei 2023, Mendag Zulhas memimpin misi dagang ke Mesir. Misi dagang ini sukses membukukan nilai transaksi sebesar USD859,08 juta atau senilai Rp12,8 triliun. “Misi dagang merupakan komitmen Kemendag untuk terus melakukan promosi ke pasar-pasar tujuan ekspor nontradisional dan akan terus kita dorong di tahun mendatang,” tegas Mendag Zulhas.



Misi Dagang ke Arab Saudi

Di awal tahun 2023, Misi Dagang Indonesia ke Arab Saudi berjalan sukses. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyaksikan secara langsung penandatanganan 8 kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dengan 5 pelaku usaha Arab Saudi. Penandatanganan terdiri atas kontrak dagang, perjanjian kerja sama, dan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor *Federation Saudi Chamber* di Jeddah, Arab Saudi.

“Saya menyambut baik penandatanganan kontrak dagang, perjanjian kerja sama, dan MoU antara pelaku usaha Indonesia dengan Arab Saudi. Diharapkan kerja sama ini akan terus berlanjut dengan transaksi dagang yang makin besar dan dengan komoditas yang makin banyak jenisnya,” kata Mendag.

Pada penandatanganan kerja sama tersebut, pelaku usaha Indonesia akan mengekspor sejumlah komoditas ke Arab Saudi berupa bahan pangan, RBD palm olein, minyak goreng, produk ikan dan olahannya, daging, sayuran, dan olahannya, buah-buahan, kakao, beras, rempah-rempah, mi telur, dan arang. Mendag

Zulkifli Hasan juga menyampaikan, dari penandatanganan 8 kerja sama tersebut, terdapat 2 MoU yang dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah. “MoU khusus untuk pemenuhan kebutuhan jamaah haji ditujukan untuk komoditas ikan dan olahannya dalam berbagai kemasan, serta daging dan sayuran dalam berbagai jenis kemasan,” tegas Mendag.

Perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, salah satunya di Arab Saudi siap membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan ekspornya, mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kemendag akan terus berupaya meningkatkan ekspor dan meningkatkan nilai perdagangan, khususnya ke negara mitra dagang strategis

dan nontradisional. Peluang ekspor Indonesia ke Arab Saudi masih sangat terbuka lebar. Untuk itu, Mendag Zulhas mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal sehingga ekspor Indonesia ke Arab Saudi makin meningkat.

Penandatanganan 8 kerja sama ini difasilitasi Kemendag, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Direktur Jenderal Pengembangan





Ekspor Nasional Didi Sumedi, dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono. Pada Januari—November 2022, total perdagangan Indonesia–Arab Saudi mencapai USD7 miliar atau meningkat 45,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD4,8 miliar. Sementara itu, total perdagangan kedua negara pada 2021 mencapai USD5,5 miliar.

Pada akhir Januari 2023, Mendag Zulhas kembali ke Arab Saudi untuk melaksanakan misi dagang kembali. Salah satu agendanya membuka ritel modern untuk memasarkan produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia. “Pada misi dagang ini, kami meninjau peluang untuk membuka ritel modern Indonesia di Madinah, Mekah, dan Jeddah oleh para pelaku usaha Indonesia,” tegas Mendag.

Dengan adanya gerai modern di Arab Saudi, upaya pelaku UKM untuk memasarkan produknya akan makin mudah. Ini tentunya juga akan mendorong kinerja ekspor nasional. Apalagi kunjungan warga negara Indonesia (WNI) ke Arab Saudi terus mengalami peningkatan. Saat ini kunjungan WNI ke Arab Saudi tercatat sekitar dua juta orang dan diperkirakan beberapa tahun mendatang akan meningkat menjadi lima juta orang. Ini merupakan pasar yang sangat besar yang harus dapat dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, kami terus berupaya agar hubungan dagang dapat terus ditingkatkan.

Misi dagang ke Arab Saudi merupakan salah satu bagian dari program pengembangan pasar baru, khususnya pasar ekspor nontradisional. Misi dagang ini merupakan kelanjutan misi dagang ke pasar nontradisional yang sebelumnya dilakukan di Uni Emirat Arab dan India. Setelah Arab Saudi,



juga dilakukan misi dagang ke Eropa Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Amerika Latin. Jika ingin menjadi negara maju 2045, Indonesia memang harus agresif menguasai perdagangan di berbagai belahan dunia. “Kalau kita tidak masuk sekarang tentu kita akan terlambat,” Mendag Zulhas optimistis.

Dalam misi dagang ini juga dilakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Kerajaan Arab Saudi Majid Bin Abdullah Al Qasabi, pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arab Saudi, pertemuan dengan Otoritas Pangan dan Obat-obatan (SFDA) Arab Saudi, serta pertemuan dengan Dewan Kerja Sama bagi negara Arab di Teluk (GCC). Kegiatan lainnya hadir dalam forum bisnis Indonesia –Arab Saudi dan peninjauan kesepakatan dagang (*business matching*) yang dihadiri oleh pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, sekaligus menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi di Riyadh.

Sebanyak 24 pelaku usaha turut serta pada misi dagang ke Arab Saudi. Pelaku usaha tersebut terdiri atas sektor produk makanan dan minuman, perawatan tubuh dan kulit, arang, resin, dan aneka produk lainnya. Selain pelaku usaha, misi dagang juga diikuti asosiasi pelaku usaha di antaranya Kadin Indonesia, Aspirasi Pengusaha Kreatif Indonesia (APKI), dan Kamar Entrepreneur Indonesia (Keind).

Mendag Zulhas sangat bangga dengan pencapaian misi dagang di Arab Saudi ini. Sebagai sesama negara muslim, Indonesia dan Arab Saudi bias melanjutkan banyak kerja sama perdagangan yang jauh lebih besar. Perdagangan RI-Arab Saudi naik pada periode Januari–November 2022, tercatat sebesar USD7 miliar, naik 45,42 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD4,82 miliar. Pada periode ini, ekspor Indonesia ke Arab Saudi tercatat sebesar USD1,84 miliar dengan ekspor migas sebesar USD200 ribu dan sisanya merupakan ekspor nonmigas. Sedangkan impor Indonesia dari Arab Saudi tercatat sebesar USD5,17 miliar yang terdiri atas impor migas sebesar USD4,33 miliar dan impor nonmigas sebesar USD842,30 juta.

Arab Saudi merupakan negara tujuan ekspor peringkat ke-24 bagi Indonesia. Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi di antaranya kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit dan turunannya, perhiasan, produk kertas, serta produk tekstil. Sedangkan impor utama Indonesia dari Arab Saudi di antaranya minyak mentah, bahan bakar gas, minyak bumi, besi, dan alkohol asiklik.



Misi Dagang ke Mesir .

Menteri perdagangan Zulkifli Hasan juga sukses memimpin misi dagang ke Mesir. Sejumlah nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) berhasil ditandatangani dengan potensi transaksi sebesar Rp12,88 triliun. Capaian ini berasal dari penandatanganan MoU antara pebisnis kedua negara, MoU imbal dagang, serta penjajakan kesepakatan dagang (*business matching*).

Misi dagang ke Mesir kali ini berhasil mencatat potensi transaksi sebesar Rp12,88 triliun yang meliputi berbagai produk utama/unggulan Indonesia. Transaksi ini masih berpeluang untuk bertambah. Hal ini mengingat para pelaku usaha masih menindaklanjuti permintaan dari calon mitra dagang yang telah dipertemukan dalam penjajakan kesepakatan dagang. Capaian ini merupakan momentum Indonesia untuk terus fokus menggarap pasar nontradisional, khususnya di kawasan Afrika. Kegiatan misi dagang Mesir ini dihelat pada awal Mei 2023 dan diikuti 12 pelaku usaha Indonesia, termasuk perwakilan dari Kadin dan *Indonesia Egypt Business Council* (IEBC) dan menghadirkan 120 pelaku usaha Mesir.

Dalam kesempatan berbeda, Mendag Zulhas juga kembali ke Mesir. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengusaha Indonesia dan Mesir. Di tengah tekanan perekonomian global, kerjasama perdagangan antarkedua negara sangat dibutuhkan agar dapat menyejahterakan masyarakat kedua negara.

Mendag Zulhas melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Mesir dengan mengunjungi perusahaan importir kopi dari Mesir, Zahret El Bon ElBrazili Co pada Selasa (16/5/2023) di Kairo, Mesir. Ketua Divisi KADIN Mesir Hassan Fawzy, yang juga merupakan pemilik Zahret El Bon El Brazili Co dan manajer perusahaan Amr Hassan Fauzy berkesempatan hadir di acara ini. "Saya mengapresiasi importir Zahret El Bon El Brazili Co yang setia menjadi mitra kerja sama dengan perusahaan kopi Indonesia dan telah terjalin cukup lama. Saya berharap hubungan yang lebih hangat antara kedua negara dapat terealisasi sesuai target, demi kemakmuran rakyat di negara masing-masing. Apabila menemui kendala, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Atase Perdagangan RI di Kairo siap membantu," katanya.





Biro Humas Kemendag

Kebutuhan kopi yang sangat tinggi di Mesir khususnya kopi robusta menjadikan Mesir pasar yang sangat potensial bagi eksportir Indonesia. Mesir adalah pasar terbesar kedua tujuan ekspor kopi Indonesia ke pasar global. Pada 2022, ekspor kopi Indonesia ke Mesir tercatat sebesar USD82 juta dengan tren pertumbuhan 12,12 persen dalam lima tahun terakhir (2018—2022). Mesir, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, merupakan mitra dagang istimewa bagi Indonesia karena merupakan negara pertama di jazirah Arab yang mengakui kedaulatan Indonesia. Selain itu, jumlah diaspora yang bermukim di Mesir juga cukup banyak, yaitu sekitar 13.000 orang. “Untuk itu, hubungan baik antara kedua negara yang sudah terjalin selama lebih dari tujuh dekade ini perlu dibina dan

dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya.

Pemilik Zahret El Bon El Brazili Co, Hassan Fawzy menyampaikan, perusahaannya memproduksi 100.000 ton kopi per tahun yang 70 persennya berasal dari Indonesia. Biji kopi robusta yang diproses merupakan biji kopi yang di antaranya berasal dari Lampung, Jember, Temanggung, dan Gayo. Kunjungan ke Pabrik Indomie di Mesir sebelumnya, pada Senin (15/5), Mendag Zulkifli Hasan juga mengunjungi salah satu pabrik Indomie di Kairo di bawah perusahaan Salim Wazaran Abu Alata Ltd.

Pada kunjungan tersebut, Mendag Zulhas bertemu dengan pimpinan pabrik Indomie di Mesir, antara lain General Manager Imri Yahya, General Manager Transworld Mugetaba Abusabeeb, Direktur Manufaktur Salim Wazaran Group, Arif Subowo dan Wakil CEO Ahmad Muafi hadir dalam acara Duta Besar RI untuk Mesir, Lutfi Rauf dan pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia.

Kemendag siap memfasilitasi pebisnis Indonesia yang berpotensi membangun pabrik atau kantor cabang di luar negeri, khususnya Mesir. Salah satunya seperti yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur yang mendirikan pabrik di Mesir. Langkah tersebut diharapkan akan makin memperkuat pencitraan produk (*branding*) Indonesia sebagai pusat komoditas primer serta makanan olahan dunia di dunia.



7

Sukses Misi Dagang & Trade Expo Indonesia



“Kemendag tidak hanya berkomitmen mendukung pelaku usaha untuk mengeksport produknya dari Indonesia ke pasar global, tetapi juga siap memfasilitasi pebisnis dalam mendirikan pabrik atau kantor cabang di luar negeri. Dengan mendirikan pabrik di Mesir diharapkan akan memperkuat *branding* yang nantinya akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam mempromosi produk-produk kuliner Indonesia lainnya di pasar global,” tegas Mendag Zulhas.

Kunjungan ke perusahaan importir Mesir dan eksportir Indonesia merupakan agenda penting dari rangkaian kegiatan misi dagang yang dilaksanakan Kemendag. Misi dagang ini merupakan wujud nyata komitmen Kemendag dalam mendorong pertumbuhan kinerja ekspor nonmigas nasional, termasuk makanan olahan dan bahan pangan lainnya.

Indonesia akan menjadi salah satu negara tujuan utama para *buyer* dalam mengidentifikasi pemasok produk-produk primer dan makanan olahan yang terpercaya sebagai mitra dagang. Keunggulan produk makanan Indonesia yang dapat mendongkrak nilai jualnya di mata *buyer* salah satunya adalah kehalalannya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, konsep halal produk Indonesia sudah tidak diragukan masyarakat Mesir.

Mesir merupakan hub perdagangan atau pintu masuk perdagangan ke negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara sehingga peluang pasar yang tersedia pun bertambah luas. Ia berharap, produsen makanan dan bahan pangan dari Indonesia dapat mencermati dan memanfaatkan potensi pasar tersebut. Terlebih dengan telah ditandatanganinya Joint Trade Commission (JTC) antara Indonesia dan Mesir. Melalui JTC, peluang eksportir Indonesia untuk merambah pasar Mesir dan sekitarnya makin terbuka. “Jadi, silakan dimanfaatkan peluang beserta kesempatan yang ada. Jangan ragu untuk menghubungi kami di Kemendag atau menghubungi pihak KADIN maupun *business council* di kedua negara,” terang Mendag Zulhas.

Pada 2022, populasi Mesir tercatat hampir 110 juta jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut, peluang pasar makanan dan minuman Indonesia sangat besar untuk memenuhi kebutuhan Mesir terhadap pangan. Indonesia bisa

memanfaatkan peluang tersebut didukung dengan sumber daya alam yang melimpah.

Wakil CEO Salim Wazaran Group Ahmad Muafi menyampaikan, Indomie saat ini memiliki dua pabrik di Mesir. Pabrik tersebut dibangun pada 2009 dan 2020 dengan total 12 lini produksi yang memproduksi 160 juta bungkus Indomie per bulan. “Ke depannya, Indomie berencana membangun pabrik ketiga di Mesir,” ujar Ahmad.



Pada Januari–Maret 2023, perdagangan kedua negara telah mencapai USD432,90 juta. Pada periode tersebut, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar USD379,40 juta dan impor senilai USD53,50 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD325,80 juta. Berdasarkan data terbaru, komoditas ekspor utama dari Indonesia ke Mesir, yaitu *crude palm oil* (CPO) dan turunannya, kopi, benang dari serat *staple artfisia*, kayu dan barang dari kayu, kertas, bahan kimia organik, makanan olahan, serta karet dan barang dari karet.

Mesir memang negara tujuan ekspor yang menarik. Negeri Cleopatra itu akan menjadi pasar menjanjikan bagi Indonesia. Saat ini, total perdagangan tahun 2022 sebesar USD1,57 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Mesir sebesar USD1,34 miliar dan impor Indonesia dari Mesir sebesar USD0,23 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD1,11 miliar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2022), perdagangan kedua negara menunjukkan tren positif 11,21 persen.

Mendag Zulhas mengajak para pelaku usaha Indonesia dan Mesir untuk terus berkolaborasi. Diharapkan kunjungan kerja kali ini memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan bisnis para pelaku usaha Indonesia di kancah global, khususnya Mesir.

“Mari berkolaborasi demi peningkatan nilai perdagangan kedua negara, sekaligus mendorong ekspor nonmigas Indonesia ke Mesir,” ujar Mendag.



Berkibar di Arena Trade Expo Indonesia

Selain Misi Dagang, Mendag Zulhas memperhatikan perhelatan promosi internasional yang dihelat Kementerian Perdagangan saban tahun yaitu *Trade Expo Indonesia* (TEI). Digelar di *International Convention Exhibition Bumi Serpong Damai* (ICE BSD), Tangerang, Banten, 18 Oktober—18 Desember 2023, TEI yang memasuki usia ke-38 ini benar-benar sukses melampaui target USD11 miliar. Ekspo kebanggaan Indonesia ini berhasil membukukan total transaksi USD30,5 miliar atau senilai Rp472,8 triliun.

Selama TEI 2023 berlangsung, terdapat 3 (tiga) negara dengan total nilai transaksi tertinggi mencapai 63,90 persen dari total transaksi TEI secara keseluruhan. Negara-negara tersebut yaitu India dengan total USD7,58 miliar, Malaysia USD6,32 miliar, dan Tiongkok senilai USD5,59 miliar. Negara lainnya yang juga cukup tinggi transaksinya adalah Vietnam sebesar USD811,28 juta, Belanda sebesar USD696,28 juta, Mesir sebesar USD591,72 juta, Filipina sebesar USD526,95 juta, Amerika Serikat sebesar USD423,7 juta, Jepang sebesar USD330,89 juta, serta Persatuan Emirat Arab sebesar USD295,84 juta.

TEI diikuti 1.232 pelaku bisnis. Dari segi pengunjung, TEI 2023 telah dihadiri sebanyak 38,9 ribu pengunjung, sebanyak 33 ribu orang dari 116 negara hadir secara luring dan 5,6 ribu orang dari 46 negara hadir secara daring.





Yang menjadi pusat perhatian lainnya adalah 10 produk dengan transaksi terbesar selama TEI 2023. Batu bara masih menjadi magnet negara-negara di dunia dengan transaksi sebesar USD13,26 miliar dengan persentase 58,93 persen, produk kimia dan organik sebesar USD2,92 miliar (12,98 persen), industri strategis sebesar USD2,73 miliar (12,18 persen), produk elektronik sebesar USD612,32 juta (2,72 persen), makanan olahan sebesar USD449,88 juta (2,00 persen), produk pertanian sebesar USD407,43 juta (1,81 persen), kertas dan produk kertas sebesar USD382,85 juta (1,70 persen), kopi dan teh sebesar USD370,39 juta (1,65 persen), perhiasan sebesar USD280,44 juta (1,25 persen), serta produk ikan dan makanan laut sebesar USD164,19 juta (0,73 persen).





7

Sukses
Misi Dagang &
Trade Expo Indonesia

Gemerlap Transaksi Fashion Muslim

Arena TEI 2023 makin gemerlap ketika dihadirkan gelaran *Jakarta Muslim Fashion Week (JMF)* 2024 yang digelar 19-21 Oktober 2023. Pada ajang tahun ini, JMF berhasil mencatatkan transaksi sebesar USD20,1 juta atau setara Rp330 miliar. “Ini membuktikan bahwa produk muslim fesyen kita diminati oleh pasar internasional. Ekosistemnya harus kita jaga. Jangan sampai dibanjiri barang-barang impor ilegal yang akan mematikan industri dalam negeri,” pesan Mendag Zulhas.

Indonesia ingin mengukuhkan posisinya sebagai barometer fesyen muslim dunia. Dengan mengambil tema “*Discover Indonesian Modest Fashion Excellence*”, JMF terbukti dibanjiri pengunjung dalam dan luar negeri. JMF merupakan ajang untuk menampilkan fesyen muslim (*modest fashion*) terbaik di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi tren *modest fashion* muslim dunia.

“Kami ingin mengajak seluruh pihak dan tentunya *buyer* internasional untuk melihat secara langsung *modest fashion* Indonesia yang luar biasa, baik dari sisi desain, keragaman corak, serta warna dan budaya. JMF merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan *modest fashion* Indonesia di kancah global,” kata Mendag Zulhas.

JMF 2024 dapat menjadikan Indonesia sebagai barometer dan penentu tren (*trend setter*) *modest fashion* dunia. Harapan lainnya, JMF menjadi ajang jejaring kerja sama antara industri *modest fashion* dengan industri terkait di dalam dan luar negeri, serta tentunya dengan *buyer* internasional. Visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu barometer *modest fashion* dunia dapat dicapai lebih cepat jika dilakukan bersama-sama dan didukung oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kemendag juga menggandeng Kementerian Pariwisata dan





Ekonomi Kreatif; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; pelaku usaha; akademisi, serta media untuk berkolaborasi.

Bagi Mendag Zulhas, produk modest fashion merupakan salah satu sektor industri yang menjadi fokus pemerintah untuk didorong ekspor dan penguatan industrinya. Pada 2022, produk modest fashion menyumbang 3,5 persen terhadap ekspor nonmigas Indonesia. Di tahun tersebut, ekspor produk modest fashion Indonesia tumbuh 12,6 persen dibanding tahun 2021. Tren ekspor produk *modest fashion* selama lima tahun terakhir (2018—2022) juga tercatat positif 2,6 persen. Selain itu, konsumsi *modest fashion* dunia diproyeksikan meningkat 6,1 persen dalam lima tahun hingga mencapai USD375 miliar pada 2025.

Untuk meraih peluang ekspor *modest fashion* Indonesia ke pasar global, Kemendag menggagas pelaksanaan JMF^W sejak 2021. Hal ini merupakan wadah untuk mempromosikan modest fashion Indonesia dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan di sektor *modest fashion*. “Saya optimis, dengan segala upaya yang kita lakukan bersama-sama ditunjang dengan potensi keragaman budaya, kearifan lokal, serta sumber daya manusia yang dimiliki, *modest fashion* Indonesia tidak hanya mampu menginspirasi dunia, tetapi juga dapat menguasai pasar global,” harap Mendag Zulhas.



Untuk memajukan JMF^W dan menjadikan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia, pesan Mendag Zulhas sangat jelas. “Kata kuncinya kerja sama semua pihak. Kepala daerah, duta besar yang mendatangkan *buyer*, sponsor, serta yang sangat membanggakan yaitu desainer muda Indonesia. Pemerintah harus hadir dan mendukung karena kita punya potensi sangat besar. Indonesia bisa menjadi pusat fesyen muslim dunia asal mau,” ujar Mendag Zulhas.



Pemerintah terus hadir dengan berbagai kebijakan yang mendukung. Misalnya, mulai menata barang dari luar negeri dengan mengembalikan aturan impor dari *post border* ke *border* serta dengan memberantas produk ilegal. Kolaborasi dengan dunia perbankan dan industri juga harus dilakukan dan saling mendukung. Artinya, ekosistem dibangun bersama-sama. “Kita selalu berusaha keras memfasilitasi para desainer muda ke tingkat dunia. Kemendag sebelumnya telah mengikutkan desainer Indonesia pada ajang *New York Fashion Week*, *London Fashion Week*, dan ajang (fesyen) di beberapa negara,” Mendag Zulhas meyakinkan.



7

Sukses
Misi Dagang &
Trade Expo Indonesia









by **mustika ratu**

#GLOSSMYWAY



Gelaran JMFW 2024 dimeriahkan parade busana yang menampilkan karya 10 desainer yaitu Lisa Fitria, Danjyo Hiyoji, Kami., Buttonscarves, Nada Puspita, Aldrie, Artkea Bloom, Kursien Karzai, Brilianto, dan Ayu Dyah Andari. Sebelumnya, JMFW 2023 menampilkan 144 desainer/jenama dengan lebih dari 1.000 koleksi. Pelaksanaan JMFW 2023 berhasil membukukan transaksi dagang sekitar Rp206,6 miliar dari 16 negara antara lain Malaysia, Spanyol, Yaman, Portugal, dan Nigeria. Selain itu, JMFW 2023 menghadirkan penampilan menarik di antaranya presentasi tren *modest fashion* oleh Uniqlo, peragaan busana yang menampilkan karya 26 desainer muda dari 10 satuan pendidikan, serta peragaan busana dari jenama nasional. Lebih jauh, tahun lalu JMFW juga menghadirkan *Miss Grand Internasional* yang berasal dari 68 negara untuk memperagakan *modest fashion* karya desainer Indonesia.





7

Sukses
Misi Dagang &
Trade Expo Indonesia



Sejumlah penandatanganan MoU dilaksanakan di acara ini antara Am by Anggiasari dengan Susan Erni Dietch mengenai transaksi *modest fashion* Indonesia di Amerika Serikat. Juga penandatanganan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) antara Amal Sultan dari *L'adresse Paris Agency* dengan 7 jenama Indonesia yakni *IKYK, Arkea, 3Mongkis, Long Story Short, Christin Wu, Aidan and Ice*, serta *BLP Beauty*. Melalui pernyataan bersama ini, Amal Sultan akan membantu melakukan promosi *modest fashion* ke pasar Eropa.



JMFW merupakan ajang yang diinisiasi Kementerian Perdagangan dan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia. Selain fesyen muslim, JMFW menampilkan produk dari industri pendukung lainnya seperti tekstil, kosmetik, perhiasan, aksesoris, dan produk gaya hidup. JMFW juga menghadirkan pameran dagang serta peninjauan bisnis (*business matching*). Selain peragaan busana dari jenama terkenal, JMFW tahun ini memberikan wadah aktualisasi bagi desainer-desainer muda. Termasuk, akademisi melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menampilkan karya dari 37 desainer muda dari 12 satuan pendidikan vokasi.

JMFW juga menjadi saksi lahirnya generasi baru dalam dunia fesyen dengan dilaksanakannya wisuda 20 siswa *Islamic Fashion Institute* serta peragaan busana karya para siswa tersebut. Pelaksanaan JMFW 2024 juga melibatkan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain instansi pemerintah, JMFW bekerja sama dengan pihak swasta sebagai sponsor, yakni Wardah, Mustika Ratu, APR, UBS, Bank Syariah Indonesia, Toyota, Tokopedia, Vivere, dan You-C 1000.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe sangat antusias atas gelaran JMFW ini. Industri *modest fashion* memiliki

efek berganda (*multiplier effect*) dalam memajukan industri lainnya seperti industri kosmetik, obat-obatan, dan jamu. JMFW diharapkan dapat terus digelar setiap tahun. Saat ini *modest fashion* Indonesia menempati peringkat ke-5. Peringkat ini sangat baik dan harus terus ditingkatkan lagi ke depan hingga menjadi nomor wahid di dunia dan menjadi *trend setter* dunia fesyen muslim.

Misi Dagang dan Capaian TEI ke-38 Melampaui Target

Misi dagang dan promosi melalui Trade Expo Indonesia (TEI) berperan dalam promosi ke pasar-pasar tujuan ekspor nontradisional.

Misi dagang ke Arab Saudi menghasilkan kontrak kerja sama senilai

Rp2,3 triliun

atau sebesar
USD 155,7 juta.

Misi dagang ke Mesir menghasilkan kontrak kerja sama senilai

Rp12,8 triliun

atau sebesar
USD 859,08 juta.

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 pada 18 Oktober—18 Desember 2023 menghasilkan transaksi

USD 30,5 miliar.

JM²⁰
FW

Transaksi JMFW 2024 pada 19—21 Oktober 2023

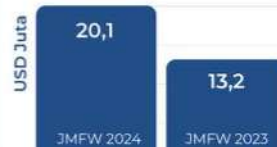
Rp330 miliar

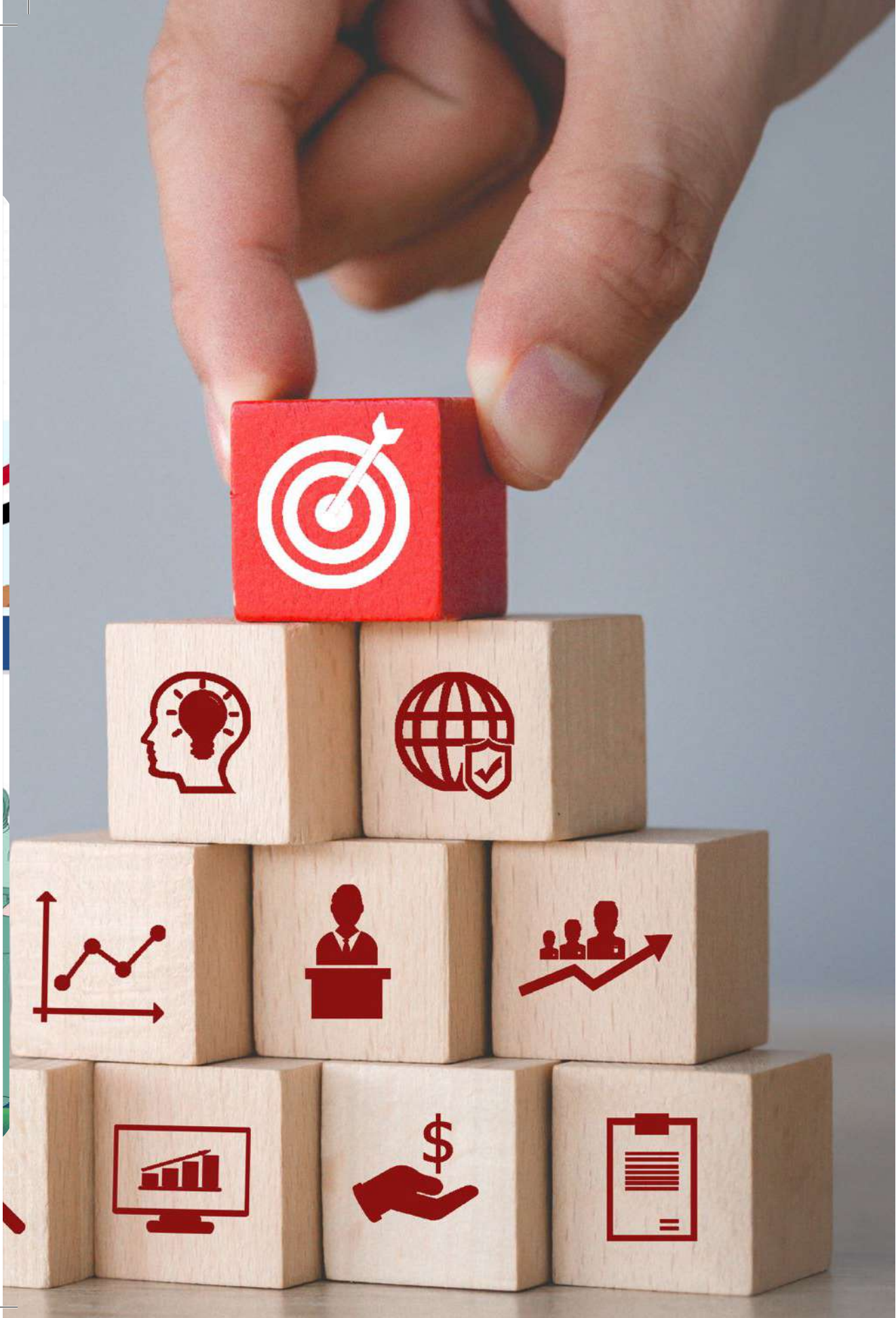
atau setara USD 20,1 juta.

Tiga negara dengan nilai transaksi tertinggi di TEI



Transaksi JMFW naik
34,32%
(YoY)







8

Sukses Perdagangan Digital yang Adil & Sehat

“Pertumbuhan perdagangan digital yang cepat memerlukan kebijakan adaptif. Zulhas dengan jeli menangkap fenomena ini dengan mengeluarkan aturan-aturan yang mendorong transaksi yang adil dan sehat untuk perlindungan konsumen dan produk lokal Indonesia.”



Pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang begitu pesat dan memberikan kontribusi sangat besar. Nilai transaksi di sektor ini mencapai Rp476,3 triliun di sepanjang tahun 2022. Kemudian melesat menjadi Rp533 triliun pada 2023.





8

Sukses Perdagangan Digital yang Adil dan Sehat



Di satu sisi, fenomena ini memberikan kelegaan karena menjadi sektor yang mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pada sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik dapat memukul balik industri dalam negeri.

Memahami kondisi ini, Zulhas, sapaan akrab Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya aturan untuk perdagangan elektronik (*E-Commerce*). Kebijakan itu harus menguntungkan pelaku UMKM dan lokapasar (*marketplace*) agar dapat saling memperkuat satu sama lain dan berkelanjutan.

Dengan begitu, penataan aturan tidak akan merugikan *E-Commerce*, tapi justru memperkuat ekosistem perdagangan elektronik, yang dapat menguntungkan UMKM dan

secara optimal dapat mengembangkan produk-produk buatan Indonesia.

Atas dasar mendukung potensi pertumbuhan *E-Commerce* tersebut, kemudian lahirlah Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Permendag ini merupakan produk penyempurnaan dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang saat ini dinilai kurang relevan menopang ekosistem Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) nasional yang kompetitif. Apalagi, saat ini perkembangan model bisnis PMSE bergerak sangat progresif dan disruptif.



Itulah alasan mendasar perlunya penyempurnaan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 karena banyak indikasi terjadinya praktik perdagangan tidak sehat dan setara yang ditemukan di platform PMSE. Banyak sekali ditemukan jenis barang beredar yang belum memenuhi standar perlindungan konsumen, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar teknis lainnya.

Selain itu, terdapat indikasi praktik perdagangan tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha luar negeri. Pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia.

Revisi Permendag 50/2020 juga dilatarbelakangi kesetaraan dalam persaingan berusaha dan ekosistem PMSE yang belum terwujud serta berkembangnya model bisnis PMSE yang berpotensi mengganggu, yakni dengan memanfaatkan data dan informasi media sosial.

Zulhas memberi contoh, ekosistem teknologi digital pada *marketplace* yang ada di Indonesia, berbeda dampaknya dengan di Tiongkok. Di Negeri Tirai Bambu, pedagang *offline* tidak terganggu dengan adanya platform digital. Sebaliknya, mereka malah mampu mengembangkan pasar baru hingga 50 persen. Berbeda di Indonesia, justru banyak yang mati karena pertumbuhan PMSE. Karenanya, diperlukan aturan perdagangan digital yang adil dan sehat.



8

Sukses Perdagangan
Digital yang Adil
dan Sehat



Aturan Rinci Biar Tertib.



Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diatur secara rinci beberapa hal. Pertama, pendefinisian berbagai model bisnis PPMSE mulai dari Lokapasar (*marketplace*) hingga *Social Commerce*. Melalui pendefinisian, pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya.

Di Permendag ini, *social commerce* didefinisikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (*merchant*) dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

Secara tegas di Permedag ini menyebutkan, *social commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran/promosi barang dan/jasa.

Kedua, kewajiban bagi PPMSE untuk menjaga harga barang dan/atau jasa agar bebas dari praktik manipulasi harga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya.

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, penyelenggara PMSE termasuk *social commerce* wajib memastikan tidak adanya interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana PMSE dengan sistem elektronik yang digunakan di luar sarana PMSE dan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE dan/atau perusahaan yang berafiliasi dalam sistem elektroniknya.

Ketiga, penetapan harga minimum sebesar USD100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang (*merchant*) ke Indonesia melalui platform *E-Commerce*. Selain itu, diatur mengenai ketentuan daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan “langsung” masuk ke Indonesia melalui platform *E-Commerce* yang memfasilitasi perdagangan lintas negara (*cross border*).

Keempat kewajiban bagi pedagang (*merchant*) serta platform *E-Commerce* untuk menayangkan bukti pemenuhan standarisasi barang, antara lain nomor pendaftaran barang atau sertifikat SNI atau persyaratan teknis lain bagi barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI, nomor sertifikat halal bagi barang dan/atau jasa yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Syarat lainnya adalah nomor registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup untuk barang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu, nomor izin, nomor registrasi atau nomor sertifikat untuk produk kosmetik, obat, dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terpenting, Zulhas mengingatkan, *marketplace* dan *social commerce* dilarang bertindak sebagai produsen.

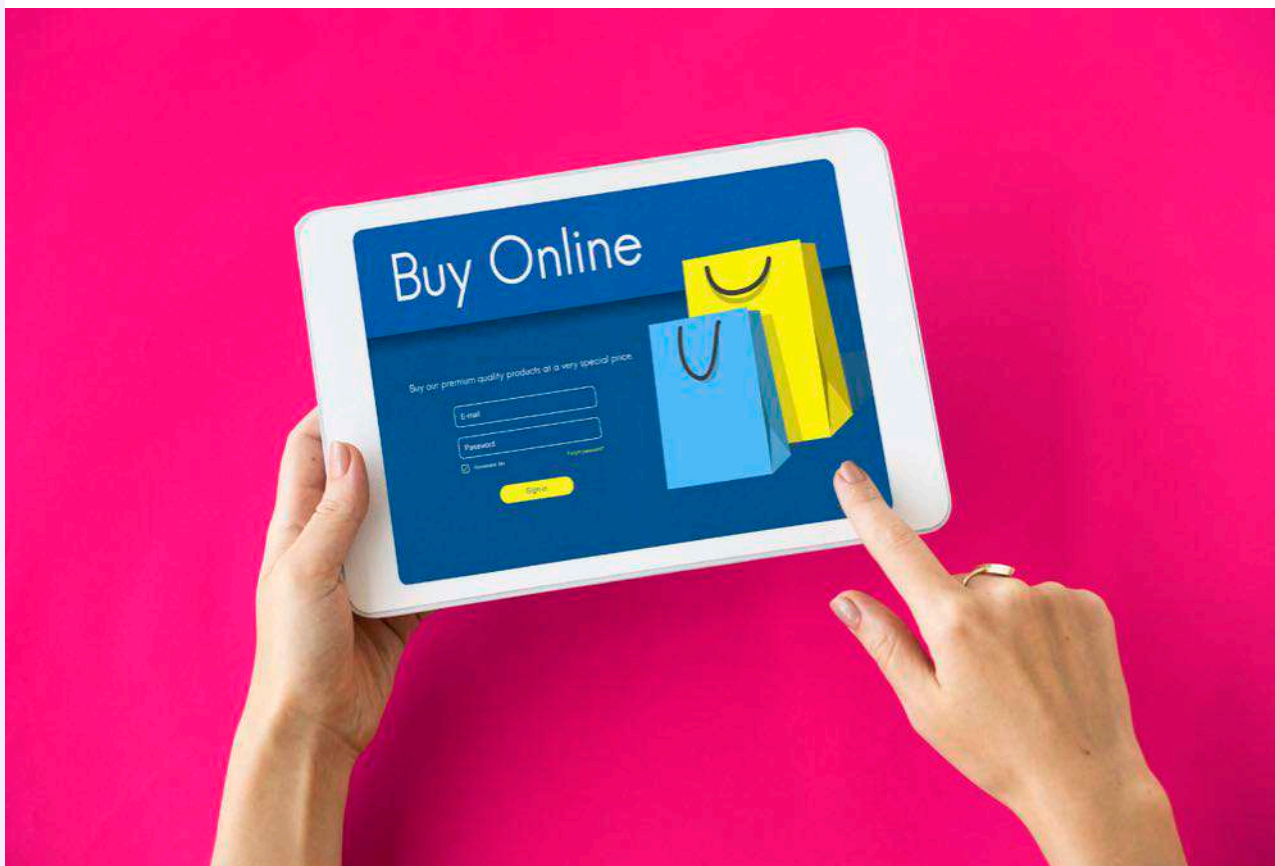
Sebaik apapun kebijakan jika tanpa pengawasan tidak akan berjalan efektif. Maka untuk memastikan implementasi Permendag 31/2023 akan dilakukan pengawasan terhadap sistem elektronik secara terpadu melalui Tim Pengawasan Siber. Tim ini terdiri dari berbagai kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta instansi terkait lainnya.

Zulhas mengingatkan, penyelenggara PMSE termasuk *marketplace* dan *social commerce* yang melanggar aturan, akan diberikan peringatan tertulis tiga kali dalam tenggang waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.

Bila dalam jangka waktu pelaku PMSE tetap tidak melaksanakan kewajiban, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran sementara layanan PMSE oleh instansi terkait yang berwenang.

Namun, seiring dengan itu, Zulhas memastikan, Kementerian Perdagangan terus melakukan sosialisasi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman atas berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendag 31/2023.

Dari sisi pelaku usaha, Zulhas juga mengatakan bakal melakukan pembinaan supaya dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Beberapa kegiatan di antaranya, kegiatan promosi, *event offline* maupun *online*, pelatihan bagi pelaku UMKM. Aktivitas itu dilakukan sinergi bersama seluruh pihak terkait.



Digitalisasi Pasar Rakyat

4.926
pasar

276.486
pedagang

Penerapan
digitalisasi

Kebijakan lain yang dikeluarkan terkait perdagangan digital adalah pemetaan kriteria digitalisasi. Pertama, Digitalisasi Pasar Rakyat, meliputi pemanfaatan lokapasar (*E-Commerce*), pemantauan harga (*e-monitoring* harga), pemanfaatan *website* pasar dan sistem informasi, serta penarikan retribusi secara elektronik (*e-retribusi*),

Kedua, digitalisasi pedagang pasar rakyat, meliputi pemanfaatan *delivery on demand*, pembayaran nontunai, pemanfaatan pemasaran digital (*digital marketing*), dan pemanfaatan layanan pasokan dan logistik barang.

Penerapan digitalisasi Pasar Rakyat dan digitalisasi Pedagang Pasar Rakyat hingga akhir 2023 mencapai total 4.926 Pasar Rakyat dan 276.486 Pedagang Pasar Rakyat.



8

Sukses Perdagangan Digital yang Adil dan Sehat

Untuk mempercepat penerapan digitalisasi pasar UMKM dan pasar rakyat, Kemendag melakukan sejumlah upaya. Di antaranya, melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mendorong penerapan pembayaran nontunai di Pasar Rakyat melalui program QRIS. Digitalisasi pembayaran ini dapat menurunkan *cost of transaction* yang akan berdampak pada pengendalian inflasi di daerah.



Lalu, Kemendag juga menggelar kegiatan fasilitasi penggunaan digital di pasar. Program ini untuk mendorong implementasi pembayaran nontunai, pemasaran komoditas secara digital, dan mendapat pasokan yang lebih efisien kepada 560 pedagang di delapan kabupaten/kota. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pemda dan platform digital seperti GrabMart (memanfaatkan teknologi *delivery on demand*), Dagangan (memanfaatkan teknologi untuk rantai pasok komoditas yang lebih efisien), PosPay (pembayaran nontunai), dan mitra bank nasional maupun daerah untuk penerapan pembayaran retribusi secara elektronik (e-retribusi). Semua kegiatan itu dilakukan di

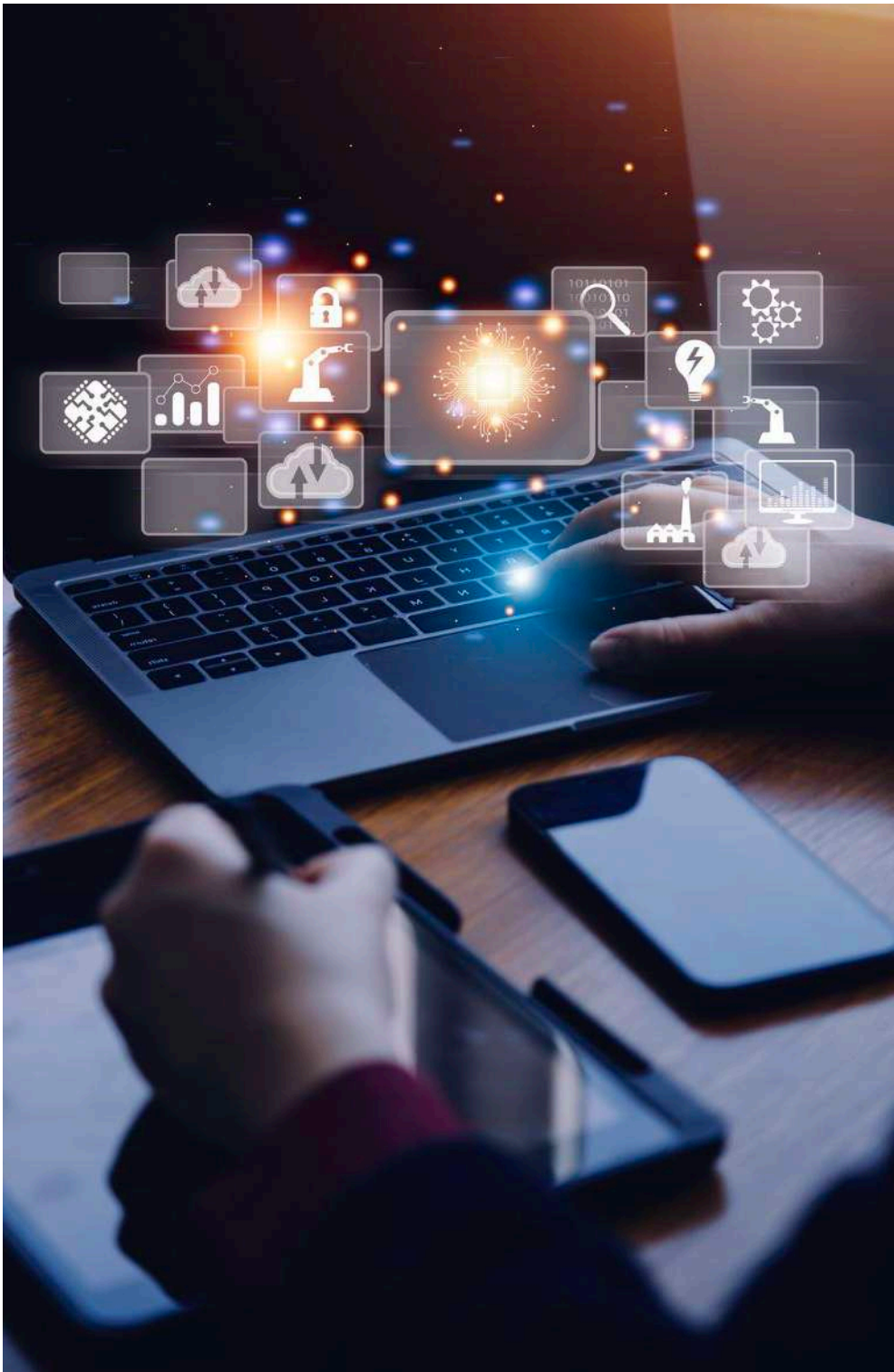
sepanjang 2023.

Kemendag juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) terkait implementasi Program Magang Bersertifikat Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR). Pada program ini mahasiswa dilibatkan untuk program digitalisasi kepada pengelola dan pedagang pasar.

Selanjutnya, Kemendag melakukan koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemendagri terkait Panduan Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP) dan Pengisian Data Pasar Rakyat. Sinergi ini dikuatkan lewat Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 510/1205/Bangda tanggal 1 November 2022.

Dalam aturan ini, pemda diminta untuk menggunakan Sistem Informasi Sarana Perdagangan (SISP) untuk mendata profil dan lokasi Pasar Rakyat. Data ini dapat dioptimalkan untuk pengambilan kebijakan dalam pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa mitra seperti Tokopedia dan Grab Indonesia digandeng untuk berkolaborasi mempercepat penerapan digitalisasi di Pasar Rakyat dan pedagang pasar.

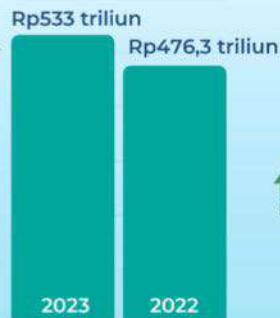


Perdagangan Digital dan Perlindungan Konsumen

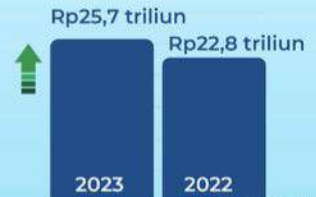
Niaga elektronik (*e-commerce*) menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian.



Nilai transaksi niaga elektronik



Nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)



Indeks IKK 2023 57,04% Kategori "mampu"

Survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 2023



Sepanjang 2023, Kemendag telah mengawasi

1.061
pelaku usaha.



497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan perdagangan.



564 pelaku usaha hasil pengawasan *post-border*.



Shoes



Pants





Harbolnas

Langkah konkret yang dilakukan Kemendag untuk mendukung pertumbuhan *E-Commerce* adalah berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)

Melalui Harbolnas, khususnya dengan berbelanja produk dalam negeri, Zulhas percaya dapat mendorong keberadaan UMKM. Karena itu, ia berharap makin banyak UMKM yang bergabung ke platform niaga elektronik (*E-Commerce*) agar pemasarannya makin luas.



Saat ini, pelaku UMKM sudah mulai banyak yang merambah platform niaga elektronik dan mendapatkan berbagai macam manfaat, terutama pasar yang makin besar. Pelaku UMKM yang bergabung *marketplace* akan berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan seperti pengemasan, peningkatan kualitas, dan pemasaran produk.

Melalui *E-Commerce* pula, produk UMKM Indonesia bisa menembus pasar di manapun. Zulhas berulang kali mengajak UMKM untuk masuk *E-Commerce*. Apalagi, perekonomian Indonesia selama ini ditopang oleh UMKM dengan kontribusi mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Posisi ini membuktikan, UMKM sangat menentukan perekonomian Indonesia.

“Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju,” tukas Zulhas. Harbolnas 2023 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun, meningkat Rp2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022. Penjualan produk lokal menyumbang nilai transaksi sebesar Rp12,3 triliun.

Data menyebutkan kontribusi produk lokal terhadap total penjualan selama Harbolnas mencapai 48,1 persen, atau lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19. Selain itu pertumbuhan jumlah pedagang (*merchant*) yang berdagang melalui platform digital tercatat sebesar 6 persen.

Melihat dampak Harbolnas yang cukup signifikan diperlukan keterlibatan yang lebih besar dari produk-produk lokal. Hal yang perlu dilakukan di antaranya promosi Harbolnas yang lebih masif dengan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha. Perlu pula ditingkatkan pemberdayaan UMKM serta mendorong pemasaran produk dalam negeri sebagai rangkaian Harbolnas.



9

Sukses Perlindungan Konsumen

“Zulhas dengan sikap tegasnya berulang kali mengatakan komitmennya melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan pemberdayaan konsumen, yang berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia juga siap memerangi produk-produk ilegal untuk keamanan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.”



Indonesia adalah pasar besar dengan jumlah penduduk 278 juta jiwa. Sebagai posisi keempat populasi terbesar dunia, yang seluruhnya merupakan konsumen, Indonesia menjadi target pasar menggiurkan bagi produk dalam dan luar negeri. Begitu besarnya pasar Indonesia, menjadikan konsumen dalam negeri menjadi rentan untuk eksploitasi.





9

Sukses Perlindungan Konsumen

Zulkifli Hasan (Zulhas) memahami betul hal ini. Maka, sebagai Menteri Perdagangan, ia ingin memastikan konsumen dalam negeri benar-benar bisa terlindungi. Ini hanya bisa dicapai bila keberdayaan konsumen Indonesia bisa ditingkatkan.

Banyak yang belum menyadari bahwa perlindungan konsumen memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab, sejatinya, stabilisasi pertumbuhan ekonomi diciptakan oleh rasa aman dan berdaya yang dimiliki konsumen. Dua faktor penting ini bisa tercipta jika ada perlindungan terhadap mereka. Rasa aman dan berdaya memancing permintaan lebih tinggi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena begitu pentingnya perlindungan konsumen terhadap semua sektor perdagangan, Zulhas ingin memastikan hak-hak konsumen terlindungi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat.

Apalagi, selain Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, juga mempunyai kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah ruah, yang harus diolah dan dikembangkan.

Zulhas memastikan, rasa aman yang diberikan kepada konsumen dikeluarkan melalui berbagai instrumen kebijakan. Namun begitu, ia menyadari untuk memberikan perlindungan kepada konsumen diperlukan kerja sama dan sinergitas dari seluruh pihak. Zulhas menyebut, sinergi antara pemerintah dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah berjalan baik dan diharapkan dapat terus berdampingan melindungi konsumen nasional.

Di lain pihak, pelaku usaha juga harus mampu menghadirkan berbagai barang dan jasa berkualitas yang menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Sementara, konsumen dituntut memiliki iktikad baik saat melakukan transaksi dan memerhatikan dengan teliti produk sebelum membeli.

Adaptif Hadapi Era Digital



Wujud perlindungan konsumen yang diberikan Kemendag melalui penerbitan aturan bidang perdagangan. Salah satunya, Permendag No. 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.



Penerbitan aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam negeri. Lahirnya revisi Permendag 31/2023 antara lain karena adanya indikasi perdagangan tidak sehat oleh pelaku usaha asing dan masih lemahnya daya saing UMKM dan produk dalam negeri. Standardisasi barang di platform PMSE dan persaingan yang setara dalam ekosistem PMSE juga masih belum terwujud. Selain itu, muncul model bisnis baru yang berpotensi mengganggu ekosistem PMSE masih terlihat.


Sedangkan tujuan disusunnya Permendag 31/2023 ada tiga. Pertama, menciptakan ekosistem PMSE yang sehat, dengan memerhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Kedua, mendukung pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha PMSE dalam negeri. Ketiga, meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.

Aturan yang lebih luas tentang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Aturan ini merupakan payung hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun begitu, UUPK yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade, saat ini perlu revisi untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Pada tahun 2023, usulan revisi UUPK masuk dalam Program Legislasi Nasional dan sudah menjadi inisiatif DPR. Saat ini, penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disiapkan oleh DPR.

Pararel dengan itu, disusun rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Cakupannya meliputi peningkatan peran pemerintah, peningkatan keberdayaan konsumen, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Untuk mendukung R-Perpres tersebut saat ini juga sedang disusun Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen, isinya tentang program dan kegiatan K/L yang menjadi target dalam R-Perpres.

Untuk keselarasan dan penegakan perlindungan konsumen dalam negeri, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Penyempurnaan proses bisnis kepabeanan ini diyakini dapat meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus pelaku usaha UMKM produk impor.

A young boy with dark hair, wearing a blue vest over a white long-sleeved shirt, is smiling and holding a large red gift box. Behind him are more gift boxes, one yellow and one orange, and a gold coin with a yen symbol (¥) floating in the air. The background is a warm, orange-toned space with white dots.

Pentingnya Keberdayaan Konsumen

Kebijakan perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan indikator Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Alat ini menjadi pengukur kesadaran dan pemahaman konsumen tentang hak dan kewajiban. IKK juga mengukur kemampuan dalam berinteraksi dengan pasar. Dengan IKK pula dapat ditentukan langkah preventif bila diindikasikan adanya dampak negatif.





9

Sukses Perlindungan Konsumen

Makin tinggi nilai IKK maka konsumen makin berdaya. Pengukuran IKK ini merupakan langkah konkret praktik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, serta membentuk kesadaran kritis dari setiap individu konsumen untuk meningkatkan keberdayaan konsumen secara komunal. Secara operasional, IKK diukur melalui tiga tahap keputusan pembelian, yang terdiri dari tujuh dimensi. Pertama, pra pembelian, diukur dengan dua dimensi, yaitu pencarian informasi serta pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen.

Kedua, saat pembelian. diukur dengan tiga dimensi, yaitu pemilihan barang atau jasa, preferensi barang atau jasa serta perilaku pembelian. Ketiga, pascapembelian, diukur dengan dua dimensi, yaitu kecenderungan untuk bicara dan perilaku komplain.

Berdasarkan hasil IKK yang dilakukan Kemendag tahun 2023 di 34 provinsi menunjukkan bahwa nilai IKK sebesar 57,04 meningkat dari tahun 2022 yang hanya 53,23. Nilai indeks 57,04 ini termasuk dalam kategori 'Mampu'. Artinya, konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya. Tingkat keberdayaan konsumen atau skor IKK dikelompokkan menjadi 5 (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen).



Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Nilai Persepsi	Skor Indeks	Mutu	Keberdayaan Konsumen
1	0 – 20	E	Sadar: mengenali hak dan kewajiban dasar sebagai konsumen
2	20,1 – 40	D	Paham: memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk melindungi dirinya
3	40,1 – 60	C	Mampu: mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya
4	60,1 – 80	B	Kritis: berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri
5	80,1 – 100	A	Berdaya: memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen

Sumber: Kepmendag No. 162 tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian IKK

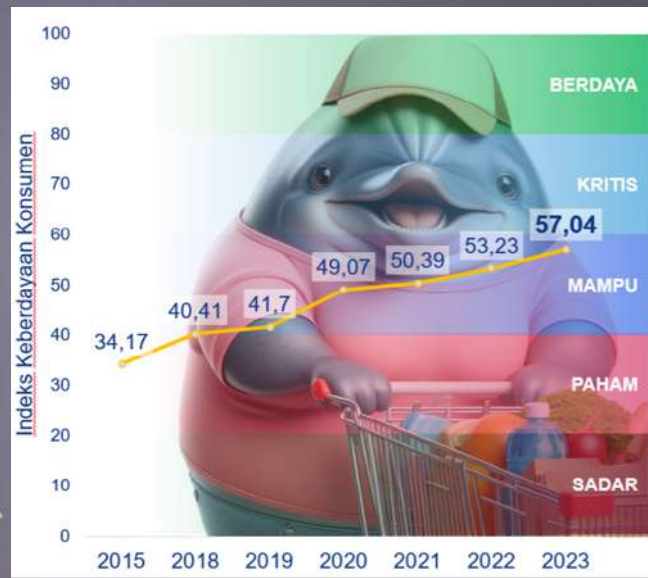
Dengan posisi IKK yang berada pada level 3 (dari level 5), tentu harus ada upaya untuk meningkatkan keberdayaan konsumen. Zulhas terus menggerakkan timnya mencapai indikator tertinggi. Caranya, terus memberikan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin terpenuhi haknya sebagai konsumen agar masyarakat menjadi konsumen mandiri dan berdaya.



9

Sukses Perlindungan Konsumen

Perkembangan Nilai IKK Tahun 2015 – 2023



Mendengar Keluhan Langsung

Kemendag juga terus mengedukasi konsumen secara masif dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Tujuannya, memperkuat perlindungan konsumen dan menciptakan lingkungan perdagangan yang adil. Zulhas mengerahkan jajarannya untuk menyediakan layanan konsultasi dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen melalui berbagai saluran komunikasi, seperti telepon, surel, situs web, dan aplikasi WhatsApp.





9

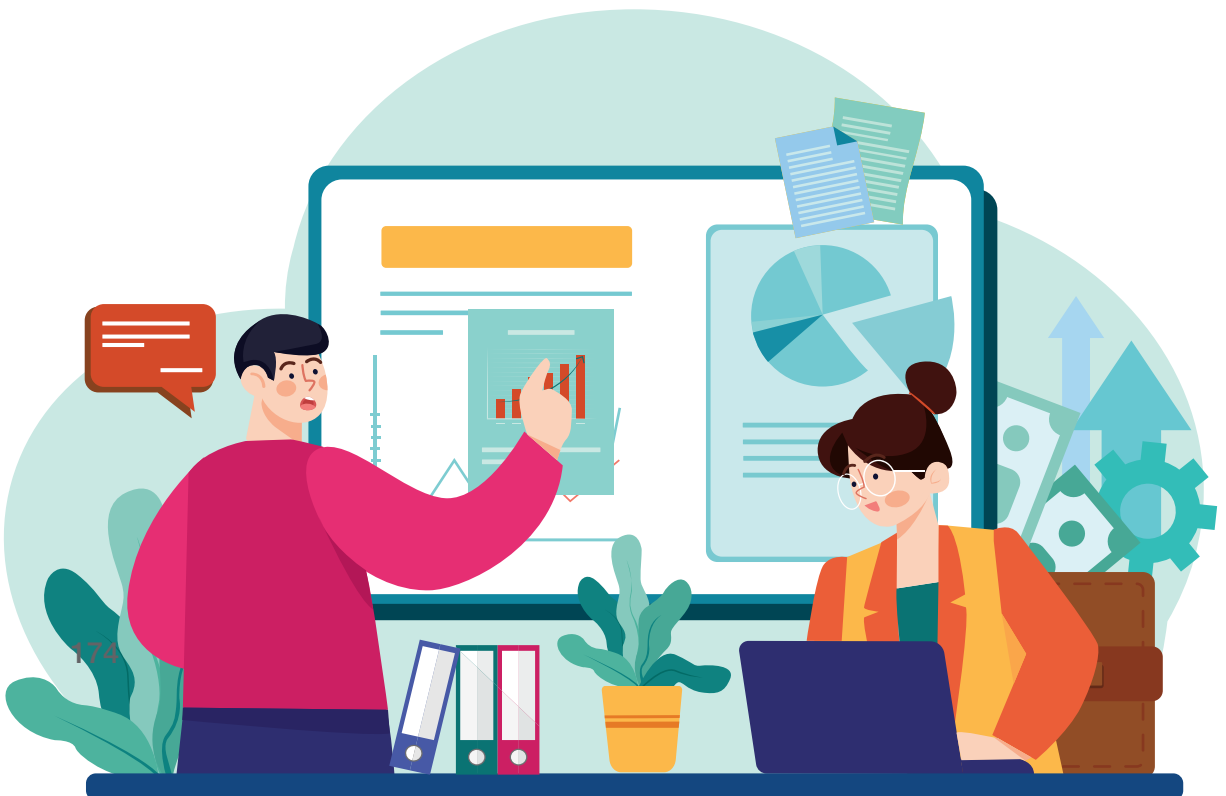
Sukses Perlindungan Konsumen

Pengaduan konsumen meliputi sembilan sektor, yaitu sektor obat dan makanan, elektronik/kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik/gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi. Selain itu, terdapat dua instrumen pendukung, yaitu jasa logistik dan niaga-el.

Pada tahun 2023 terdapat 7707 laporan layanan pengaduan konsumen yang terdiri dari 6.018 pengaduan, 1.274 pertanyaan, dan 415 informasi dan 99 persen telah berhasil diselesaikan.

Dengan mendengarkan langsung keluhan masyarakat ini, Zulhas ingin mengatakan, Kemendag selalu menjalankan transparansi dan aksesibilitas dalam menangani pengaduan konsumen. Dengan memberikan berbagai pilihan, pemerintah berusaha membuat proses konsultasi dan penyelesaian pengaduan konsumen semudah mungkin.

Partisipasi aktif konsumen dalam memperjuangkan hak-hak mereka adalah langkah perlindungan terhadap perekonomian nasional.



Menangkal Serbuan Barang Ilegal.

Demi melindungi
konsumen dalam negeri,
Zulhas memerintahkan
pemusnahan beberapa
komoditas ilegal.





9

Sukses Perlindungan Konsumen

Diawali tahun 2023, Zulhas memimpin pemusnahan produk baja tulang beton (BjTB) yang tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Tangerang, Banten. Nilainya mencapai Rp32,23 miliar, yang terdiri dari 419.537 batang dengan berat 2.302 ton. Produk yang dimusnahkan terbukti melanggar aturan karena tidak memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pengawasan dilakukan sebagai respons atas informasi tentang adanya produk BjTB yang beredar dan diperdagangkan dengan harga murah namun tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan secara teknis.

Produk BjTB telah dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi. Hasilnya, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi SNI 2052:2017. Langkah berikutnya adalah mengamankan produk ilegal tersebut, sebagai pencegahan awal meminimalisasi kerugian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup (K3L).

Tindakan pengamanan sementara, dilaksanakan berdasarkan Pasal 40 Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa untuk selanjutnya dimusnahkan.

Zulhas menekankan, perlindungan konsumen atas kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa harus menjadi komitmen penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Caranya, dengan memastikan seluruh kewajiban telah dipenuhi dan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang diwajibkan. Diingatkan, perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Zulhas mengingatkan, tindakan memproduksi BjTB yang tidak sesuai ketentuan dan memperdagangkan dengan harga jual yang lebih murah akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Ketidaksesuaian produk BjTB terhadap persyaratan mutu SNI mengakibatkan konstruksi bangunan tidak kokoh sehingga berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen.

Dengan tindakan tegas ini, Zulhas berharap dapat memberikan efek jera pelaku usaha yang memproduksi BJTb lainnya yang tidak sesuai ketentuan, khususnya di wilayah Banten yang jumlahnya cukup banyak. “Ini menjadi bukti Kementerian Perdagangan terus berupaya melindungi industri dalam negeri dan konsumen Indonesia,” tegas Zulhas.



Di saat mudik Lebaran tahun 2023, Kemendag berhasil mengamankan produk pelumas kendaraan bermotor berbagai merek yang tak sesuai ketentuan, senilai Rp16,5 miliar. Pengamanan pelumas ini tentu membuat pemudik lega karena terhindar dari pemakaian pelumas tak berkualitas yang mungkin berpotensi menimbulkan bahaya.

Pada aksi tegas itu, Kemendag mengamankan peralatan produksi yang digunakan untuk memproduksi produk pelumas dan produk *base oil* sebanyak 1.153 drum, produk jadi pelumas 196.734 botol, dan ribuan kardus

dan botol kemasan siap isi dengan berbagai merek.

Produk pelumas ilegal berbagai merek tersebut diduga tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), Nomor Pendaftaran Barang (NPB), dan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT). Perlindungan konsumen dan pengawasan tata niaga produk pelumas dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.



Perdagangan produk pelumas harus memenuhi kualitas yang disyaratkan secara teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan, karena berpotensi melanggar pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Potensi pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 113 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.



Pada akhir tahun 2023, telah dilaksanakan penyerahan berkas perkara penyidikan terkait produk pelumas yang tidak memenuhi ketentuan kepada Tim JPU Kejaksaan.

Upaya tegas lain yang dilakukan untuk melindungi konsumen adalah melakukan sinergi antarinstansi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Badan Reserse Kriminal Kabareskrim. Kerja pengawasan bersama ini, lalu, dibuktikan dengan pemusnahan 11 jenis produk impor dan barang yang tidak sesuai ketentuan. Nilainya mencapai Rp49,95 Miliar.

Sebelas jenis produk yang dimusnahkan tersebut adalah pakaian bekas asal impor yang masuk dalam komoditas yang dilarang impor. Komoditas yang dimusnahkan sebanyak 1.258 karung *ballpress*, hasil penindakan di Senen, Jakarta Pusat dan Gedebage, Bandung. Operasi dilakukan oleh tim gabungan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, dan Ditjen PKTN, Kemendag.

Selain itu, pakaian bekas sebanyak 9 kontainer berisi 2.401 karung *ballpress* yang merupakan hasil penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Ada juga sajadah/karpet yang tidak memenuhi ketentuan lartas sebanyak 51.530 buah hasil penindakan Kantor Pelayanan Bea Cukai Cikarang. Khusus sajadah/karpet ini dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Bekasi dan tokoh masyarakat untuk dapat dimanfaatkan.

Tindakan pemusnahan dilakukan terhadap produk-produk hasil pengawasan barang komoditas yang pengawasannya di luar area kepabeanan (*post border*), barang yang dilarang impor, dan barang yang beredar. Pemusnahan dilaksanakan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tindakan tegas ini bagian dari solusi menghadapi banjirnya produk impor murah di pasar yang mengganggu produksi di dalam negeri. Banyak asosiasi yang menyampaikan keluhan terhadap barang ilegal. Barang impor ilegal ini sangat mengganggu performa UMKM.

Penindakan yang dilakukan terhadap pakaian bekas asal impor merupakan barang yang dilarang diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Pemusnahan dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku usaha yang masih abai pada aturan perundang-undangan di



bidang perdagangan serta untuk melindungi konsumen. Selain itu, dengan kegiatan yang dilakukan diharapkan industri dalam negeri terlindungi.

Kemendag juga melakukan penindakan terhadap produk baja tulangan beton berbagai merek dan ukuran yang ditemukan di dua lokasi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sekaligus tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Dari kedua lokasi tersebut masing-masing sebanyak 140.843 batang dan 68.320 batang. Serta pipa saluran air yang juga tidak memenuhi SNI dan tidak memiliki Nomor (NPB) sebanyak 7.081 batang. Kemudian, komoditas wajib SNI yang tidak memiliki NPB sebanyak 45.535 buah.

Temuan hasil pengawasan lainnya adalah produk kehutanan yang tidak memiliki Persetujuan Impor (PI) sebanyak 108,5 kg. Selain itu ada produk lainnya yang masuk kategori Produk Tertentu, yaitu elektronik dan rokok elektrik yang tidak memiliki Laporan Surveyor (LS) sebanyak 88 buah; kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang tidak memiliki LS sebanyak 3 karton dan 41.597 buah; serta makanan dan minuman yang tidak memiliki LS sebanyak 57 drum, 19.438 karton, dan 1.990 kg.

Berikutnya, produk alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang tidak memiliki izin tipe tercatat sebanyak 2.476 buah.

Selanjutnya, sampel hasil pengawasan barang beredar komoditas antara lain alas kaki, pakaian jadi, tekstil, mainan anak, dan produk



elektronik lainnya. Produk-produk tersebut tidak ber-SNI dan juga tidak memiliki NPB dan manual kartu garansi (MKG); tidak memenuhi uji Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L); serta tidak memiliki label Bahasa Indonesia dengan jumlah sebanyak 282 buah.

Ekspose dan tindakan pemusnahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rapat terbatas tentang pengetatan arus masuk barang impor yang digelar pada 6 Oktober 2023. Tujuannya adalah melindungi industri dan UMKM di dalam negeri dari derasnya arus masuk barang impor di pasaran agar tercipta ekosistem perdagangan yang sehat.

Kemendag juga melakukan pengaturan tentang tata niaga impor yang sekaligus melindungi konsumen. Langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan beberapa peraturan, antara lain kebijakan pengaturan impor melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag Nomor 25 Tahun 2022 salah satunya mewajibkan kepemilikan PI dan LS bagi semua komoditas yang pengawasannya di luar area kepabeanan (*post border*).

Pernyataan dalam pasal 43 Permendag Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengaturan Impor tegas disebut, "Importir yang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka terhadap barang tersebut harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau ditarik dari distribusi yang mana seluruh biaya atas pelaksanaan tersebut ditanggung oleh

importir, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selain pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan, Kemendag juga melakukan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan *post border*. Sepanjang tahun 2023, Kemendag telah melakukan pengawasan terhadap 1.061 pelaku usaha yang terdiri dari 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan 564 pelaku usaha hasil pengawasan *post border*.

Dari pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 509 pelaku usaha diperoleh hasil 350 pelaku usaha telah taat terhadap ketentuan tertib niaga dan 159 pelaku usaha belum taat terhadap ketentuan tertib niaga.

Pengawasan dilakukan di berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kep. Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu telah dilakukan pengawasan *post border* terhadap 654 pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan legalitas di lapangan, yaitu 1.533 pemberitahuan impor barang (PIB) atau setara dengan 1.533 berita acara (BA) yang terdiri dari 843 BA sesuai ketentuan dan 690 BA belum memenuhi ketentuan.





10

Sukses Bursa Kripto & CPO

“Beberapa terobosan dan inovasi terus dilakukan Kementerian Perdagangan. Sebagai orang nomor satu di Ridwan Rais (kantor pusat Kemendag), Zulhas mengomando lahirnya aturan perdagangan aset kripto, membangun Bursa CPO, dan optimalisasi Perdagangan Komoditi Berjangka.”



Pasar aset kripto di Indonesia makin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka ini berarti naik 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang. Jumlah ini didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.



10 | Sukses Bursa Kripto & CPO

Bila ditarik mundur sejak pertama kali diatur pada Juni 2018, perdagangan aset kripto di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Minat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus tumbuh dalam lima tahun terakhir (2018—2023). Hingga saat ini, perdagangan aset kripto tercatat telah memiliki 17,54 juta pelanggan terdaftar dengan rata-rata penambahan pelanggan setiap bulan sebesar 490,8 ribu orang.

Sementara itu, perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia pada periode Januari—November 2023, tercatat sebesar Rp122 triliun. Sedangkan pada 2022, mencatat nilai transaksi sebesar Rp296,66 triliun. Nilai ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp859,4 triliun. Untuk tahun 2020, nilai transaksi yang terjadi sebesar Rp64,9 triliun.

Meski nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan, tergambar dari tren saham yang melemah (*bearish*) di tahun 2022, tapi dengan makin banyaknya perusahaan raksasa seperti Meta, Google, dan Twitter yang mulai mengintegrasikan teknologi *blockchain* dalam kegiatan usahanya, membuktikan bursa aset kripto bisa terus berkembang pesat.

Namun, kondisi ini tetap perlu disikapi dengan hati-hati. Bagaimana pun perlindungan konsumen juga diberikan untuk perdagangan komoditas aset kripto. Aturan pedagang perlu dikeluarkan. Pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti dan Bursa tercatat sebanyak 33 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK).

Seluruh CPFAK melalui proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai pedagang fisik aset kripto dari Bappebti. Jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto oleh Bappebti sampai dengan November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan. Bila dilihat secara geografisnya, menurut data dari Coinfolk, terdapat enam provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia yaitu, Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.

Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia.

Tingginya minat masyarakat terhadap perdagangan aset kripto, direspons pemerintah dengan berupaya meminimalisir terjadinya ketidakwajaran dalam bertransaksi aset kripto. Perlindungan masyarakat, khususnya pelanggan aset kripto, diwujudkan dengan membentuk ekosistem aset kripto, yaitu bursa aset kripto, lembaga kliring aset kripto, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto (*Depositary*).

Keberadaan lembaga-lembaga ini, diharapkan Zulhas dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi dan menciptakan kepastian berusaha bagi pelakunya. Dengan begitu, industri aset kripto memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Secara aturan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau yang disebut UU P2SK maka kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia. Peralihan itu akan terjadi pada Januari 2025. Untuk itu, OJK, BI, Kemenkeu dan Bappebti kemudian menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk segera difinalisasi.

Tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah membentuk ekosistem aset kripto yang dibangun sehingga dapat menumbuhkan transaksi aset kripto dan memastikan agar peralihan kewenangan tersebut tidak menimbulkan guncangan bagi industri aset kripto.

Kementerian Perdagangan sendiri telah meresmikan Bursa Aset Kripto pada 28 Juli 2023, yakni PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Futures Exchange (CFX) menjadi Bursa Berjangka Aset Kripto Indonesia.

Kelembagaan bursa aset kripto dibentuk karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami perkembangan pesat, jika dilihat dari sudut pandang teknologi *blockchain* yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.

Bursa Aset Kripto di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia. Pembentukan ekosistem tersebut berdasarkan Peraturan Bappebti (Perba) 13 Nomor tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.



Bursa Berjangka Aset Kripto terbentuk atas kolaborasi Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan PT. Bursa Komoditi Nusantara, serta didukung penuh seluruh pelaku usaha dan asosiasi.

Melalui peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto, Zulhas mengajak seluruh *stakeholder* perdagangan aset kripto di Indonesia untuk berkolaborasi meningkatkan literasi kepada masyarakat. Tujuannya, agar perdagangan aset kripto dapat berjalan lebih konstruktif dan efektif.

Hadirnya Bursa Berjangka Aset Kripto dilengkapi dengan Perba Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK).

Jadi sudah jelas dana dari hasil perdagangan aset kripto ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan pendanaan senjata pemusnah massal atau terorisme.



Nilai Transaksi Aset Kripto (Triliun Rupiah) Tahun 2022 – 2023



Perdagangan aset kripto di tahun 2024 diprediksi akan tumbuh positif seiring dengan *halving* Bitcoin. Untuk itu, ekosistem aset kripto harus berjalan dan menumbuhkan transaksi aset kripto. Bersamaan, 33 CPFAK juga didorong untuk menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Hal lainnya adalah mengembangkan aset kripto lokal dan membentuk Komite Aset Kripto.

Selain itu, RPP turunan P2SK dalam proses finalisasi dan memastikan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK dan BI tidak menimbulkan guncangan bagi industri Aset Kripto serta memastikan ekosistem yang terbentuk telah berjalan dengan baik.



Inovasi Bursa CPO

Kemendag terus melakukan inovasi perdagangan. Medio Oktober 2023, diluncurkan Bursa CPO Indonesia untuk pasar lokal yang bersifat *voluntary*. Tujuan Bursa CPO adalah membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan *real time*. Dengan begitu, Bursa CPO dapat menjadi acuan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) sekaligus bisa mendorong perbaikan harga Tandani Buah Segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian dan menjadikan harga acuan biodiesel oleh Kementerian ESDM lebih akurat.

Sejak Bursa CPO Indonesia terbentuk, ada 31 perusahaan CPO yang telah menjadi anggota Bursa CPO. Untuk mendorong likuiditas juga dilakukan transaksi CPO *futures* (CPOTR) yang transaksinya mencapai 1.482 lot (7.410 metrik ton). Angka ini kemudian naik lagi. Selama 2023, tercatat 34 perusahaan CPO mendaftar sebagai anggota bursa dan untuk meningkatkan likuiditas, didorong CPOTR yang nilai transaksinya mencapai 1.822 lot (9.110 metrik ton).

Sebagai langkah pengembangannya, bursa CPO dan Kemendag bersama Kadin dan asosiasi terkait menggelar pelatihan teknis dan sosialisasi lewat pendekatan kepada pelaku usaha.



Selain itu, Kemendag telah memperluas pelabuhan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa. Pelabuhan tersebut adalah Dumai, Belawan, Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisaksi, Semayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke.

Sebagai langkah optimalisasi, perdagangan CPO di Bursa Berjangka, perlu dilakukan beberapa langkah penting. Seperti, kolaborasi antara Bappebti, Bursa, Asosiasi, dan KADIN dalam penguatan pelatihan/sosialisasi kepada pelaku usaha. Mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk bertransaksi baik pelaku usaha CPO yang besar maupun pabrik kelapa sawit.

Selanjutnya, penguatan kolaborasi Bappebti dengan Bursa, unit dan kementerian terkait, serta Asosiasi (termasuk mendorong pemberian insentif); dan mendorong transaksi CPO orientasi ekspor.





Optimalisasi Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi



Berbagai kebijakan perlindungan konsumen selalu menjadi prioritas Zulhas, termasuk untuk Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Perbaikan yang dilakukan menyentuh tata kelola, meminimalisasi aduan, serta melakukan optimalisasi pengawasan merupakan langkah-langkah yang ditempuh. Termasuk tindakan preventif, penguatan regulasi, literasi secara masif, integrasi sistem aplikasi di Bappebti dengan PDSI, serta sistem *rating* pialang berjangka.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang perdagangan komoditas berjangka, Kemendag menguatkan literasi lewat program “*Bappebti Goes to Campus*”. Program ini mengenalkan industri PBK kepada generasi milenial dan Gen Z. Selain itu, dilakukan optimalisasi media sosial dan penguatan literasi berkolaborasi dengan SRO. Layanan Informasi (LINI) Bappebti juga menjadi prioritas.

Dari sisi penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama Bareskrim POLRI, terutama dalam penanganan kasus dan penghentian kegiatan PBK ilegal. Selama 2023, Kemendag menerima 177 pengaduan terhadap perusahaan Pialang Berjangka.

Dari jumlah tersebut, 95 pengaduan masih dalam proses dan 82 pengaduan telah selesai. Selain itu, Bappebti bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam pemblokiran entitas ilegal. Selama 2023 telah dilakukan

pemblokiran terhadap 1.856 entitas ilegal, meliputi 1.214 pialang berjangka, 341 pedagang fisik aset kripto, 77 penasihat berjangka, dan 3 pedagang emas digital ilegal, serta 114 duplikasi/penipuan, 91 *binary option*, 15 ponzi, dan 1 *robot trading*.

Kemendag jelas tidak bergerak sendiri. Untuk berbagai upaya penanganan kasus PBK, Kemendag bergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas ini terdiri dari 16 anggota, antara lain OJK, BI, Kemendag (Bappebti dan Ditjen PKTN), Kemenkominfo, POLRI, Kejaksaan, BIN dan PPAK.

Indonesia juga menjadi anggota tetap *Financial Action Task Forces (FATF)* pada *Plenary Meeting* tanggal 25 Oktober 2023 di Paris. Penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh FATF menjadi bukti pengakuan internasional atas peran penting Indonesia dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) global.

Keanggotaan penuh FATF menempatkan Indonesia sejajar dengan negara anggota G20 lainnya, sebagai negara dengan integritas sistem keuangan yang diakui dunia. Zulhas menegaskan, Kemendag akan terus berperan aktif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.



Resi Gudang Mendukung Ekspor .

Kehadiran Sistem Resi Gudang (SRG) yang awal pemanfaatannya sebagai instrumen tunda jual dan pembiayaan dengan jaminan komoditas, kini telah jauh berkembang. SRG dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian harga, ketersediaan bahan pokok termasuk mendorong terjaganya inflasi, serta mendukung aktivitas ekspor.

SRG digunakan oleh para pelaku ekspor untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditas. Tujuannya, agar harga pembelian tetap terjaga di tingkat mitra. Juga, tercipta kepastian ketersediaan dana untuk pembelian stok, pemenuhan standar mutu dari komoditi. Pembiayaan yang diperoleh berasal dari lembaga perbankan dan non perbankan.

Jenis komoditi yang diatur dalam penyelenggaraan SRG berdasarkan Permendag No. 24/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam SRG adalah 22 komoditi.



22 Komoditi dalam SRG

GABAH, BERAS, JAGUNG, KOPI, KAKAO, LADA, KARET, RUMPUT LAUT, ROTAN, GARAM, GAMBIR, TEH, KOPRA, TIMAH, BAWANG MERAH, IKAN, PALA, AYAM KARKAS BEKU, GULA KRISTAL PUTIH, KEDELAI, TEMBAKAU, DAN KAYU MANIS.



Pemanfaatan Komoditi dari Pelaku Ekspor

TIMAH, IKAN, KOPI, RUMPUT LAUT DAN TEH, SECARA LEBIH RINCI:

- Komoditi ikan (SRG Benoa Bali dan Probolinggo ke Korea dan Australia)
- Beras organik (SRG Wonogiri ke Amerika Serikat, Prancis, Singapura dan Malaysia)
- Kopi (SRG Aceh Tengah dan Subang ke Amerika Serikat, Mesir dan Lebanon)
- Rumput Laut (Gudang SRG Makassar ke Jepang Italia, Tiongkok, Rusia dan Jerman)

Selain SRG, Bappebti juga terus mendorong pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang menjadi salah satu instrumen perdagangan untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditi. PLK diharapkan mampu menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil. Ke depan pasar lelang akan dikembangkan, baik *spot* maupun *forward*, dan terintegrasi dengan SRG.



Perkembangan perdagangan digital aset kripto

Transaksi Aset Kripto

Total nilai transaksi aset kripto Januari—November 2023
Rp122 triliun.

Pelanggan Aset Kripto

Perlindungan konsumen pada aset kripto sebanyak
18,25 juta pelanggan.

Pedagang Aset Kripto



32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti.

Bursa Aset Kripto

Bursa Kripto diluncurkan pada 17 Juli 2023. PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Futures Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia.

Peluncuran Bursa CPO

Bursa Kripto diluncurkan pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela.

Anggota Bursa CPO

31 perusahaan telah menjadi anggota Bursa CPO.





REPUBLIK INDONESIA



e Values

KHL

rian

2




KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

11

Sukses Tata Kelola Pemerintahan

“Tetesan keringat atas kerja keras itu memberi arti bagi kinerja tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Tak hanya meraih penghargaan di berbagai bidang, sosok Mendag Zulhas juga mendapatkan apresiasi dan penobatan prestisius dari media massa.



Di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kinerja Kementerian Perdagangan meraih reputasi membanggakan. Tata kelola pemerintahan termasuk reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berhasil merebut predikat adi luhur dengan mendapat berbagai prestasi dan penghargaan. Sosok Mendag Zulkifli Hasan pun tak luput dari penghargaan dengan predikat terbaik.



Tokoh Inspiratif Pegiat Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

(Lintas Generasi
Awards 2023)



Liputan6 SCTV menghadiahi Mendag Zulhas sebagai Tokoh Inspiratif Pegiat Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi di Lintas Generasi Awards 2023. Penghargaan diberikan oleh Wakil Komisaris Utama Surya Citra Media Suryani Zaini dan diterima secara langsung oleh Mendag Zulkifli Hasan pada Sabtu, 8 Juli 2023, di Jakarta.



Penghargaan Anugerah Inspiratif Liputan6.com di Festival6 2023 ini merupakan ajang apresiasi khususnya kepada tokoh nasional yang berjuang untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Anugerah kemudian didedikasikan kepada jajaran Kementerian Perdagangan yang telah bekerja keras dan mendukungnya selama ini.

“Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh jajaran di Kemendag. Ini yang kerja teman-teman. Saya hanya mengatur saja. Penghargaan ini untuk teman-teman di Kemendag,” kata Mendag Zulhas.

Penghargaan yang diterima oleh Zulhas – sapaan akrab Mendag ini bukan satu-satunya. Pada Kamis, 21 September 2023, Mendag Zulhas mendapat penghargaan sebagai Tokoh Pendorong Kinerja Ekspor versi Detikcom Awards 2023. Pasalnya, Mendag Zulhas dinilai berhasil menjaga neraca perdagangan Indonesia yang selalu surplus dalam 36 bulan berturut-turut.

“Ini kerja keras teman-teman di Kemendag. Ekspor kita tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2022, yaitu surplus USD54,49 miliar. Selama 36 bulan kita berhasil surplus berturut-turut,” kata Mendag Zulhas.

Penghargaan ini berkat dukungan berbagai pihak seperti perwakilan perdagangan. Dukungan mereka sangat penting, juga dukungan dari Kapolri dan Jaksa Agung di Satgas Pangan. “Ekspor Indonesia bisa terganggu kalau ada penyelundupan dan harga tidak bisa stabil kalau banyak penimbunan. Sekali lagi, terima kasih Kemendag dan Detikcom. Ini semua untuk Anda,” ujarnya.

Detikcom Awards 2023 yang bertemakan “*Adapt and Transform to an Era of Change*” merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang. Melalui penghargaan tersebut, detikcom menghargai pencapaian yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, transformasi dan adaptif yang tercipta, serta perubahan positif yang terjadi.



Penghargaan WTP



Di bawah kepemimpinan Mendag Zulhas, Kementerian Perdagangan juga mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya melaksanakan kepatuhan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai undang-undang. Kementerian Perdagangan kembali mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* untuk laporan keuangan tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa, 11 Juli 2023.

Penghargaan Opini WTP diberikan setelah pemeriksaan menyeluruh atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tahun 2022. Ditinjau juga langkah-langkah perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi tahun sebelumnya, termasuk upaya percepatan pelaksanaan hibah aset kepada pemerintah daerah.

Opini WTP atas laporan keuangan Kemendag tahun anggaran 2022 menandakan Kemendag telah menerima opini WTP untuk kesebelas kalinya dari BPK. Pada periode sebelumnya, Kemendag mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Penghargaan Opini WTP tersebut diterima Mendag Zulhas dari Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, di Auditorium Kemendag. Opini WTP dari BPK merepresentasikan kepatuhan dalam bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Untuk itu, ia meminta jajaran Kemendag untuk selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja.

Penghargaan INTRA



Kementerian Perdagangan sejak dipimpin Zulhas telah menorehkan prestasi membanggakan. Majalah Kementerian Perdagangan *Indonesia Trade Insight* (INTRA) berhasil meraih penghargaan *Silver Winner* dalam ajang *Indonesia Inhouse Magazine Award (InMA) 2023* kategori *The Best of E-Magazine Government*. Penghargaan yang diadakan setiap tahun oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam perhelatan akbar SPS *Award* ke-14 di Merlyn Park Hotel Jakarta 20 Maret 2023. Tahun sebelumnya 2022, INTRA meraih penghargaan *Bronze Winner* untuk kategori yang sama.

Bukan itu saja Kementerian Perdagangan melalui Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, meraih '*Bronze Winner*' dalam *Media Relations Award (MRA) 2023* untuk kategori '*Press Release*' dari Serikat Pekerja Pers (SPS), di Denpasar, Bali pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Penghargaan ini menunjukkan kinerja Biro Humas Kementerian Perdagangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mendapat respon positif masyarakat. Informasi Humas dipublikasikan dalam bentuk siaran pers yang didistribusikan melalui media massa untuk dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pada Jumat 3 November 2023, Majalah internal Kementerian Perdagangan *Indonesia Trade Insight* (INTRA) berhasil meraih penghargaan *Bronze Winner* di bidang media kategori *E-Magazine* dalam ajang *The 5th Anugerah Humas Indonesia (AHI) Award 2023*. Ajang ini diselenggarakan setiap tahun oleh Humas Indonesia, bagian dari PR Indonesia Group di Quest Hotel Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah.



Penghargaan SPBE

Kemendag
menempati
peringkat ke-6
dari seluruh
kementerian
dan melampaui
target kinerja
Sasaran Strategis
Sekretaris
Jenderal Tahun
2023

Kementerian Perdagangan juga menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih predikat sangat baik dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memperoleh indeks 4,16. Hasil ini dikeluarkan Tim Asesor SPBE Nasional yang dipimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kemendag menempati peringkat ke-6 dari seluruh kementerian dan melampaui target kinerja Sasaran Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2023. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatatkan indeks sebesar 3,42 atau predikat baik.

Penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dan Umum yang diwujudkan melalui layanan digital Kementerian Perdagangan. “Penyelenggaraan SPBE di Kementerian Perdagangan terus dilakukan perbaikan berkelanjutan di seluruh kategori utama penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Diharapkan Kementerian Perdagangan meraih predikat memuaskan pada penilaian kematangan pada penyelenggaraan SPBE berikutnya,” ujar Mendag Zulhas.



Penghargaan Badan Publik Informatif

Di penghujung tahun 2023, Kementerian Perdagangan kembali Raih “Badan Publik Informatif” tiga tahun berturut-turut pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Capaian Badan Publik Informatif diraih secara berturut-turut sejak 2021 silam.

Penganugerahan tersebut diserahkan Ketua KI Pusat, Donny Yoegiantoro secara langsung kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono dengan disaksikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Acara tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.

Kementerian Perdagangan telah meraih predikat Badan Publik Informatif sejak 2021. Kementerian Perdagangan mendapatkan nilai 93,07 pada 2021 dan meningkat menjadi 98,82 pada 2022. Pada tahun 2023 mendapat nilai 95,34. “Hal ini merupakan bentuk konsistensi kinerja pelayanan informasi publik melalui inovasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Mendag Zulhas.

Predikat Badan Publik Informatif ini membuktikan upaya dan komitmen Kementerian Perdagangan untuk menjadi badan publik yang memenuhi kewajiban penyediaan dan pelayanan informasi publik yang akurat, serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien. Hal ini dilakukan agar mudah diakses serta memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.



Kemendag di Bawah Kepemimpinan Zulhas dalam Media Monitoring



Tahun 2023 menjadi tahun penting bagi Mendag Zulkifli Hasan. Popularitas Kementerian Perdagangan makin moncer setelah banyak media menyoroti sepak terjang Mendag Zulhas dalam menyediakan barang kebutuhan pokok dan memastikan terjadinya stabilitas harga. Berbagai persoalan terkait isu sektor perdagangan akan terus membayangi di tahun 2024 ini.

1.609.641
posting

Total perbincangan di media sosial terpantau sebanyak 1.609.641 postingan dengan sentimen 96% positif dan netral.

Sepanjang tahun 2023 dari catatan media monitoring Biro Humas isu yang menjadi trending topik pemberitaan media adalah masalah barang kebutuhan pokok (bapok). Isu yang menonjol lainnya yang mencuri perhatian media antara lain ada gelaran *55th ASEAN Economic Ministers (AEM)* atau pertemuan menteri ekonomi ASEAN di Semarang dan Trade Expo Indonesia (TEI).

Selain itu ada isu Misi Dagang Arab Saudi maupun Misi Dagang Mesir serta peluncuran Bursa CPO dan Bursa Kripto.

Isu bapok memang sangat menonjol bila dibandingkan isu sektor perdagangan yang lainnya tercatat tidak kurang mencapai 10.039 berita sepanjang tahun 2023.



Media Monitoring

Monitoring media massa dan media sosial periode Januari-Desember 2023 dibuat guna mendapatkan gambaran efektivitas keberhasilan komunikasi Mendag Zulkifli Hasan dan Kementerian Perdagangan mengenai program kerja dan kebijakan kepada masyarakat melalui saluran media massa arus utama (*mainstream*) dan media sosial.

Media monitoring ini bertujuan:

- Mengidentifikasi isu yang diangkat media pada satu masa periode monitoring,
- Mengidentifikasi penekanan berita (positif, netral, waspada, negatif),
- Mengidentifikasi luas terpaan media pada pemberitaan isu sektor perdagangan (*exposure*),
- Mengidentifikasi isu perdagangan yang diperbincangkan di media sosial,
- Menjadi salah satu dasar rekomendasi tindak lanjut dan pengambilan kebijakan.

Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring Media Biro Humas Kemendag. Hasil monitoring pemberitaan terkait isu perdagangan menunjukkan jumlah pemberitaan dan persentase *tone* positif dan netral bersifat fluktuatif setiap bulannya. Fluktuasi hasil monitoring tersebut bergantung pada beberapa faktor, diantaranya yaitu jumlah publikasi yang diterbitkan Kemendag maupun jumlah kegiatan/program yang dipublikasikan maupun yang diliput oleh media massa.

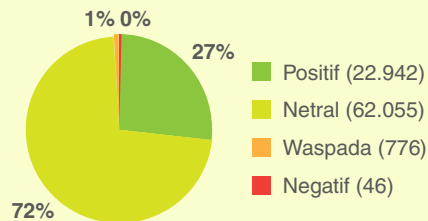
Selain itu, faktor-faktor eksternal lainnya juga turut memengaruhi pemberitaan, misalnya kondisi ekonomi nasional dan global,

perkembangan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok) dan barang penting, serta peristiwa penting dalam skala nasional dan global.

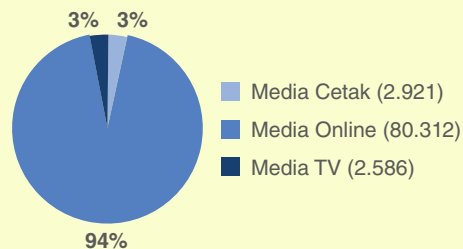
Hasil monitoring perbincangan di media sosial menunjukkan jumlah postingan perbincangan di platform-platform media sosial, sentimen perbincangan, dan topik perbincangan.

Biro Humas mencatat sejumlah pemberitaan terkait isu perdagangan di media massa arus utama (*mainstream*) pada periode Januari—Desember 2023 sebanyak **85.819** berita. Persentase pemberitaan sentimen positif dan netral pada tahun 2023 yaitu 99 persen, dengan rangkuman sebagai berikut:

Sebaran Sentimen Pemberitaan 2023

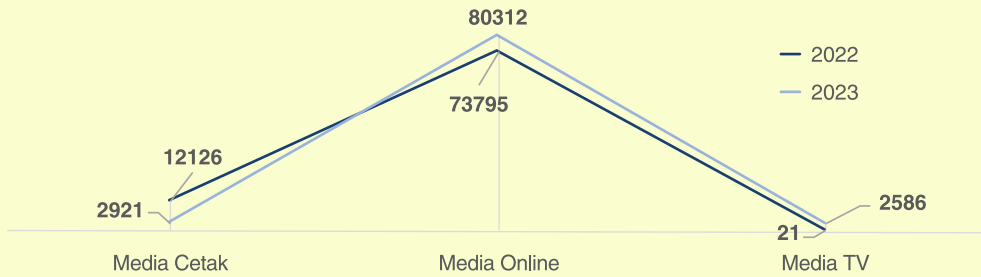


Sebaran Jenis Media 2023

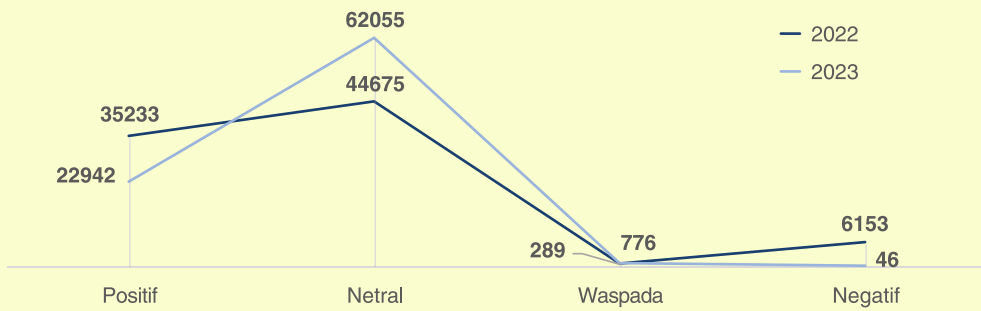




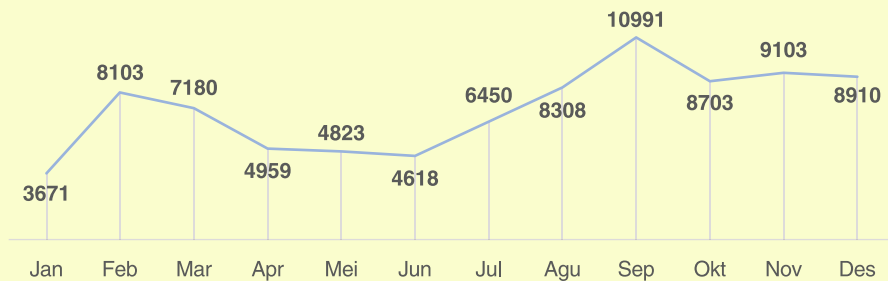
Sebaran Sentimen Pemberitaan 2022—2023



Sebaran Jenis Media (2022—2023)



Grafik berikut menunjukkan pergerakan *exposure* pemberitaan pada setiap bulannya di tahun 2023:



Top Isu Triwulan I 2023:	Top Isu Triwulan II 2023:	Top Isu Triwulan III 2023:	Top Isu Triwulan IV 2023:
<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan Harga Bapok • Penyelenggaraan operasi pasar untuk stabilisasi harga • Harga dan stok beras • Kelangkaan MINYAKITA 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan harga sejumlah bapok • Pemantauan harga bapok di berbagai daerah • Upaya stabilisasi harga bapok 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dan stabilisasi harga beras • Dukungan perkembangan dan optimalisasi UMKM • Pemerintah sepakati aturan dagang dan media sosial dan E-Commerce 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan bagi pengembangan dan optimalisasi UMKM • Langkah pemerintah tekan inflasi dengan OP dan pasar murah • Penutupan hingga kembalinya Tiktok Shop di Indonesia

Top Isu 2023

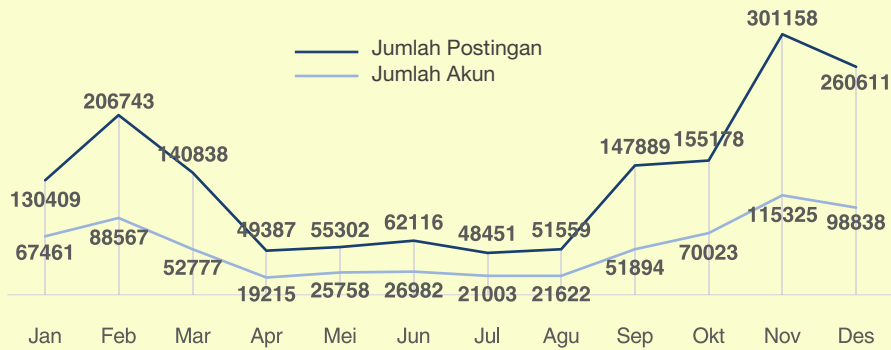




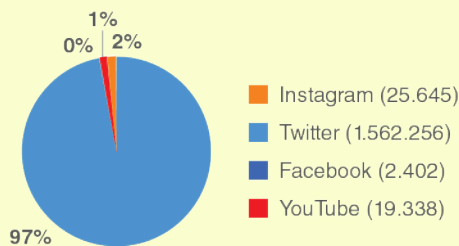
Popularitas di Media Sosial

Kementerian Perdagangan makin populer di media sosial. Perbincangan warganet sangat tinggi. Diagram berikut menunjukkan perbincangan relevan terbanyak terkait Kementerian Perdagangan di media sosial pada Januari—Desember 2023. Pada periode tersebut, total perbincangan terpantau sebanyak 1.609.641 postingan dengan popularitas 96% positif dan netral. Sentimen negatif hanya 62.870 post (4%). Aplikasi Twitter atau X menjadi platform yang paling banyak digunakan.

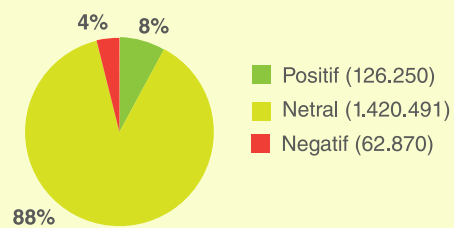
Exposure Perbincangan 2023



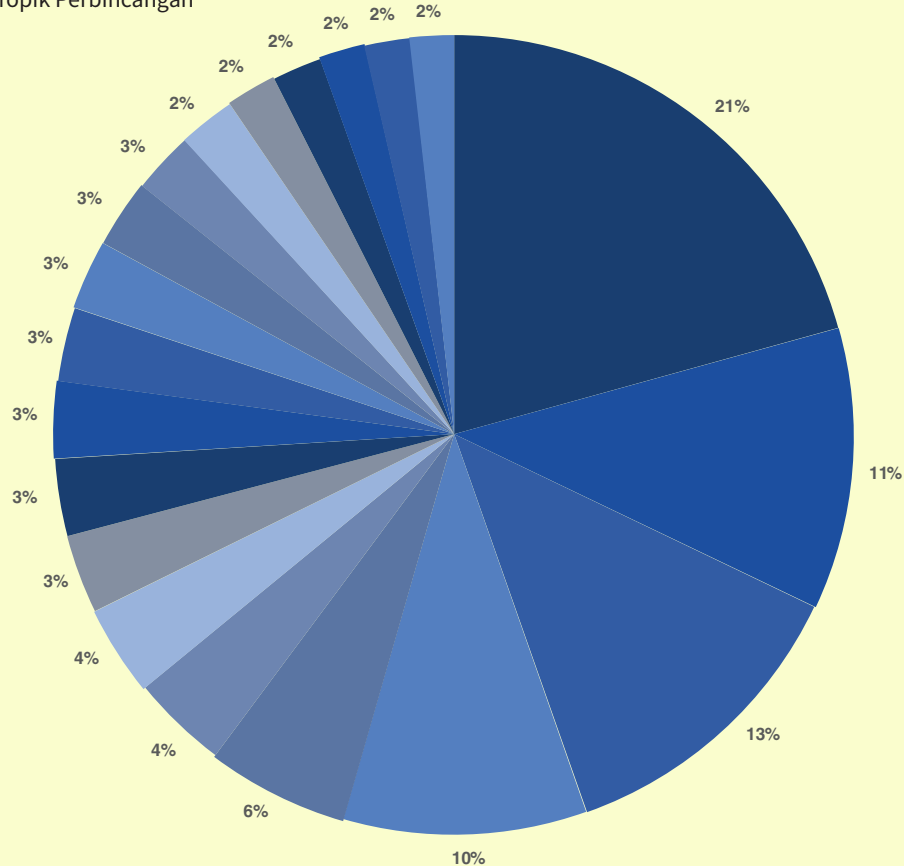
Sebaran Platform Perbincangan



Sebaran Sentimen Perbincangan



Topik Perbincangan



- Pembahasan Pemilu 2024
- Tanggapan impor beras dan harga gabah sulitkan petani
- Upaya pemerintah stabilisasi inflasi stok, dan harga pangan melalui bantuan pangan dan pasar murah
- Pemerintah menambah kuota beras impor 1,5 juta ton
- Kenaikkan Harga Bahan Pokok mulai Beras, Bawang, Cabai, hingga Telur
- Mendag turut dampingi Jokowi serahkan BLT El Nino di Kantor Pos Genteng
- Beras impor asal China dan Thailand siap masuk lagi ke Indonesia di 2024
- Mendag Zulhas tolak usul penyaluran bansos ditunda: ini sangat dibutuhkan masyarakat
- Kebijakan Ekspor Pasir Laut Tuai Pro dan Kontra
- Permohonan perlindungan dana masyarakat dari indodax
- Bapanas memperkirakan harga beras, jagung, gula masih akan terus tinggi
- Jelang Nataru harga beras rata-rata naik, stok Bulog aman
- Mendag diprotes warganet terkait penutupan tiktok shop
- Kenaikan harga gula di beberapa daerah
- Pemenuhan CBP melalui importasi beras
- Pedagang memprediksi bahwa kenaikan harga beras di pasar akan terus merangkak



SEKRETARIAT JENDERAL Biro Perencanaan

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai sebesar **77,94** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu kualitas Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.







12

Sukses Lindungi Industri Dalam Negeri

“Di era perdagangan bebas, ekspansi perdagangan nyaris seperti serangan laron di malam hari. Di mana ada terang, di situ akan diserbu. Mendag Zulhas berhasil melindungi industri nasional dari serbuan laron-laron pedagang internasional.”



Kinerja perdagangan tak terlepas dari menjaga dan melindungi industri dalam negeri dari gangguan, hambatan dan bahkan serbuan barang dari luar. Mendag Zulhas menyadari betul problema besar perdagangan ini. Karena itu, industri dalam negeri harus dilindungi dari berbagai aksi-aksi perdagangan yang merugikan. Patut diacungi jempol, Mendag Zulhas sukses mengorkestrasi perlindungan industri dalam negeri melalui berbagai instrumen di bidang perdagangan. Apa saja yang sudah dan tengah dilakukan Mendag Zulhas?





Dalam dinamika globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, akses pasar yang aman adalah pondasi utama bagi kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam perdagangan. Selaras dengan strategi peningkatan percepatan ekspor dan peningkatan ekspor, secara paralel Kementerian Perdagangan melakukan pengamanan perdagangan dan akses pasar sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan nasional dan kebijakan peningkatan ekspor. Makin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan yang dilakukan Indonesia baik **defensif** maupun **ofensif**. Pengamanan perdagangan yang telah dilakukan antara lain:

- Pengamanan kepentingan akses pasar Indonesia atas kebijakan **Uni Eropa - Deforestation - Free Commodities (DFC)**. Indonesia terus menolak disetujuinya proposal DFC, yang antara lain ber-tujuan untuk mengenakan *mandatory due diligence* terhadap 7 (tujuh) produk yang dianggap berpotensi memiliki dampak terhadap deforestasi. Produk tersebut adalah kedelai, daging sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, karet, dan kopi.
- Selain itu Indonesia juga melakukan klarifikasi dan pengamanan akses pasar antara lain:

Klarifikasi Indonesia atas (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang diangkat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kanada. (2) UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diangkat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanda, Swiss, Australia, Switzerland, Norwegia dan Filipina. Pengamanan akses pasar Indonesia atas kebijakan negara lain:

- India - Geo Textile and Protective Textile (Quality Control Order) 2022
- Uni Eropa-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- Uni Eropa - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products;
- India-Viscose Staple Fibres Quality Control Order 2022
- India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles.

Kementerian Perdagangan selaku Koordinator Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional secara total pada tahun 2023 telah menangani 3 (tiga) kasus terkait dengan usulan tindakan pengamanan yaitu untuk usulan pengenaan (1) Perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTM) Sirup Fruktosa, (2) Perpanjangan BMTM Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous, dan (3) Perpanjangan BMTM Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, yang mana untuk kasus kertas sigaret telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan pada Desember 2023 yang menetapkan bea masuk yang dikenakan kepada kertas sigaret impor mulai tahun 2024 hingga 2027, sementara untuk kasus lainnya masih dalam proses penerbitan PMK.

Selain penanganan kasus, telah dilaksanakan sosialisasi dan workshop kepada pelaku usaha dan instansi pemerintah yang terkait tindakan pengamanan perdagangan di Bekasi dan Surabaya agar terdapat kesepahaman tentang mekanisme dan tata cara yang dapat dilakukan apabila pelaku usaha di dalam negeri merasa adanya ancaman akibat dari Tindakan dumping ataupun aktivitas perdagangan yang tidak fair dari negara mitra dagang, serta adanya ancaman dari serbuan produk impor.

Selama tahun 2023, terdapat tiga surat Menteri Perdagangan mengenai keputusan pengenaan *trade remedies* yang disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diproses penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya.

Tabel 3. Keputusan Menteri Perdagangan terkait Pengenaan *Trade Remedies* Tahun 2023

No Surat	Jenis <i>Trade Remedies</i>	Tanggal Surat Mendag	Keterangan
PD.01/560/M-DAG/SD/08/2023	Pengenaan BMTM atas Impor Produk Sirup Fruktosa	1 Agustus 2023	Perpanjangan ke-1
PD.01/720/M-DAG/SD/10/2023	Pengenaan BMTM atas Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous	9 Oktober 2023	Perpanjangan ke-1
PD.01/896/M-DAG/SD/12/2023	Pengenaan BMTM atas Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya	19 Desember 2023	Perpanjangan ke-1

Selanjutnya, terdapat lima instrumen *trade remedies* yang telah ditetapkan melalui PMK, yaitu satu PMK mengenai pengenaan BMAD dan empat PMK mengenai pengenaan BMTM.



Instrumen *Trade Remedies* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2023

No PMK	Jenis Trade Remedies	Tanggal Ditetapkan PMK	Keterangan
PMK No.32 Tahun 2023	Pengenaan BMAD atas Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam itu serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya asal Tiongkok	20 Maret 2023	Perpanjangan ke-1
PMK No. 45 Tahun 2023	Pengenaan BMTP atas Impor Produk Tirai	26 April 2023	Perpanjangan ke-1
PMK No. 46 Tahun 2023	Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang	26 April 2023	Perpanjangan ke-1
PMK No. 75 Tahun 2023	Pengenaan BMTP atas Impor Produk Evaporator	14 Agustus 2023	Perpanjangan ke-1
PMK No. 151 Tahun 2023	Pengenaan BMTP atas Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous	27 Desember 2023	Perpanjangan ke-1

Perkembangan kinerja impor produk yang dikenakan trade remedies secara umum selama periode Januari—November 2023 ditunjukkan pada berikut.

Perkembangan Kinerja Volume Impor Produk yang Dikenakan Trade Remedies

Produk	Volume Impor (ribu ton)		Growth (persen)
	Jan-Nov 2022	Jan-Nov 2023	
Frit dan Glasir atau Preparat Semacam itu serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya asal Tiongkok	5.4	13.4	149.5
Tirai	0.6	0.5	-15.1
Benang	14.2	10.7	-24.7
Evaporator	4.1	4.5	10.4
Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous	13.3	15.4	15.9

Sumber: BPS, 2023 (diolah Puska EIPP)

Selain itu, Kementerian Perdagangan telah menangani 61 (enam puluh satu) kasus *Trade Remedies* / Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) selama periode Januari–Desember 2023 yang terdiri dari: 32 kasus lanjutan tahun 2022 dan tahun sebelumnya serta 29 kasus inisiasi baru di tahun 2023. 32 kasus lanjutan Tahun 2022 dan tahun sebelumnya tersebut terdiri dari 21 kasus *Trade Remedies*, 2 kasus *Circumvention* dan 9 kasus HTP. Sementara, 29 kasus inisiasi baru terdiri dari 22 kasus *Trade Remedies* dan 7 kasus HTP.

Selama periode Januari–Desember 2023, terdapat 12 kasus yang dihentikan atau dibebaskan yaitu 11 kasus *Trade Remedies* dan 1 kasus HTP. Sementara itu, terdapat 10 kasus yang dikenakan yakni 8 kasus *trade remedies* dan 2 kasus HTP.

Mendag Zulhas berhasil mengamankan potensi nilai ekspor perdagangan Indonesia pada periode Januari-Desember 2023 sebesar:

USD 413,3 JUTA atau
setara **RP 6,4 TRILIUN**

Kurs Tengah BI 29 Desember 2023, 1 USD - Rp 15146



Dumping
A4 Copy Paper
oleh Australia
USD 15,4 Juta



HTP
Green Procurement
Procedure - Sertifikasi
Kehutanan oleh Jepang
USD 272,0 Juta



Dumping
Viscose Staple Fibre
oleh India
USD 7,3 Juta



Safeguard
Produk Pakaian Jadi
oleh Peru
USD 7,3 Juta



Safeguard
PVC Resin
oleh India
USD 68,6 Juta



Dumping
Saturated Fatty Alcohol
oleh India**



Safeguard
Inner Tubes for Bicycles,
Velocipedes, Motorcycles
and Scooters oleh Maroko
USD 346,4 Ribu



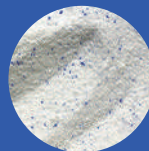
Safeguard
Paintings
oleh Madagaskar
USD 0*



Subsidi
Fatty Acid
oleh Uni Eropa**



Safeguard
Fasteners oleh
Afrika Selatan
USD 1,4 Juta



Safeguard
Detergent Powder
oleh Madagaskar
USD 5,4 Juta



Subsidi
Fiberboard
oleh India
USD 6,7 Juta

* Tidak terdapat ekspor ke Negara tujuan

** Adanya Banding yang diajukan untuk Produk yang sama dengan tuduhan yang berbeda



12 | Sukses Lindungi Industri Dalam Negeri

Upaya masif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan telah sukses mengamankan potensi nilai ekspor Indonesia sebesar USD413,3 Juta atau setara dengan Rp6,4 Triliun pada periode Januari – Desember 2023 dengan kurs 1 USD= Rp15.416 (kurs tengah BI 29 Desember 2023). Kasus yang dikenakan antara lain kasus dumping A4 *copy paper* oleh Australia sebesar USD15,4 Juta, HTP *green procurement procedure* – sertifikasi kehutanan oleh Jepang sebesar USD272 Juta, kasus dumping – *Viscose Staple Fibre* oleh India sebesar USD7,3 Juta, kasus *safeguard* produk pakaian jadi oleh Peru sebesar USD7,3 Juta, kasus *safeguard* – *PVC Resin* oleh India sebesar USD68,6 Juta, kasus *safeguard* – *Inner tubes for bicycles, velocipedes, motorcycles and scooters* oleh Maroko sebesar USD346,4 ribu, kasus *safeguard* – *Fateners* oleh Afrika Selatan sebesar USD1,4 juta, dan kasus *safeguard* – *Detergent Powder* oleh Madagaskar sebesar USD5,4 juta serta kasus subsidi - *fiberboard* oleh India sebesar USD6,7 juta. Selain itu juga terdapat kasus *dumping* – *Saturated Fatty Alcohol* oleh India dan kasus *subsidi* – *Fatty acid* oleh Uni Eropa yang banding diajukan untuk produk yang sama namun dengan tuduhan yang berbeda. Sementara itu juga terdapat tuduhan kasus *safeguard* – *Paintings* oleh Madagaskar namun tidak terdapat ekspor Indonesia ke negara tersebut.



Selidiki Kasus Anti Dumping

Penyelidikan kasus anti dumping yang dilakukan KADI pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kasus dimana sebanyak 2 (kasus) sudah masuk di tahap Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional yaitu:

- *Sunset Review Tinplate* negara dituduh dumping Tiongkok, Republik Korea dan Taiwan.
- *Sunset Review I dan H Section* dituduh dumping Tiongkok. Delapan kasus penyelidikan antidumping masih dalam proses penyelidikan yaitu:

Kasus Pengean Bea Masuk Anti Dumping Indonesia yang Masuk Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional

Produk	Tanggal Inisiasi	Negara Asal/ Dituduh	Keterangan
Sunset Review Tinplate No. HS: 7210.12.10 dan 7210.12.90	19-12-2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok • Korea • Taiwan 	Telah menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan
Sunset Review I dan H Section HS: 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11 dan 7216.33.19	13-02-2023	Tiongkok	Telah menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan

8 (delapan) kasus penyelidikan antidumping masih dalam proses penyelidikan yaitu :

- *Sunset Review Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas (HRC/ Hot Rolled Coil)* negara yang dituduh dumping Tiongkok, India, Thailand, Taiwan, Rusia dan Bellarusia, Kazaktan
- *Ubin Keramik* negara yang dituduh dumping Tiongkok
- *Nylon Film* negara yang dituduh dumping Tiongkok, Taiwan dan Thailand
- *Sunset Review Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)* negara dituduh Taiwan dan Thailand
- *Interim Review Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)* negara dituduh Thailand
- *Sunset Review III Hot Rolled Plate (HRP)* negara yang dituduh dumping Tiongkok, Singapura dan Ukraina
- *Polypropylene Copolymer* negara yang dituduh dumping Republik Korea, Malaysia, Singapura, UAE dan Vietnam
- *Benang Filamen Sintetik* negara yang dituduh dumping Tiongkok



Kasus Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Indonesia dalam Tahap Penyelidikan

No.	Produk	Tanggal Inisiasi	Negara Asal/ Dituduh	Keterangan
1.	Sunset Review Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas (HRC/Hot Rolled Coil) HS: 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.90, 7208.90.10, 7208.90.20 dan 7208.90.90	06-02-2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok • India • Thailand • Taiwan • Rusia • Belarusia • Kazakhstan 	Sudah dalam tahap penyelesaian Laporan Akhir dan Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti-dumping Sudah dalam tahap penyelesaian Laporan Akhir dan Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping
2.	Ubin Keramik HS 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.22.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, 6907.40.92	15-03-2023	Tiongkok	Dalam tahap penyusunan Laporan Data Utama Dalam tahap penyusunan Laporan Data Utama
3.	Nylon Film 3920.92.10 3920.92.99	28-03-2023	<ul style="list-style-type: none"> • China • Taiwan • Thailand 	Masih Dalam Proses Penyelidikan
4.	Sunset Review Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) 3920.20.10; 3920.20.91; 3920.20.99	29-03-2023	<ul style="list-style-type: none"> • Thailand • Vietnam 	Sudah pada tahap Laporan Utama dan Public Hearing Sudah pada tahap Laporan Utama dan Public Hearing
5.	Interim Review Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) 3920.20.10; 3920.20.91; 3920.20.99	29-03-2023	Thailand	Sudah pada tahap Laporan Utama dan Public Hearing Sudah pada tahap Laporan Utama dan Public Hearing
6.	Sunset Review Hot Rolled Plate (HRP) 7208.51.00 7208.52.00)	04-08-2003	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok • Singapore • Ukraine 	Masih Dalam Proses Penyelidikan
7.	Polypropylene Copolymer 3902.30.90	14-08-2023	<ul style="list-style-type: none"> • Rep.Korea • Malaysia • Singapore • UAE • Vietnam 	Masih Dalam Proses Penyelidikan
8.	Benang Filamen Sintetik 5402.33.10; 5402.33.90; 5402.46.10; 5402.46.90	12-09-2023	Tiongkok	Masih Dalam Proses Penyelidikan



Tangani *Safeguard* .

Menurut website WTO, Indonesia saat ini berada di peringkat pertama sebagai negara yang paling aktif dalam penerapan *safeguard measure* dengan total kasus yang ditangani sebanyak 38 produk. Kasus yang dilanjutkan ke penerapan *safeguard measure* adalah sebanyak 28 produk. Sementara, selama periode Januari – Desember 2023 sendiri, KPPI telah menangani 9 kasus *safeguard* terhadap produk: Sirup Fruktosa; Karpet dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya; Kertas Sigaret; Rockwool; Benang Kapas; Kain Tenunan dari Kapas; Benang Filamen Artifisial; Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial; dan Terpal Plastik.

KPPI juga menyelenggarakan serangkaian sosialisasi pada tahun 2023 di 10 (sepuluh) daerah, bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Daerah berupa seminar maupun konsultasi one-on-one di Bandar Lampung, Batam, Yogyakarta, Semarang, Tangerang, Bandung, Balikpapan, Bogor, Sidoarjo, dan Karawang.



Hadapi Sengketa Internasional

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dikenal gagah berani membela kepentingan dan kedaulatan nasional di bidang perdagangan. Mendag Zulhas berada di garda terdepan dalam membela kepentingan nasional tersebut. Indonesia bersengketa dengan negara anggota *World Trade Organization* (WTO). Tujuannya untuk membela dan mengamankan akses pasar produk-produk Indonesia di pasar global serta membela kebijakan dalam negeri untuk kepentingan nasional.

Saat ini, Indonesia telah menjadi penuntut (*complainant*) untuk kasus DS 593: *European Union - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*, DS616: *European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia*, dan DS 618: *European Union – Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia*. Indonesia telah dituntut oleh negara anggota WTO lainnya untuk kasus DS592: *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*.

1. Sengketa Nikel (DS592: *Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*)

Pada Januari 2020, Uni Eropa menginisiasi sengketa di WTO terkait kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan Indonesia sejak tahun 2014 sebagai mandat UU Minerba (UU no 4/2009). Kementerian Perdagangan sebagai focal point dalam penanganan sengketa, sesuai dengan arahan Presiden RI, mempertahankan jalannya hilirisasi hingga tahun ini meskipun ditengah sengketa dengan Uni Eropa. Hingga tahun 2024 diperkirakan Indonesia akan memiliki sekitar 60 smelter sebagai akibat dari kebijakan hilirisasi.





Update perkembangan:

- 8 Desember 2022: Indonesia mengajukan **banding atas putusan panel** sengketa DS592 ke **Badan Banding (Appellate Body/ AB) WTO**. Dengan tidak berfungsinya AB, maka proses litigasi banding tertunda.
- 7 Juli – 1 September 2023: **Konsultasi publik UE** dalam rangka inisiasi tindakan retaliasi unilateral terhadap Indonesia atas langkah banding Indonesia pada DS592 ke AB.
- September – November 2023: penyusunan **implementing regulation** untuk retaliasi unilateral terhadap Indonesia yang diharapkan dapat **diterapkan pada Nov/Des 2023**.
- **19 September 2023**: mayoritas anggota **Parlemen UE mengkritisi** secara terbuka atas rencana retaliasi terhadap Indonesia dan **mendorong penyelesaian sengketa nikel melalui IEU-CEPA**. Saat ini, **Komisi UE terus melakukan serangkaian lobi** untuk mendapatkan dukungan atas rencana retaliasi terhadap Indonesia.

2. Perkembangan sengketa kelapa sawit dan biodiesel (DS 593 *European Union: Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*)

Kasus DS593 merupakan kasus gugatan Indonesia kepada Uni Eropa terhadap kelapa sawit dan biofuel berbahan kelapa sawit yang termuat dalam *Renewable Energy Directive II*. Indonesia membela bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia dengan menggunakan alasan lingkungan. Larangan impor sawit yang dikenakan oleh Uni Eropa tidak berdasarkan bukti ilmiah yang kuat.



3. Perkembangan Sengketa SSCR (DS616: *European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold- Rolled Flat Products from Indonesia*)

Pada Januari 2023, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO atas keputusan EU untuk mengenakan bea masuk anti subsidi (*countervailing measures*) produk stainless steel dari Indonesia. Dalam keputusannya Uni Eropa, menganggap bahwa terdapat subsidi dari Pemerintah China melalui berbagai skema pendanaan dan investasi yang dinikmati produsen stainless steel di Indonesia sebagai upaya hilirisasi. Uni Eropa menamakan situasi tersebut sebagai *transnational subsidies*. Dengan gugatan di WTO, Indonesia berupaya untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi yang ada sekaligus mengoreksi interpretasi Uni Eropa terhadap aturan WTO yang tidak memiliki dasar.

Update perkembangan:

- Pada 16 Maret 2022 UE melakukan penetapan pengenaan Bea masuk anti subsidi untuk Indonesia sebesar 13.5-21.4 persen serta India sebesar 4.37-11.9 persen. Perusahaan Indonesia yang Dikenakan adalah PT Ruipu Nickel and Chrome Alloy dan PT Jindal Stainless Steel Indonesia.
- Pada Tanggal 24 Januari 2022 Indonesia mengajukan permohonan Konsultasi dengan UE di WTO. Pada tanggal 30 Mei 2023, Panel yang akan memeriksa sengketa terbentuk. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Japan, Korea, the Russian Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, dan Amerika Serikat menjadi pihak ketiga.
- Indonesia mengajukan 6 Klaim atas beberapa aspek penetapan dan penyelidikan yakni: a) Subsidi dalam bentuk *Preferential Loan* dari entitas tiongkok (*Transnational Subsidies*); b) Subsidi terkait penyediaan *nickel ore less than adequate remuneration*; c. Subsidi terkait penyediaan lahan; d) Subsidi dalam bentuk *revenue foregone (income tax, bonded zone, dll)*; e) Terkait dengan aspek formal selama penyelidikan, seperti penerapan *best information available* (BIA); f) Terkait pengenaan Anti-Dumping atas produk SSCRFP.
- Saat Ini Pemri sedang melakukan penyusunan dokumen untuk *hearing* pertama (FWS). *First Substantive Meeting* (FSM) akan dilaksanakan pada awal April 2024.



4. Perkembangan Sengketa Biodiesel (DS 618: *European Union – Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia*)



- Pada tanggal 6 Desember 2018, Komisi UE menginisiasi penyelidikan anti-subsidi terhadap produk biodiesel dari Indonesia berdasarkan petisi yang diajukan oleh *European Biodiesel Board* (EBB) pada tanggal 19 Oktober 2018. Pada tanggal 12 Agustus 2019, dan kemudian mengeluarkan *definitive measures* pada tanggal 28 November 2019 yang berlaku selama 3 tahun. Kebijakan ini terindikasi sebagai upaya UE melindungi industri domestiknya dari persaingan dengan produk biodiesel berbasis sawit. Kebijakan ini sangat berdampak terhadap akses pasar Indonesia untuk masuk ke dalam pasar UE.
- Atas permintaan dari IDN dan dalam rangka menyelamatkan kinerja ekspor produk biodiesel Indonesia di pasar global, maka Pemri mengajukan gugatan sengketa ke WTO pada tanggal 11 Agustus terkait pengenaan bea masuk imbalan (*countervailing duties*) terhadap produk biodiesel dari Indonesia melalui permohonan konsultasi dengan UE ke WTO. Pada tanggal 5–6 Oktober telah dilaksanakan konsultasi di Jenewa namun tidak membuahkan hasil, sehingga Indonesia memutuskan untuk melanjutkan tahapan sengketa ke pembentukan Panel.
- Isu-isu utama dalam klaim sengketa DS618 terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 1) Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS)/*Oil Palm Plantation Fund* (OPPF); 2) Tuduhan terkait Dukungan Pemerintah atas Penyediaan CPO (penyediaan CPO yang LTAR dianggap fungsi yang melekat pada Pemerintah, *benchmark price* dan *income or price support*); 3. Ancaman Kerugian Material (perbandingan harga PME at CFPP + 13 (Indonesia) dan PME at CFPP + 10 (industri UE dan kesesuaian penghitungan kerugian material).
- Indonesia telah mengajukan pembentukan Panel pada sidang DSB regular Oktober dan sedang berupaya untuk menyelesaikan tahapan pembentukan panel. Panel sengketa ditargetkan terbentuk pada triwulan I 2024 dan pemeriksaan sengketa dilaksanakan pada semester I tahun 2024.



- 5. Sengketa yang dihadapi oleh Indonesia merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi (DS 592) dan mempertahankan akses pasar barang yang dikenakan hambatan atas kebijakan yang diberlakukan oleh Negara mitra (DS 616 dan DS 618)**



6. Gugatan terhadap Uni Eropa dalam Kerangka Sistem Penyelesaian Sengketa WTO terkait Pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia – DS616. Pengenaan BMI dinilai inkonsisten terhadap aturan WTO, diantaranya GATT 1994, SCM Agreement, dan Anti-Dumping Agreement.



Sukseskan Target Kinerja Ekonomi 2024



Melangkah dengan Optimistis

Menapaki matahari pagi di pergantian tahun, Mendag Zulhas mulai waspada namun tetap memasang kuda-kuda optimistis dalam membangun kinerja perdagangan. Meski sudah terlepas dari tekanan Pandemi, pada 2024, situasi global sedang tak baik-baik saja. Perang terjadi. Anomali cuaca terjadi. Ancaman krisis energi dan pangan menghantui. Bagaimana menghadapi kinerja perdagangan pada tahun Naga Kayu ini?

Di tengah ketidakpastian global tahun 2023, Indonesia masih mampu mencatatkan sejumlah capaian signifikan di sektor perdagangan. Beberapa capaian berupa keberhasilan menjaga inflasi, tercapainya surplus perdagangan sepanjang tahun, hingga sejumlah kebijakan-kebijakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.

Memasuki tahun 2024, perlambatan ekonomi global diprediksi masih akan terjadi. Ini karena adanya tantangan berupa perubahan iklim, ketahanan pangan dan meningkatnya tensi geopolitik global, terbaru adanya intrik di Laut Merah yang membuat jalur logistik terganggu.

Di tengah situasi global dan dalam negeri, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,5% sementara IMF mematok pertumbuhan RI 2,9%. Pemerintah Indonesia lebih optimistis dengan memastikan pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2%.

“Memasuki 2024, kami menatap optimistis, namun tetap waspada terhadap tantangan di masa depan. Prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai organisasi internasional menunjukkan adanya perlambatan. Namun, kinerja perdagangan 2023 memberikan optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 5,20 persen pada 2024,” kata Mendag Zulhas.

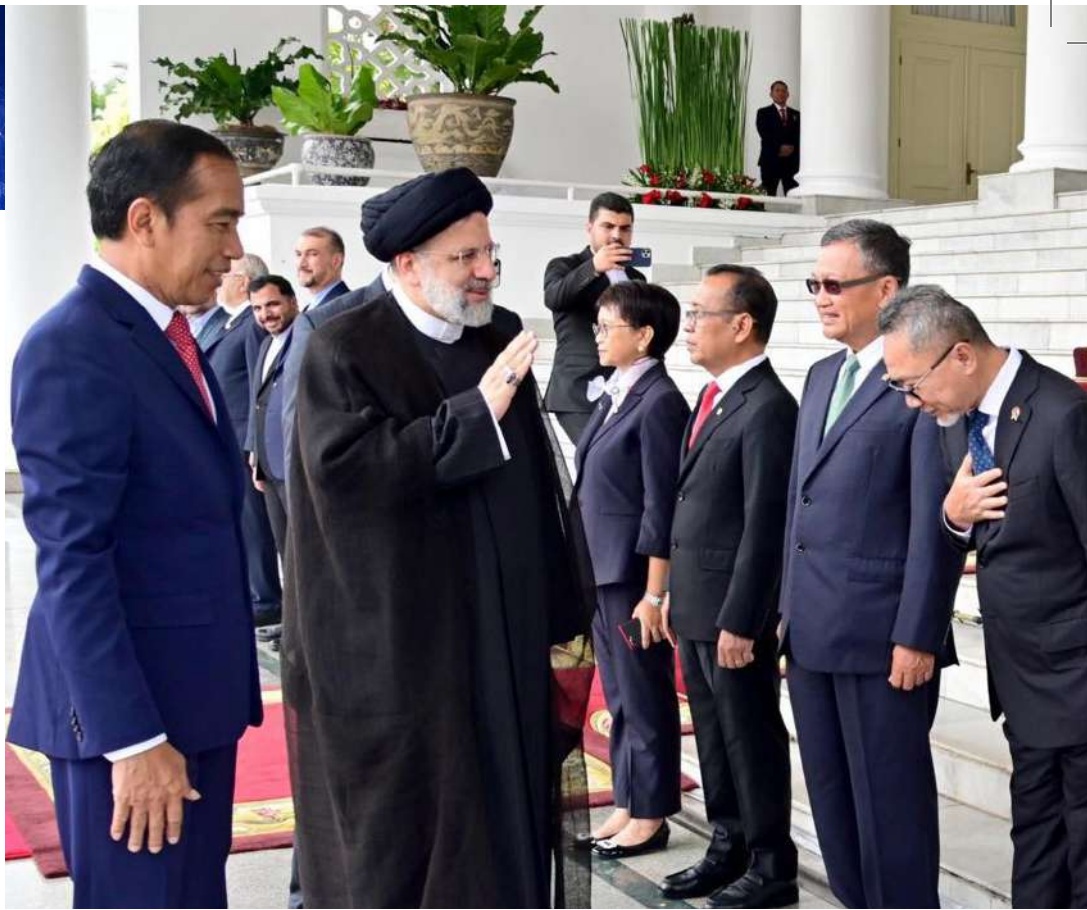
Selain itu, inflasi diprediksi masih cukup terkendali di kisaran 1,5—3,5 persen sesuai target 2024. Pemerintah akan berupaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekspor nonmigas sesuai target 2,5—4,5 persen, meski harga komoditas dunia yang masih landai.

Ketidakpastian perekonomian dan perdagangan selama 2024 diprediksi tetap diwarnai tensi geopolitik, perubahan iklim, serta ancaman krisis pangan dan energi. Di tengah situasi tersebut. Kendati demikian, belajar dari tahun sebelumnya, tren surplus neraca perdagangan diharapkan tetap berlanjut. Tahun lalu, periode Januari-November, Indonesia mencatat surplus perdagangan USD33,63 miliar.

Tahun 2024 juga menjadi tahun keberpihakan kepada rakyat sebagai misi terpenting. Kemendag melakukan perumusan dan implementasi kebijakan yang melindungi UMKM dan hak-hak konsumen. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan terus dimonitoring implementasinya agar makin efektif menjadi bagian dalam perlindungan konsumen dan kesejahteraan masyarakat.







Memperkuat Keberhasilan Mandat



Salah satu amanat Presiden Joko Widodo kepadanya adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Setelah sukses menjaga stabilitas harga minyak goreng dengan menyalurkan 3,26 juta ton pada 2023, program Minyak Goreng Rakyat akan terus dilanjutkan. MINYAKITA akan menjadi motor penggerak stabilisasi harga di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, minyak goreng disalurkan dengan rata-rata komposisi minyak curah 64 persen berbanding MINYAKITA 36 persen. Merek MINYAKITA digunakan oleh berbagai produsen serta pengemas dan telah tersalurkan ke 34 provinsi sepanjang 2023.

Upaya stabilisasi harga minyak goreng dan bapak lainnya sepanjang 2023 turut berkontribusi meredam laju inflasi di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya tingkat inflasi negara-negara di dunia. Sepanjang 2023, Kemendag berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan bapak dengan turun langsung ke pasar-pasar dan memantau secara intensif.



Pemantauan bapak tetap diperkuat Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag yang real time memantau 679 pasar di 503 kabupaten dan kota. Khusus beras, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk mengakselerasi pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan transportasi bapak dapat ditanggulangi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Kemendag mengawasi distribusi bapak dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk mencegah upaya spekulasi,” pesan Mendag Zulhas.

Selain itu, kebijakan pro-rakyat makin diintensifkan pada tahun ini. Kemendag akan menggerakkan warung-warung masyarakat melalui program Seribu Warung Bantu Rakyat. Fasilitas tersebut diberikan melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang mendukung penerapan ekosistem empat pilar peningkatan kapasitas UMKM yang didukung elemen UMKM itu sendiri, ritel modern, pembiayaan, serta niaga elektronik.

Memperkuat Kinerja Ekspor




Pemulihan ekonomi menjadi bagian kunci yang harus dijalankan pemerintah. Kinerja ekspor Indonesia pada 2023 terbukti berkontribusi signifikan terhadap momentum pemulihan Indonesia yang masih berjalan. Pada triwulan III-2023, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh mendekati 5 persen (YoY). Pertumbuhan ini didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen (YoY) seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, dan keyakinan konsumen yang masih tinggi.

Neraca perdagangan Indonesia periode Januari-November 2023 yang tercatat surplus USD 33,63 miliar masih terhitung tinggi meskipun nilainya turun USD 16,91 miliar dibanding tahun lalu. Neraca perdagangan Indonesia pun tercatat tetap surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari-November 2023 sebesar USD 236,41 miliar. Nilai ekspor nonmigasnya sendiri tercatat sebesar USD 221,96 miliar. Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas kita adalah Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan India,” ungkapnya.



A photograph showing President Joko Widodo on the left, standing at a podium with the Garuda Pancasila emblem and clapping. On the right, a man in a dark suit and glasses holds two large, signed documents. Behind them are five flags: one Indonesian flag and four Iranian flags. The scene is decorated with a large floral arrangement of red and white flowers and a golden Garuda emblem on the left. The floor is covered with a red carpet and a yellow patterned rug.

Di sisi lain, kinerja impor secara kumulatif selama Januari — November 2023 mencapai USD202,78 miliar atau turun 6,80 persen (YoY). Nilai impor nonmigas Indonesia pada periode tersebut sebesar USD 170,32 miliar dengan tiga negara asal impor nonmigas utama Tiongkok, Jepang, dan Thailand.



Upaya memperkuat kinerja ekspor dan menata impor juga menjadi program prioritas pemerintahan. Kemendag berkomitmen terus mendorong kinerja ekspor melalui kemudahan dan kepastian hukum. Sebelumnya, Kemendag menerbitkan dua Permendag mengenai ekspor. Keduanya adalah Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pemberian stimulus bagi pelaku usaha dan eksportir untuk kemudahan ekspor tetap dilanjutkan. Pemerintah menghapus biaya pembelian Formulir Surat Keterangan Asal (SKA). Ketentuan ini diatur dalam Permendag Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.

Terkait impor, Kemendag menata kembali kebijakan impor berupa pengawasan impor dari post-border ke border. Diatur pula relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketentuan-ketentuan ini tertuang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. "Impor ditata dan ekspor dipermudah karena kita ingin melindungi UMKM dan industri dalam negeri," kata Zulhas.

Perluas Pasar Ekspor Baru



Kinerja ekspor juga akan diperkuat dengan memperluas pasar ekspor baru. Mendag Zulhas mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas perdagangan Indonesia di tengah perlambatan ekonomi, Indonesia menjalin beberapa perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra. Perjanjian perdagangan akan berkontribusi menciptakan pasar baru untuk meningkatkan ekspor.

“Pada 2023, kita telah membuka akses pasar sebagai upaya menciptakan pasar baru. Presiden perintahkan agar tidak tergantung pada pasar tradisional,” kata dia. Terdapat tiga perjanjian yang diimplementasi pada 2023. Perjanjian *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAU-CEPA) diimplementasikan per 1 September 2023. Selain itu, perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indonesia-Korea CEPA* diimplementasikan per 2 Januari 2023.

Sementara itu, beberapa perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan pada 2023 adalah Protokol Pertama Perubahan ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA) dan Protokol Perubahan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Ditandatangani pula sejumlah perjanjian perdagangan yaitu *Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement* (BTA), *International Coffee Agreement* (ICA) 2022, dan Protokol Kedua Perubahan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Indonesia mendapatkan mandat untuk menjadi tuan rumah ASEAN atau memegang Ketetuaan ASEAN 2023 merupakan pijakan yang sangat baik untuk melangkah lebih optimis pada tahun berikutnya. Ketetuaan Indonesia di ASEAN terbukti memberikan capaian penting di bidang perdagangan dengan penyelesaian tujuh prioritas ekonomi ASEAN.



Selain itu, kinerja ekspor juga akan ditopang oleh program misi dagang yang makin agresif. Promosi ke pasar-pasar tujuan ekspor nontradisional makin diintensifkan. Sebab sebelumnya, misi dagang terbukti berhasil mendapatkan kontrak ekspor yang sangat signifikan. Misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023, misalnya, telah berhasil mengikat kontrak kerja sama senilai USD155,7 juta. Misi dagang ke Mesir pada Mei 2023 juga berhasil membukukan potensi transaksi senilai USD859 juta.

Niaga Elektronik Capai Ratusan Triliun

Pencapaian kinerja perdagangan dalam melindungi hak konsumen dan memperkuat perdagangan digital menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas, terutama pada pelaku UMKM dan pelaku perdagangan digital. Di era Mendag Zulhas, perdagangan digital seperti niaga elektronik (*E-Commerce*) menunjukkan potensi besar dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Ssepanjang 2022 niaga elektronik berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp476,3 triliun dan tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun.

Untuk mendukung potensi pertumbuhan niaga elektronik, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemendag juga menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 yang mengatur *positive list* atau barang-barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah USD 100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform niaga elektronik lintas negara berupa empat komoditas yaitu musik, perangkat lunak, buku, dan film.

Dengan mempromosikan niaga elektronik melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), pelaku usaha digital dan UMKM kembali diuntungkan sehingga mendapatkan capaian positif. “Kemendag berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan niaga elektronik Indonesia melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Harbolnas 2023 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun, meningkat Rp2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022,” ungkap Zulhas. Keberhasilan ini akan makin ditingkatkan pada tahun ini.



Tetap Lindungi Konsumen .

Pengawasan juga tetap dilanjutkan sebagai bagian penting dalam kepastian hukum. Kemendag berhasil mengawasi 1.061 pelaku usaha, terdiri atas 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan 564 pelaku usaha hasil pengawasan *post-border*. Merespons maraknya peredaran barang yang dilarang impornya sesuai ketentuan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada 2023 Mendag Zulhas tak segan-segan memimpin langsung pemusnahan pakaian bekas dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp174,81 miliar.

Perlindungan konsumen juga diberikan untuk perdagangan komoditas, dalam hal ini aset kripto. Pada periode Januari-November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Sedangkan, pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan bursa terdapat sebanyak 32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFSAK) yang sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti.

“Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau UU P2SK, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk segera difinalisasi,” ungkap Zulhas.





Gairah di Bursa CPO dan Kripto.

Sebagai sistem inovasi perdagangan, Kemendag telah meluncurkan Bursa *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Tujuan Bursa CPO membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time, sehingga dapat menjadi acuan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE).

Selain Bursa CPO, Kemendag juga telah meresmikan Bursa Kripto pada 17 Juli 2023 dengan PT Bursa Komoditi Nusantara atau *Commodity Futures Exchange* (CFX) sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia.



Prestasi Tata Kelola Pemerintahan.

Terkait tata kelola pemerintahan, Kemendag mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk makin mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Kemendag telah menjalankan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi untuk menerapkan pengelolaan risiko korupsi, dan strategi pencegahan korupsi.

“Catatan sepanjang 2023 membuat langkah sektor perdagangan menyambut 2024 makin optimistis. Kami akan terus proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan.”



Majukan
Perdagangan
Bersama
Zulhas

“Kita harus tetap optimistis menyambut masa depan perdagangan di tengah turbulensi perekonomian global. Kuncinya adalah kolaborasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas dan pers.”

– **Zulkifli Hasan**
Menteri Perdagangan RI



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110, Indonesia
www.kemendag.go.id